

SKRIPSI

**STRATEGI PERLAWANAN SULTAN HASANUDDIN TERHADAP
VOC DALAM PERANG MAKASSAR (1666-1669)**



OLEH

HASDIANA MUIN

NIM: 2220203880230010

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M/1448 H

**STRATEGI PERLAWANAN SULTAN HASANUDDIN
TERHADAP VOC DALAM PERANG MAKASSAR (1666-1669)**



OLEH
HASDIANA MUIN
NIM: 2220203880230010

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora
(S.Hum) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026 M/1448 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap
VOC dalam Perang Makassar (1666-1669)
Nama Mahasiswa : Hasdiana Muin
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203880230010
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
No. B-1268/In.39/PP.00.9/PPs.05/06/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama
NIP

: Dra. Hj. Hasnani, M.Hum
: 196203111987032002



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dra. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.IR
NIP. 197607132009121002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap
VOC dalam Perang Makassar (1666-1669)

Nama Mahasiswa : Hasdiana Muin

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203880230010

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
No. B-1268/In.39/PP.00.9/PPs.05/06/2025

Tanggal Kelulusan : 11 Mei 2026

Disetujui Oleh Komisi Penguji:

Dra. Hj. Hasnani, M.Hum.

(Ketua)

(.....)

Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

(Anggota)

(.....)

Dr. Ahmad Yani, M.Hum.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. M. Muhiddin Bakri., Lc., M.Fil.I.
NIP. 1994061320201210

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Tiada kata yang pantas penulis haturkan melainkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selesaiannya skripsi ini adalah muara dari sungai doa yang tiada henti mengalir dari lisan insan terkasih. Rasa hormat dan takzim yang tak bertepi penulis persembahkan kepada Ayahanda Abd. Muin dan Ibunda Badariah tercinta. Mereka adalah jangkar di tengah badai dan cahaya di kala gelap, berkat didikan yang penuh ketulusan serta restu yang senantiasa melangit, setiap aral melintang dalam perjalanan akademik ini terasa ringan untuk dilalui. Skripsi ini hanyalah persembahan kecil atas cinta dari mereka yang tak pernah menuntut balas. Penghormatan dan ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Ibu Dra. Hj. Hasnani, M.Hum. selaku dosen pembimbing. Di tengah berbagai keraguan dan hambatan yang penulis temui, bimbingan serta kesabaran beliau telah menjadi kompas yang mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Beliau tidak hanya membagikan ilmu, tetapi juga memberikan keteladanan tentang arti sebuah ketekunan. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare, Ibu Dr. Zulfah, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Ibu. Nurhikmah, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor II Bidang Akademik Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah bekerja keras

mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Bapak Dr. H. Muhiddin Bakri., Lc., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Ahmad Yani, S.Hum., M. Hum. selaku Dekan I Bidang AKKK, serta Bapak Dr. H. M. Ihsan Darwis, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang AUPK. Atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Saidin Hamzah, S.Hum., M. Hum. sebagai ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang telah meluangkan waktu dan mendidik serta telah mengembangkan program studi Sejarah Peradaban Islam.
4. Bapak Dr. Nurkidam, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan support dan motivasi kepada penulis mulai dari Mahasiswa baru sampai dengan Penulisan Skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Nurmi, S.Ag., M.A. selaku Kabag beserta Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai ke berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah mendidik penulis mulai dari semester 1-6 yang sabar dalam mendidik dan mempunyai kehebatan tersendiri dalam materi perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabat penulis, khususnya Adelia Faradilla dan Siti Nurhaedah, yang senantiasa membersamai, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman Angkatan 2022 Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, baik melalui diskusi, kebersamaan, maupun dukungan emosional.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bagian dari amal jariyah yang membawa keberkahan dan mendapat Ridha Allah Swt.

Pinrang, 7 Januari 2026 M
18 Rajab 1447 H

Penulis,



Hasdiana Muin

NIM: 2220203880230010



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasdiana Muin

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203880230010

Tempat/Tanggal Lahir : Barana, 23 October 2003

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Judul Skripsi : Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC
dalam Perang Makassar (1666-1669)

Menyatakan dengan penuh kesadaran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya orisinal sendiri. Jika di masa mendatang terbukti terdapat unsur duplikasi, plagiasi, atau merupakan hasil karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka penulis bersedia menerima konsekuensi berupa pembatalan skripsi serta gelar akademik yang diperoleh demi hukum.

Pinrang, 7 Januari 2026

Penyusun,



Hasdiana Muin

NIM: 2220203880230010

ABSTRAK

Hasdiana Muin, Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669) (dibimbing oleh Ibu Dra. Hj. Hasnani, M.Hum).

Penelitian ini membahas strategi perlawanan Sultan Hasanuddin dalam menghadapi *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) pada Perang Makassar tahun 1666-1669. Konflik antara Kesultanan Gowa dan VOC dilatarbelakangi oleh pertentangan kepentingan politik dan ekonomi akibat kebijakan monopoli perdagangan yang diterapkan VOC di kawasan timur Nusantara. Sebaliknya, Kesultanan Gowa mempertahankan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*) yang menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan Sultan Hasanuddin dalam menghadapi VOC serta strategi perlawanannya yang meliputi aspek militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan ideologis-teologis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber primer berupa *Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallo*, *Lontara Patturioloang ri Tu Talloka*, arsip VOC *Dagregister van Cornelis Speelman*, serta Perjanjian Bongaya (1667), dan sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis penelitian didukung oleh Teori Perlawanan James C. Scott, Teori Hegemoni Antonio Gramsci, dan Teori Strategi Sun Tzu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Sultan Hasanuddin ditandai oleh karakter yang tegas, berani, dan berorientasi pada perlindungan kedaulatan Kesultanan Gowa. Kepemimpinannya tercermin dalam kemampuannya membangun solidaritas internal, menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan sekutu, serta mempertahankan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*) sebagai dasar kebijakan maritim Gowa dalam menghadapi tekanan VOC. Berdasarkan kepemimpinan tersebut, Sultan Hasanuddin menerapkan strategi perlawanan yang bersifat multidimensional. Dalam aspek militer-politik, ia memperkuat sistem pertahanan benteng, mengoptimalkan armada laut, dan membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan sekutu di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Sultan Hasanuddin, Perang Makassar, VOC, strategi perlawanan, Kesultanan Gowa.

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	22-30
1.2	Hasil Kritik Sumber	52-60



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Potret Sultan Hasanuddin (1631-1670)	75
2.2	Relief “Siri na Pacce” di Museum Balla Lompoa, Gowa.	78
2.3	Struktur Pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo pada Abad ke-17.	80
2.4	Peta Jalur Perdagangan Nusantara Abad ke-17 dengan Pusat Pelabuhan Gowa-Tallo	84
2.5	Ilustrasi Ketegangan Politik dan Militer antara VOC dan Kerajaan Gowa Sebelum 1660.	90
3.1	Peta Aliansi dan Konstelasi Politik Sulawesi Selatan pada Masa Perang Makassar (1666-1669).	93
3.2	Rekonstruksi Benteng Somba Opu sebagai Pusat Pertahanan Gowa Abad ke-17.	95
3.3	Jalur Perdagangan Rempah di Nusantara dan Posisi Strategis Makassar Abad ke-17.	99
3.4	Ilustrasi Pelabuhan Makassar sebagai Free Port Abad ke-17.	102

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	SK Pembimbing	II
Lampiran 2	Turnitin	III
Lampiran 3	Dokumentasi	IV-V



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul.....	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	15
G. Landasan Teori.....	29
H. Metode Penelitian	33
BAB II PROFIL SULTAN HASANUDDIN DAN KONTEKS HISTORIS KONFLIK	70
A. Profil dan Kepemimpinan Sultan Hasanuddin	70
1. Latar Belakang, Pendidikan, dan Karakter Kepemimpinan ..	70
2. Nilai-Nilai Islam dan Budaya Siri' na Pacce dalam Kepemimpinan.....	73
B. Struktur Sosial dan Politik Kerajaan Gowa-Tallo sebagai Negara Maritim Islam.....	76

1. Sistem Pemerintahan dan Hubungan antara Gowa dan Tallo	76
2. Peranan Kesultanan Gowa dalam Menerapkan Prinsip <i>Mare Liberum</i> (Kebebasan Berlayar) di Asia Tenggara	78
C. Kedatangan VOC dan Ambisi Monopoli di Nusantara Bagian Timur	83
1. Kebijakan Monopoli VOC dan Respon Gowa	83
2. Pemicu Konflik dan Ketegangan sebelum Tahun 1660	85
BAB III ANALISIS STRATEGI PERLAWANAN SULTAN HASANUDDIN (1666-1669)	88
A. Strategi Militer dan Politik	88
1. Konsolidasi Kekuatan dan Aliansi Regional (Tallo, Wajo, dan Sekutu Lainnya)	88
2. Taktik Pertahanan Benteng dan Mobilisasi Pasukan	91
B. Strategi Ekonomi dan Kedaulatan	93
1. Penolakan Keras terhadap Monopoli Rempah dan Jalur Pelayaran oleh VOC	93
2. Pertahanan Prinsip <i>Mare Liberum</i> (Kebebasan Berlayar)	97
C. Strategi Ideologis dan Teologis	101
1. Penggunaan Konsep <i>Jihad</i> dan <i>Siri' na Pacce</i> sebagai Pendorong Moral	101
2. Peran Ulama dalam Membingkai Perlawanan sebagai Perang Sabil	104
BAB IV PENUTUP	108
A. Simpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	VI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-17, Kesultanan Gowa merupakan salah satu kekuatan maritim terbesar di kawasan timur Nusantara yang memiliki posisi strategis dalam jaringan perdagangan internasional. Letak geografis Makassar yang berada di jalur pelayaran antara Maluku, Jawa, Kalimantan, dan wilayah Asia Tenggara menjadikan Gowa berkembang sebagai pusat perdagangan yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai bangsa, seperti Melayu, Arab, Gujarat, Portugis, Inggris, dan Cina. Kemajuan tersebut didukung oleh kebijakan Kesultanan Gowa yang menerapkan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*), yaitu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap bangsa untuk berlayar, singgah, dan melakukan aktivitas perdagangan di wilayah Makassar tanpa tunduk pada monopoli satu kekuatan dagang tertentu. Prinsip ini menjadikan Makassar sebagai salah satu pusat perdagangan internasional yang terbuka dan berpengaruh di kawasan timur Nusantara.¹

Konsep *mare liberum* sendiri dipopulerkan oleh Hugo Grotius melalui karya *Mare Liberum* (1609), yang menegaskan bahwa laut merupakan milik bersama (*res communis*) sehingga tidak dapat dimonopoli oleh negara ataupun perusahaan dagang tertentu. Meskipun Kesultanan Gowa tidak secara langsung mengadopsi teori Grotius, praktik perdagangan maritim yang diterapkannya menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kebebasan berlayar tersebut.²

Di sisi lain, VOC yang didirikan pada tahun 1602 berupaya membangun dominasi perdagangan rempah-rempah di Nusantara melalui sistem monopoli. Bagi VOC, penguasaan jalur perdagangan dan pengendalian distribusi komoditas rempah-rempah merupakan langkah penting untuk menjaga keuntungan ekonomi

¹ Ichsan Azis and Muhammad Nur, "Islamisasi Di Kawasan Laut Sulawesi Pada Abad Ke-19," *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 5, no. 1 (2019): h. 317193.

² Muhammad Saiful Fahmi, Ilham Majid, and Ricardo Goncalves Klau, *Buku Ajar Hukum Laut* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 16-20.

perusahaan. Kebijakan monopoli tersebut mengharuskan wilayah-wilayah penghasil rempah hanya menjual hasil produksinya kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Sistem monopoli VOC tersebut bertentangan secara langsung dengan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*) yang dijalankan Kesultanan Gowa. Bagi Gowa, setiap pedagang berhak memasuki pelabuhan Makassar dan melakukan perdagangan tanpa dibatasi oleh hak monopoli suatu perusahaan dagang asing. Perbedaan prinsip inilah yang menjadi akar utama pertentangan antara Kesultanan Gowa dan VOC. Oleh karena itu, konflik antara Gowa dan VOC tidak semata-mata disebabkan oleh persaingan politik, tetapi juga oleh perbedaan mendasar mengenai sistem perdagangan dan penguasaan jalur maritim di kawasan timur Nusantara.³

Ketegangan antara kedua pihak semakin meningkat ketika VOC berusaha membatasi hubungan dagang Gowa dengan berbagai kerajaan dan pedagang asing yang berada di luar kendali mereka. Kesultanan Gowa menolak tuntutan tersebut karena dianggap mengancam kedaulatan maritim dan ekonomi Kesultanan Gowa karena membatasi hak kerajaan untuk menerapkan prinsip *mare liberum* yang selama ini menjadi dasar kebijakan pelayaran dan perdagangan Makassar. Penolakan ini kemudian mendorong VOC untuk melakukan berbagai langkah politik dan militer guna melemahkan posisi Gowa, termasuk membangun aliansi dengan kelompok-kelompok yang memiliki konflik politik dengan Kesultanan Gowa.⁴

Salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam konflik tersebut adalah Arung Palakka, bangsawan Bone yang memimpin perlawanan terhadap dominasi Gowa atas Kerajaan Bone. Konflik antara Gowa dan Bone telah berlangsung sebelum pecahnya Perang Makassar dan dipengaruhi oleh hubungan

³ Jopita Afnatasia Lumban Tungkup, "Kebijakan Ekspansi VOC Dari Perdagangan Rempah Hingga Kolonialisme," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): h. 8755-8760.

⁴ Rosmaida Sinaga Rosmaida, "Kebijakan Ekonomi VOC Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 04 (2025): h. 303-310.

politik yang tidak seimbang antara kedua kerajaan tersebut. Setelah mengalami kekalahan dan melarikan diri dari Sulawesi Selatan, Arung Palakka kemudian menjalin kerja sama dengan VOC. Bagi VOC, dukungan Arung Palakka menjadi keuntungan strategis karena ia memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Bugis dan memahami kondisi politik Sulawesi Selatan. Sebaliknya, bagi Arung Palakka, kerja sama dengan VOC dipandang sebagai peluang untuk membebaskan Bone dari dominasi Gowa.⁵

Persekutuan antara VOC dan Arung Palakka menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya Perang Makassar tahun 1666-1669. Dengan dukungan pasukan VOC yang dipimpin Cornelis Speelman serta kekuatan militer Bone yang dipimpin Arung Palakka, tekanan terhadap Kesultanan Gowa semakin besar. Konflik ini pada akhirnya tidak hanya mempertemukan Gowa dengan VOC sebagai kekuatan kolonial, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas hubungan politik antarkerajaan di Sulawesi Selatan. Dalam konteks tersebut, perlawanan Sultan Hasanuddin menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan upaya mempertahankan kedaulatan politik, ekonomi, dan maritim Kesultanan Gowa di tengah tekanan kolonial dan dinamika politik lokal yang sangat kompleks.⁶

Perjuangan Sultan Hasanuddin memiliki dasar teologis yang kuat. Dalam perspektif Islam, kezaliman (*ẓulm*) tidak hanya dimaknai sebagai tindakan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup perampasan hak, penindasan ekonomi, pembatasan kebebasan yang sah, serta tindakan yang merugikan kehidupan masyarakat secara tidak adil. Kebijakan monopoli perdagangan yang diterapkan VOC di kawasan timur Nusantara dipandang sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi karena membatasi hak kerajaan-kerajaan lokal untuk berdagang secara bebas, memaksa para pedagang mengikuti aturan yang ditentukan VOC, serta

⁵ Fitrah Anawagis, Syukur Syukur, and Ilham Dwi Makkelo, "Arus Balik Kekuasaan Di Sulawesi Selatan Abad Ke-17," *JAWI* 6, no. 2 (2023): h. 99-109.

⁶ Johan Setiawan, *Arung Palakka: Biografi Dan Perjua Ngannya Dari Tanah Bugis*. CV Jejak (Jejak Publisher, 2019), h. 22-23.

menghilangkan kedaulatan ekonomi Kesultanan Gowa atas wilayah perdagangannya. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya penerapan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*) yang selama ini memungkinkan seluruh bangsa melakukan aktivitas pelayaran dan perdagangan secara terbuka di Makassar.⁷

Oleh karena itu, penolakan Sultan Hasanuddin terhadap monopoli VOC bukan semata-mata persoalan politik dan ekonomi, melainkan juga dipahami sebagai upaya menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan melawan praktik kezaliman (*ẓulm*) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks tersebut, perlawanan terhadap VOC memperoleh legitimasi keagamaan sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak masyarakat dan kedaulatan Kesultanan Gowa dari intervensi kekuatan asing yang dianggap merugikan dan menindas. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah [2]: 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa peperangan hanya dilakukan terhadap pihak yang lebih dahulu melakukan agresi, sebagaimana dilakukan VOC terhadap Gowa. Dengan demikian, perjuangan Sultan Hasanuddin memiliki legitimasi spiritual dan ideologis sebagai bentuk pembelaan terhadap *Dār al-Islām* dari agresi kekuatan kolonial non-Muslim.⁹ Selain itu, strategi perlawanan Sultan Hasanuddin juga dikuatkan oleh sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

⁷ Rosmaida, “Kebijakan Ekonomi VOC Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Indonesia,” h. 303-310.

⁸ Al-Qur'an al-Karim, “QS Al-Baqarah” (2): 190.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah,” *Manhaj* 2 (2009): h. 165.

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda: “Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya (strategi dan kecerdikan).”¹⁰ (HR. al-Bukhārī, *Kitāb al-Jihād*, no. 3030; Muslim, *Kitāb al-Jihād*, no. 1739).

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi musuh, Islam mengajarkan pentingnya strategi, kecerdikan, dan taktik, bukan hanya kekuatan fisik. Prinsip inilah yang tercermin dalam tindakan Sultan Hasanuddin yang menggunakan diplomasi, aliansi, dan pertahanan strategis dalam melawan VOC.¹¹

Meski akhirnya Gowa mengalami kekalahan yang ditandai dengan Perjanjian Bongaya tahun 1667, perjuangan Sultan Hasanuddin tidak dapat dinilai semata dari hasil akhir. Kekalahan tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan sumber daya dan teknologi, serta politik adu domba (*divide et impera*) yang diterapkan VOC melalui kerja sama dengan Arung Palakka dari Bone.¹² Namun, semangat perlawanan dan nilai-nilai kepemimpinan Sultan Hasanuddin tetap menjadi simbol keberanian, kedaulatan, dan keteguhan dalam mempertahankan martabat bangsa.¹³

Meskipun pada akhirnya Kesultanan Gowa tidak berhasil mempertahankan seluruh wilayah dan kedaulatannya dari tekanan VOC, perjuangan Sultan Hasanuddin tetap menunjukkan kualitas kepemimpinan dan strategi yang matang. Kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan militer VOC yang lebih modern, tetapi juga oleh keberhasilan VOC membangun koalisi politik dengan Bone di bawah kepemimpinan Arung Palakka. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa Sultan Hasanuddin menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar peperangan terbuka, sehingga strategi kepemimpinan dan perlawanannya

¹⁰ Shahih al-Bukhari, “Innama Al-Harbu Khid‘Ah,” n.d.

¹¹ Coadmin, *Hadis Imam Bukhari No. 2805: Perang Itu Tipuan* (Laduni.ID, 2022).

¹² Andaya, “The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes),” h. 117.

¹³ Syafnidawaty Mattulada and Antonio Gramsci, *Sejarah, Masyarakat, Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Ujung Pandang)*, ed. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: Hasanuddin University Press, 1982), h. 154.

menjadi penting untuk dikaji.¹⁴

Dalam kondisi tersebut, Sultan Hasanuddin tetap menunjukkan kepemimpinan yang konsisten dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa melalui berbagai strategi perlawanan, mulai dari penguatan sistem pertahanan benteng, mobilisasi armada laut, pembangunan aliansi politik dengan kerajaan-kerajaan sekutu, hingga penolakan terhadap monopoli perdagangan VOC yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*).¹⁵ Oleh karena itu, penelitian mengenai kepemimpinan dan strategi perlawanan Sultan Hasanuddin menjadi penting untuk memahami bagaimana seorang pemimpin kerajaan maritim di Nusantara merespons ekspansi kolonial Eropa pada abad ke-17.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroiti aspek kronologi perang, kepemimpinan karismatik, dan dinamika politik lokal tanpa menelaah secara mendalam strategi menyeluruh yang diterapkan Sultan Hasanuddin. Sebagian penelitian memusatkan pembahasan pada detail pertempuran dan faktor kekalahan Gowa dalam konteks militer abad ke-17,¹⁶ sedangkan penelitian lain menekankan aspek perubahan sosial politik pasca-Perjanjian Bongaya yang membatasi kedaulatan Gowa serta membuka jalan bagi dominasi VOC di kawasan timur Indonesia.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dengan menganalisis kepemimpinan Sultan Hasanuddin beserta strategi perlawanannya terhadap VOC secara komprehensif, baik melalui aspek militer-politik, ekonomi-kedaulatan, maupun ideologis-teologis, sehingga mampu memberikan kontribusi baru bagi kajian Sejarah Peradaban Islam di Nusantara.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis

¹⁴ and Siti Maryam Pane Putri, Helmania, "Analisis Historis Tentang Perjuangan Sultan Hasanuddin Melawan VOC Di Sulawesi Selatan Tahun 1660-1669," 2025, h. 235-242.

¹⁵ K Khaeruddin, "Dinamika Politik Kerajaan-Kerajaan Lokal Di Sulawesi Selatan: Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV-XVII)," *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): h. 111-124.

¹⁶ Husni Firmansyah, *Perlawanan Sultan Hasanuddin Terhadap VOC 1660-1669 M* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2022), h. 88-90.

¹⁷ Adam, *Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 Dan 1824 Dalam Perubahan Sosial Politik Antara Kerajaan Gowa Dan Belanda (VOC)*, h. 73-75.

kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669). Kajian ini tidak hanya mengkaji kemampuan Sultan Hasanuddin sebagai pemimpin dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa, tetapi juga menganalisis strategi perlawanan yang diterapkannya melalui aspek militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan ideologis-teologis. Selain itu, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara kebijakan monopoli perdagangan VOC dengan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*) yang dipertahankan Kesultanan Gowa sebagai dasar kebijakan maritimnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Sejarah Peradaban Islam, khususnya mengenai kepemimpinan Islam, strategi perlawanan terhadap kolonialisme, serta interaksi antara nilai-nilai keislaman dan budaya lokal dalam mempertahankan kedaulatan politik dan maritim Kesultanan Gowa.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana profil dan latar kepemimpinan Sultan Hasanuddin sebagai tokoh sentral Kesultanan Gowa dalam konteks sejarah politik dan keislaman pada abad ke-17?
2. Bagaimana strategi perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669) ditinjau dari dimensi militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan teologis-ideologis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan profil dan latar kepemimpinan Sultan Hasanuddin sebagai

¹⁸ Putri, Helmania, "Analisis Historis Tentang Perjuangan Sultan Hasanuddin Melawan VOC Di Sulawesi Selatan Tahun 1660-1669," h. 235-242.

tokoh sentral Kesultanan Gowa dalam konteks sejarah politik dan keislaman pada abad ke-17.

2. Menganalisis strategi perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669) ditinjau dari dimensi militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan teologis-ideologis yang menjadi dasar perjuangannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, khususnya mengenai kepemimpinan Sultan Hasanuddin dan strategi perlawanannya terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669). Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah mengenai kepemimpinan kerajaan Islam di Nusantara, terutama dalam memahami bagaimana kebijakan politik, militer, ekonomi, dan nilai-nilai keislaman diimplementasikan dalam menghadapi ekspansi kolonial¹⁹ Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti yang mengkaji sejarah perjuangan tokoh-tokoh Islam lokal, kepemimpinan, maupun dinamika perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan kalangan akademisi, untuk meneladani nilai-nilai kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang berlandaskan keberanian, ketegasan, tanggung jawab, dan komitmen dalam mempertahankan kedaulatan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan, sebagaimana tercermin dalam upaya Sultan Hasanuddin membangun pertahanan, menjalin aliansi, mempertahankan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*), serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan budaya lokal sebagai landasan moral

¹⁹ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*, h. 150.

dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa.²⁰

E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul

1. Strategi Perlawanan

Strategi Perlawanan merupakan konsep kunci yang membentuk fokus utama penelitian ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "strategi" didefinisikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu, sedangkan "perlawanan" adalah perihal melawan atau penentangan. Dengan demikian, Strategi Perlawanan secara umum adalah seni perencanaan dan penggunaan sumber daya secara menyeluruh untuk melakukan penentangan terhadap kekuatan yang mendominasi.²¹

Dalam literatur klasik, Carl von Clausewitz mendefinisikan strategi sebagai seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang, di mana setiap keputusan politik harus berpadu dengan kalkulasi militer demi mencapai tujuan akhir perjuangan.²² Sedangkan menurut James C. Scott, perlawanan adalah bentuk tindakan politik yang sering kali tersembunyi (*everyday forms of resistance*), dilakukan oleh kelompok yang tertindas untuk menolak dominasi kekuasaan tanpa selalu mengandalkan kekerasan terbuka.²³

Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa strategi perlawanan tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga dimensi sosial, politik, dan ideologis. Dalam konteks gerakan antikolonial, strategi perlawanan tidak hanya bersifat militer (*hard power*), tetapi juga meliputi diplomasi, ekonomi, dan ideologi (*soft power*) untuk melawan hegemoni kolonial. Strategi ini mencerminkan

²⁰ H Santoso et al., "Pengembangan Pendidikan Tinggi Di Indonesia Melalui Ajaran Filosofi Sultan Hasanuddin Dan Kapitan Pattimura," *HUMANIKA* 29, no. 1 (2022): h. 60-61.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

²² Carl Clausewitz, *On War*, Terj. ed. Michael Howard and Peter Paret (Princeton: Princeton University Press, 1984), h. 177.

²³ James C Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven: Yale University Press, 1985), h. 29.

bagaimana kekuatan lokal memanfaatkan setiap peluang dan kelemahan musuh, bahkan setelah mengalami tekanan berat.

Perlawanan di Nusantara pada abad ke-17 dicirikan oleh keterbatasan teknologi militer, tetapi didukung oleh kuatnya mobilisasi masyarakat yang berlandaskan loyalitas kepada raja, ulama, serta nilai-nilai budaya dan keagamaan.²⁴ Dalam konteks Kesultanan Gowa, salah satu strategi utama Sultan Hasanuddin adalah mempertahankan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*), yaitu kebijakan yang memberikan hak kepada setiap bangsa untuk berlayar, singgah, dan melakukan aktivitas perdagangan di Makassar tanpa tunduk pada monopoli satu kekuatan dagang tertentu. Prinsip tersebut bertentangan secara langsung dengan kebijakan monopoli perdagangan VOC yang berupaya menguasai jalur pelayaran dan distribusi rempah-rempah di kawasan timur Nusantara. Oleh karena itu, penolakan terhadap monopoli VOC merupakan inti dari strategi ekonomi Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatan maritim dan ekonomi Kesultanan Gowa.²⁵

Dalam konteks penelitian Sejarah Peradaban Islam, Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin didefinisikan sebagai upaya multidimensi yang dilegitimasi secara teologis dan meliputi tiga dimensi utama yang menjadi fokus analisis penelitian ini:

- a. Dimensi Militer-Politik: Meliputi penggunaan kekuatan benteng (*kūta*), pengerahan armada laut, dan Diplomasi aliansi regional (seperti dengan Portugis dan kerajaan lain di Nusantara) untuk menyeimbangkan kekuatan VOC.
- b. Dimensi Ekonomi-Kedaulatan: Penolakan tegas terhadap monopoli VOC sebagai upaya mempertahankan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*)

²⁴ Jajat Burhanudin, *Ulama Dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta: NouraBooks, 2012), h. 66-68.

²⁵ Edward Lamberthus Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), h. 35.

yang menjadi dasar kebijakan maritim Kesultanan Gowa, sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam yang menjunjung keadilan, keterbukaan perdagangan, dan kedaulatan ekonomi kerajaan.

- c. Dimensi Teologis-Ideologis: Penggunaan konsep *jihad* atau *perang sabil* sebagai alat mobilisasi spiritual dan justifikasi hukum untuk melawan agresi kolonial (*kuffar*).²⁶

Ketiga dimensi tersebut menjelaskan mengapa rakyat Kesultanan Gowa tetap mempertahankan perlawanan meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dibandingkan VOC. Strategi yang diterapkan Sultan Hasanuddin tidak hanya bersifat reaktif terhadap agresi kolonial, tetapi juga proaktif dalam mempertahankan kedaulatan politik, prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*), serta nilai-nilai Islam dan budaya lokal sebagai landasan moral perjuangan (*jihad fī sabīlillāh*) dalam menghadapi dominasi kolonial.

2. Sultan Hasanuddin

Sultan Hasanuddin adalah Raja Gowa ke-16 yang memerintah mulai tahun 1653 hingga 1669. Nama asli beliau adalah I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape.²⁷ Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631 dan merupakan putra dari Sultan Malikussaid (Raja Gowa ke-15) dengan I Pabbola Daeng Nisakka. Sebagai anggota Keluarga Kerajaan Gowa, beliau tumbuh di lingkungan yang kaya akan tradisi militer dan intelektual Islam. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin telah memperlihatkan kecakapan sebagai seorang *Tome-Barani* (pemberani) dan mulai dilibatkan dalam urusan diplomasi kerajaan sejak usia muda, termasuk menjadi utusan perang.²⁸

²⁶ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*, h. 150-155.

²⁷ Mattulada, *Sejarah Masyarakat, Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1982), h. 154.

²⁸ Hani Putri Siti Mardiana Pane, "Analisis Historis Tentang Perjuangan Sultan Hasanuddin Melawan VOC Di Sulawesi Selatan Tahun 1660–1669," *MIND: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Budaya* 5, no. 2 (2025): h. 235-242.

Riwayat pendidikannya sangat kuat berbasis Islam. Beliau menerima pendidikan langsung dari ulama istana yang fokus pada ilmu al-Qur'an, Hadis, dan khususnya ilmu fikih yang berkaitan dengan pemerintahan (*fiqh siyashah*) dan hukum perang (*fiqh jihad*). Pendidikan ini membentuk keyakinan bahwa seorang pemimpin Islam memiliki kewajiban melindungi umat dari kezaliman, yang kemudian tercermin dalam penolakannya terhadap VOC.²⁹ Sultan Hasanuddin juga dikenal sebagai sosok yang gemar berdiskusi dengan pedagang dan tokoh asing yang berlabuh di Makassar, untuk mengasah kemampuan berpikir strategis dan politik internasionalnya.³⁰

Karakter Sultan Hasanuddin adalah perpaduan antara ketegasan militer dan kearifan seorang pemimpin agama. Keberaniannya dalam menolak VOC membuat beliau dijuluki *De Haantjes van Het Oosten* (Ayam Jantan dari Timur) oleh Belanda.³¹ Sistem kepemimpinannya meliputi dualitas kekuatan di mana beliau berperan ganda:

- a. Kepala Pemerintahan (Karaeng Bonto *Mangape*): Bertanggung jawab atas urusan politik, militer, dan kenegaraan.
- b. Pemegang Otoritas Keagamaan (*Sultan*): Bertanggung jawab atas urusan hukum syariat, fatwa perang (*jihad*), dan penegakan keadilan (*mu'amalah*).³²

Kemampuan (skill) yang dimilikinya sangat relevan dengan strategi perlawanan yang diterapkannya:

- a. Kemampuan Militer Strategis: Kecakapan dalam membangun dan mengorganisir pertahanan benteng Gowa (khususnya Benteng Somba

²⁹ Santoso et al., "Pengembangan Pendidikan Tinggi Di Indonesia Melalui Ajaran Filosofi Sultan Hasanuddin Dan Kapitan Pattimura," h. 60-69.

³⁰ Hamid and Rifal, *Perkembangan Makassar Menjadi Kota Pelabuhan Dunia Di Jalur Rempah Abad XVII*, h. 1-10.

³¹ C Pelras, "Patron-Client Ties among the Bugis and Makassarese of South Sulawesi," in *Authority and Enterprise* (Brill, 2000), h. 15-54.

³² M U Fitriyah, "Islamic Law and Custom in the Land of Bima: A Study in the History of the Government of the Bima Sultanate," *Journal of Islamic History and Manuscript* 4, no. 1 (2025): h. 15-42.

- Opu) serta koordinasi komandan laut seperti Karaeng Galesong.
- b. Kemampuan Diplomasi dan Linguistik: Beliau dikenal fasih dalam berbagai bahasa, memudahkan negosiasi langsung dengan utusan asing dan menciptakan aliansi yang kompleks melawan VOC.
 - c. Kemampuan Mobilisasi Ideologis: Kemampuan tertinggi adalah menggunakan otoritas Sultan-nya untuk memobilisasi rakyat Bugis-Makassar di bawah payung konsep perang sabil, menjadikan perlawanan sebagai tanggungjawab keagamaan bersama.³³
3. VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*)

VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602 atas mandat *Staten-Generaal* (Parlemen Belanda) dengan tujuan menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di wilayah Nusantara.³⁴ VOC bukan hanya berfungsi sebagai perusahaan dagang, tetapi juga memiliki kewenangan politik dan militer yang luas, seperti mencetak mata uang, membuat perjanjian dengan penguasa lokal, mendirikan benteng, membentuk angkatan perang, serta menguasai wilayah jajahan.³⁵

Kehadiran VOC di kawasan timur Nusantara membawa perubahan besar terhadap prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*) yang selama ini diterapkan oleh Kesultanan Gowa dalam mengelola aktivitas pelayaran dan perdagangan di Makassar. Prinsip tersebut memberikan kebebasan kepada berbagai bangsa untuk berlayar, singgah, dan melakukan perdagangan tanpa terikat pada monopoli satu kekuatan dagang tertentu. Sebaliknya, VOC berupaya menerapkan sistem monopoli dengan membatasi akses perdagangan

³³ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*, h. 165.

³⁴ Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, 4th ed. (Stanford: Stanford University Press, 2008), h. 72.

³⁵ Rudi Sinaga et al., "Masa Pemerintahan VOC Di Nusantara: Awal Kedatangan Hingga Penyebab Bubarnya VOC," *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): h. 389-390.

hanya kepada pihak yang berada di bawah kendalinya. Perbedaan prinsip inilah yang kemudian memicu ketegangan antara VOC dan Kesultanan Gowa serta menjadi salah satu penyebab utama terjadinya Perang Makassar (1666-1669).³⁶

4. Perang Makassar (1666-1669)

Perang Makassar merupakan konflik bersenjata besar yang terjadi antara Kesultanan Gowa di satu pihak dengan koalisi VOC dan Kerajaan Bone di bawah kepemimpinan Arung Palakka di pihak lain. Konflik ini dipandang sebagai salah satu perang terbesar di kawasan timur Nusantara pada abad ke-17 karena melibatkan pertempuran darat dan laut dalam skala luas serta mobilisasi kekuatan militer, armada, dan logistik yang besar dari kedua belah pihak.³⁷

Penyebab utama (*causa prima*) terjadinya perang adalah pertentangan prinsip dalam pengelolaan perdagangan dan jalur pelayaran di kawasan timur Nusantara. VOC berupaya menerapkan kebijakan monopoli perdagangan melalui sistem *verplichte leverantie* (penyerahan wajib hasil produksi kepada VOC) dan *extirpatie* (pemusnahan tanaman rempah di luar wilayah yang berada di bawah pengawasannya) untuk mengendalikan produksi dan distribusi rempah-rempah. Sebaliknya, Kesultanan Gowa tetap mempertahankan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*), yaitu kebijakan yang memberikan kebebasan kepada berbagai bangsa untuk berlayar, singgah, dan melakukan aktivitas perdagangan di Makassar tanpa tunduk pada monopoli satu kekuatan dagang tertentu. Prinsip tersebut dipandang selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam muamalah Islam karena memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pedagang untuk melakukan transaksi

³⁶ M T Nofirman, "Geografi Maritim Indonesia," *Dunia Penerbitan Buku*, 2026, h. 37-38.

³⁷ J Setiawan, *Arung Palakka: Biografi Dan Perjuangannya Dari Tanah Bugis* (Yogyakarta: CV Jejak Publisher, 2019), h. 22-23.

secara terbuka dan tidak diskriminatif.³⁸

Dampak perang berlangsung sangat luas. Dari aspek politik, kemenangan VOC melahirkan hegemoni kolonial di Sulawesi Selatan melalui Perjanjian Bongaya (1667) yang secara signifikan membatasi kedaulatan Kesultanan Gowa. Dari aspek sosial dan keagamaan, perang mendorong terjadinya migrasi sejumlah bangsawan, ulama, dan pengikut Kesultanan Gowa ke berbagai wilayah di Nusantara. Salah satu tokoh yang kemudian berperan penting ialah Syekh Yusuf al-Makassari, yang melalui jaringan keilmuan dan tarekatnya menyebarkan ajaran Islam sekaligus semangat perlawanan terhadap dominasi kolonial di berbagai daerah.³⁹

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan kajian terhadap karya-karya ilmiah terdahulu yang memiliki hubungan langsung dengan tema penelitian ini, baik dari segi objek, metode, maupun pendekatan analisisnya. Tinjauan ini penting untuk menghindari pengulangan penelitian yang serupa serta memperjelas posisi dan kontribusi penelitian ini dalam konteks studi sejarah Islam dan kolonialisme di Indonesia. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah:

1. “Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 dan 1824 dalam Perubahan Sosial Politik antara Kerajaan Gowa dan Belanda (VOC)” oleh Muh. Akbar Adam (2025) IAIN Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Bongaya 1667 berfungsi untuk mengatur kontrol sosial politik ketat dan dominasi ekonomi Belanda melalui hak monopoli, pembebasan *bea impor/ekspor*, dan penetapan mata uang resmi Belanda di Jumpandang. Sementara itu, perjanjian Bongaya

³⁸ E L Poelinggomang, “Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim,” *Kepustakaan Populer Gramedia*. Hal 35 (2002): 204-209.

³⁹ Putri, Helmania, “Analisis Historis Tentang Perjuangan Sultan Hasanuddin Melawan VOC Di Sulawesi Selatan Tahun 1660-1669,” h. 235-242.

1824 merefleksikan pergeseran menuju administrasi kolonial dengan fokus pada pengakuan kedaulatan Kerajaan Gowa di bawah pengawasan kolonial dan penataan wilayah. Secara keseluruhan, kedua perjanjian ini menunjukkan aspek dominasi Belanda yang berkelanjutan di segala bidang (sejarah, ekonomi, politik, dan budaya) terhadap Gowa.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Akbar Adam terletak pada dua aspek utama. Pertama, keduanya sama-sama menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan historis untuk mengkaji konflik antara Kerajaan Gowa dan VOC pada abad ke-17. Kedua, kajian mengenai Perjanjian Bongaya memberikan gambaran mengenai konteks politik yang melatarbelakangi kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya dalam menghadapi tekanan VOC.

Meskipun sama-sama menggunakan pendekatan historis, fokus kedua penelitian berbeda secara mendasar. Penelitian Muh. Akbar Adam lebih menitikberatkan pada analisis isi Perjanjian Bongaya beserta implikasi politik dan hukumnya setelah perang berakhir. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya terhadap VOC sebelum dan selama Perang Makassar berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan Sultan Hasanuddin sebagai aktor utama dalam membangun dan mengimplementasikan strategi menghadapi ekspansi kolonial.⁴⁰

2. “Perlawanan Sultan Hasanuddin Terhadap VOC 1660-1669 M” oleh Husni Firmansyah (2022) UIN Sunan Ampel Surabaya

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor utama perlawanan Sultan Hasanuddin adalah penolakan terhadap sistem monopoli yang merugikan Kerajaan Gowa dan upaya untuk menjaga harga diri (martabat) kerajaan serta

⁴⁰ Adam, *Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 Dan 1824 Dalam Perubahan Sosial Politik Antara Kerajaan Gowa Dan Belanda (VOC)*, h. 5-7.

raja. Bentuk perlawanan yang dianalisis mencakup pertempuran, penyerangan (seperti peristiwa De Walvis 1662 dan De Leeuwin), hingga ditandatanganinya Perjanjian Bongaya sebagai bentuk perjuangan. Adapun persamaan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Husni Firmansyah terletak pada tiga aspek utama. Pertama, keduanya sama-sama menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan metode sejarah yang sama yaitu (Heuristik, Kritik, Interpretasi, Historiografi) untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Kedua, fokus kasus utamanya juga sama, yaitu Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC dalam periode yang beririsan (1660-1669 M). Ketiga, keduanya sama-sama mengkaji faktor-faktor pendorong perlawanan, termasuk faktor ekonomi (monopoli) dan politik (martabat).

Meskipun memiliki persamaan, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian Husni Firmansyah lebih menitikberatkan pada faktor penyebab perlawanan, kronologi peperangan, serta kepemimpinan kharismatik Sultan Hasanuddin berdasarkan teori Max Weber. Sementara itu, penelitian ini menganalisis kepemimpinan Sultan Hasanuddin sebagai dasar pengambilan kebijakan sekaligus mengkaji strategi perlawanannya secara komprehensif melalui dimensi militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan teologis-ideologis.⁴¹

3. “Politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Tiga Kerajaan Tellumpoccoe Pada Abad XVII” oleh Puji Siswandi (2016) UIN Alauddin Makassar.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Islamisasi merupakan strategi politik dan agama Gowa-Tallo untuk membangun hegemoni dan kesatuan di Sulawesi Selatan, bahkan menggunakan jalan peperangan (*Musu' Asselengngeng* atau Perang Pengislaman) ketika seruan ditolak. Strategi ini berhasil menundukkan Soppeng dan Wajo, meskipun menghadapi tantangan

⁴¹ Firmansyah, *Perlawanan Sultan Hasanuddin Terhadap VOC 1660-1669 M*, h. 68-75.

berat dari Bone. Penelitian ini memberikan gambaran detail tentang bagaimana Islam menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik Gowa sebelum Perang Makassar. Adapun persamaan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Puji Siswandi terletak pada tiga aspek utama. Pertama, keduanya menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan studi kepustakaan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Kedua, keduanya meneliti objek sejarah dalam periode yang sama (Abad XVII) dan fokus pada Kerajaan Gowa-Tallo. Ketiga, penelitian Puji Siswandi menyediakan konteks historis dan ideologis yang sangat kuat mengenai peran Islam sebagai pilar politik di Kerajaan Gowa, yang menjadi dasar analisis dimensi Teologis-Ideologis (Jihad/Perang Sabil) dalam penelitian ini.

Meskipun kajian Puji Siswandi sangat mendukung landasan ideologis penelitian ini, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Puji Siswandi mengkaji politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo terhadap kerajaan-kerajaan Tellumpoccoe sebagai strategi perluasan pengaruh politik dan agama. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya terhadap VOC dalam Perang Makassar. Konteks Islamisasi yang dijelaskan Puji Siswandi digunakan sebagai landasan untuk memahami nilai-nilai yang memengaruhi kepemimpinan dan strategi perjuangan Sultan Hasanuddin.⁴²

4. “Kerajaan Wajo dalam Perang Makassar Tahun 1666-1669” oleh Risma (2022) Universitas Hasanuddin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerajaan Wajo, meskipun pada awalnya menghadapi tantangan internal, memilih untuk bersekutu dengan Kerajaan Gowa dalam menghadapi VOC. Wajo memberikan dukungan militer dan moral, menegaskan bahwa Perang Makassar bukanlah perang antarsuku

⁴² Puji Siswandi, “Politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Tiga Kerajaan Tellumpoccoe Pada Abad XVII” (UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 65-72.

melainkan perang melawan hegemoni asing yang didasarkan pada prinsip kebersamaan. Keterlibatan Wajo menegaskan strategi Kerajaan Gowa untuk memobilisasi kekuatan regional demi mempertahankan kedaulatan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Risma terletak pada tiga aspek utama. Pertama, keduanya sama-sama menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan studi kepustakaan untuk merekonstruksi peristiwa Perang Makassar (1666-1669 M). Kedua, keduanya sama-sama meneliti objek sejarah dalam periode waktu yang sama (1666-1669 M). Ketiga, kajian yang dilakukan Risma menyediakan data penting mengenai aliansi regional yang merupakan bagian krusial dari strategi Militer-Politik Sultan Hasanuddin yang akan dianalisis secara komprehensif dalam penelitian ini.

Meskipun kajian Risma sangat mendukung dimensi strategi militer dan politik penelitian ini, namun terdapat perbedaan yang bersifat esensial. Fokus Utama: Penelitian Risma berfokus pada peranan Kerajaan Wajo sebagai salah satu sekutu Gowa dalam Perang Makassar. Sebaliknya, penelitian ini menempatkan Sultan Hasanuddin sebagai tokoh utama dengan fokus pada kepemimpinannya dalam membangun aliansi serta merumuskan strategi perlawanan terhadap VOC. Dengan demikian, aliansi dengan Wajo dipahami sebagai salah satu bagian dari strategi yang dirancang oleh Sultan Hasanuddin.⁴³

5. “Peranan Kerajaan Gowa dalam Perniagaan Abad XVII” oleh Mualim Agung Wibawa (2011) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gowa memainkan peran sentral sebagai pelabuhan transit internasional yang menerapkan kebijakan perdagangan bebas, menolak keras monopoli VOC, dan memiliki jaringan perniagaan yang luas hingga ke Asia. Peran ini adalah sumber utama kekayaan

⁴³ Risma, “Kerajaan Wajo Dalam Perang Makassar Tahun 1666–1669” (Universitas Hasanuddin, 2022), h. 50-55.

dan kedaulatan Gowa, sekaligus menjadi akar konflik langsung dengan VOC. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mualim Agung Wibawa terletak pada tiga aspek utama. Pertama, keduanya sama-sama menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan studi kepustakaan untuk merekonstruksi peristiwa di Abad XVII. Kedua, keduanya sama-sama meneliti objek utama, yaitu Kerajaan Gowa sebagai aktor sentral. Ketiga, kajian yang dilakukan oleh Mualim Agung Wibawa menyediakan basis data dan analisis yang krusial untuk menganalisis dimensi Ekonomi-Kedaulatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi perlawanan Sultan Hasanuddin yang ingin penulis teliti.

Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Mualim Agung Wibawa sangat mendukung dimensi ekonomi penelitian ini, perbedaannya bersifat esensial. Fokus Utama: Penelitian Mualim Agung Wibawa berfokus pada peranan Kerajaan Gowa sebagai pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sementara itu, penelitian ini memanfaatkan kajian tersebut untuk menjelaskan bagaimana Sultan Hasanuddin mempertahankan prinsip *mare liberum* sebagai bagian dari strategi perlawanannya terhadap monopoli VOC. Oleh karena itu, aspek ekonomi dalam penelitian ini dianalisis sebagai bagian dari strategi kepemimpinan Sultan Hasanuddin, bukan semata-mata sebagai kajian perdagangan.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki relevansi tematik dan metodologis yang kuat dengan penelitian-penelitian terdahulu. Seluruh penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan historis dan fokus pada periode yang sama (abad ke-17), namun masing-masing menyoroti dimensi yang berbeda:

1. Muh. Akbar Adam (2025) mengkaji Perjanjian Bongaya sebagai instrumen perubahan politik dan hukum kolonial.
2. Husni Firmansyah (2022) menitikberatkan pada faktor penyebab dan

⁴⁴ Wibawa, *Peranan Kerajaan Gowa Dalam Perniagaan Abad XVII*, h. 70-75.

- kronologi perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC.
3. Puji Siswandi (2016) mengkaji politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo sebagai dasar pembentukan kekuasaan politik Islam.
 4. Risma (2022) membahas peranan Kerajaan Wajo sebagai sekutu Gowa dalam Perang Makassar.
 5. Mualim Agung Wibawa (2011) mengkaji peranan Kerajaan Gowa sebagai pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara.

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis mengenai kepemimpinan Sultan Hasanuddin dengan strategi perlawanannya terhadap VOC dalam satu kerangka analisis yang utuh. Sebagian penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kronologi perang, aspek perdagangan, politik Islamisasi, peran kerajaan sekutu, ataupun isi Perjanjian Bongaya. Sementara itu, penelitian ini mengkaji bagaimana karakter kepemimpinan Sultan Hasanuddin menjadi dasar dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi perlawanan yang mencakup dimensi militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan teologis-ideologis. Dengan demikian, nilai kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada sintesis antara kajian kepemimpinan dan strategi perlawanan Sultan Hasanuddin dalam perspektif Sejarah Peradaban Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengulang penelitian terdahulu, tetapi memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara kepemimpinan Sultan Hasanuddin dan strategi perlawanannya terhadap VOC. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Sejarah Peradaban Islam, khususnya mengenai kepemimpinan tokoh Islam lokal dalam menghadapi ekspansi kolonial pada abad ke-17.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
Muh. Akbar Adam	Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 dan 1824 dalam Perubahan Sosial Politik antara Kerajaan Gowa dan Belanda (VOC)	2025	Pertama, keduanya sama-sama menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan historis untuk mengkaji konflik antara Kerajaan Gowa dan VOC pada abad ke-17. Kedua, kajian mengenai Perjanjian Bongaya memberikan gambaran mengenai konteks politik yang melatarbelakangi kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi	Penelitian Muh. Akbar Adam lebih menitikberatkan pada analisis isi Perjanjian Bongaya beserta implikasi politik dan hukumnya setelah perang berakhir. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya terhadap VOC sebelum dan selama Perang Makassar berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan Sultan Hasanuddin sebagai aktor utama dalam membangun dan mengimplementasikan

			perlawanannya dalam menghadapi tekanan VOC.	strategi menghadapi ekspansi kolonial.
Husni Firmansyah	Perlawanan Sultan Hasanuddin Terhadap VOC 1660-1669 M	2022	Pertama, keduanya sama-sama menggunakan pendekatan historis (<i>historical approach</i>) dan metode sejarah yang sama yaitu (Heuristik, Kritik, Interpretasi, Historiografi) untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Kedua, fokus kasus utamanya juga sama, yaitu Perlawanan Sultan Hasanuddin	Penelitian Husni Firmansyah lebih menitikberatkan pada faktor penyebab perlawanan, kronologi peperangan, serta kepemimpinan kharismatik Sultan Hasanuddin berdasarkan teori Max Weber. Sementara itu, penelitian ini menganalisis kepemimpinan Sultan Hasanuddin sebagai dasar pengambilan kebijakan sekaligus mengkaji strategi perlawanannya secara komprehensif melalui dimensi militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan teologis-ideologis.

			terhadap VOC dalam periode yang beririsan (1660-1669 M). Ketiga, keduanya sama-sama mengkaji faktor-faktor pendorong perlawanan, termasuk faktor ekonomi (monopoli) dan politik (martabat).	
Puji Siswandi	Politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Tiga Kerajaan Tellumpoccoe Pada Abad XVII	2016	Pertama, keduanya menggunakan pendekatan historis (<i>historical approach</i>) dan studi kepustakaan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Kedua,	Penelitian Puji Siswandi mengkaji politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo terhadap kerajaan-kerajaan Tellumpoccoe sebagai strategi perluasan pengaruh politik dan agama. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada kepemimpinan

			keduanya meneliti objek sejarah dalam periode yang sama (Abad XVII) dan fokus pada Kerajaan Gowa-Tallo. Ketiga, penelitian Puji Siswandi menyediakan konteks historis dan ideologis yang sangat kuat mengenai peran Islam sebagai pilar politik di Kerajaan Gowa, yang menjadi dasar analisis dimensi Teologis-Ideologis (Jihad/Perang Sabil) dalam penelitian ini.	Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya terhadap VOC dalam Perang Makassar. Konteks Islamisasi yang dijelaskan Puji Siswandi digunakan sebagai landasan untuk memahami nilai-nilai yang memengaruhi kepemimpinan dan strategi perjuangan Sultan Hasanuddin.
Risma	Kerajaan	2022	Pertama,	Penelitian Risma

	Wajo dalam Perang Makassar Tahun 1666-1669		keduanya sama-sama menggunakan pendekatan historis (<i>historical approach</i>) dan studi kepustakaan untuk merekonstruksi peristiwa Perang Makassar (1666-1669 M). Kedua, keduanya sama-sama meneliti objek sejarah dalam periode waktu yang sama (1666-1669 M). Ketiga, kajian yang dilakukan Risma menyediakan data penting mengenai aliansi regional yang	berfokus pada peranan Kerajaan Wajo sebagai salah satu sekutu Gowa dalam Perang Makassar. Sebaliknya, penelitian ini menempatkan Sultan Hasanuddin sebagai tokoh utama dengan fokus pada kepemimpinannya dalam membangun aliansi serta merumuskan strategi perlawanan terhadap VOC. Dengan demikian, aliansi dengan Wajo dipahami sebagai salah satu bagian dari strategi yang dirancang oleh Sultan Hasanuddin.
--	--	--	---	--

			merupakan bagian krusial dari strategi Militer-Politik Sultan Hasanuddin yang akan dianalisis secara komprehensif dalam penelitian ini.	
Mualim Agung Wibawa	Peranan Kerajaan Gowa dalam Perniagaan Abad XVII	2011	Pertama, keduanya sama-sama menggunakan pendekatan historis (<i>historical approach</i>) dan studi kepustakaan untuk merekonstruksi peristiwa di Abad XVII. Kedua, keduanya sama-sama meneliti	Penelitian Mualim Agung Wibawa berfokus pada peranan Kerajaan Gowa sebagai pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sementara itu, penelitian ini memanfaatkan kajian tersebut untuk menjelaskan bagaimana Sultan Hasanuddin mempertahankan prinsip <i>mare liberum</i> sebagai bagian dari

			objek utama, yaitu Kerajaan Gowa sebagai aktor sentral. Ketiga, kajian yang dilakukan oleh Muallim Agung Wibawa menyediakan basis data dan analisis yang krusial untuk menganalisis dimensi Ekonomi-Kedaulatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi perlawanan Sultan Hasanuddin yang ingin penulis teliti.	strategi perlawanannya terhadap monopoli VOC. Oleh karena itu, aspek ekonomi dalam penelitian ini dianalisis sebagai bagian dari strategi kepemimpinan Sultan Hasanuddin, bukan semata-mata sebagai kajian perdagangan.
--	--	--	---	--

Tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan mendasar dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu sama-sama

menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan studi kepustakaan dalam mengkaji Kerajaan Gowa, Sultan Hasanuddin, serta Perang Makassar pada abad ke-17. Meskipun demikian, setiap penelitian memiliki fokus kajian yang berbeda. Husni Firmansyah (2022) lebih menitikberatkan pada faktor penyebab perlawanan dan kepemimpinan kharismatik Sultan Hasanuddin. Risma (2022) mengkaji peran Kerajaan Wajo sebagai sekutu Gowa dalam Perang Makassar. Muallim Agung Wibawa (2011) berfokus pada peranan Kerajaan Gowa sebagai pusat perdagangan maritim, sedangkan Puji Siswandi (2016) mengulas politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo sebagai landasan ideologis kekuasaan. Sementara itu, Muh. Akbar Adam (2025) lebih menitikberatkan pada Perjanjian Bongaya sebagai instrumen perubahan politik dan hukum kolonial.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada kepemimpinan Sultan Hasanuddin sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan serta strategi perlawanannya terhadap VOC selama Perang Makassar (1666-1669). Strategi tersebut dianalisis secara komprehensif melalui tiga dimensi utama, yaitu militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan teologis-ideologis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sintesis yang lebih utuh mengenai hubungan antara karakter kepemimpinan Sultan Hasanuddin dengan strategi yang diterapkannya dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa dari ekspansi VOC. Pendekatan tersebut menjadi nilai kebaruan (*novelty*) penelitian ini karena mengintegrasikan analisis kepemimpinan dan strategi perlawanan dalam satu kerangka kajian yang sistematis.

G. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pijakan analisis dalam penelitian. Teori berfungsi untuk membantu menafsirkan data serta menjelaskan fenomena sejarah secara sistematis dan ilmiah.⁴⁵ Dalam penelitian ini, landasan teori digunakan untuk menganalisis kepemimpinan Sultan

⁴⁵ Syafnidawaty, *Landasan Teori* (Banten: Universitas Raharja, 2020).

Hasanuddin serta strategi perlawanannya terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga teori utama sebagai pisau analisis, yaitu Teori Perlawanan (*Resistance Theory*), Teori Hegemoni (*Hegemony Theory*), dan Teori Strategi (*Strategic Theory*). Ketiga teori tersebut dipilih karena saling melengkapi dalam menjelaskan karakter kepemimpinan Sultan Hasanuddin, bentuk-bentuk strategi yang diterapkannya dalam menghadapi VOC, serta konteks kekuasaan kolonial yang melatarbelakangi munculnya perlawanan. Teori Perlawanan digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa. Teori Hegemoni digunakan untuk memahami strategi dominasi VOC melalui monopoli perdagangan dan politik *divide et impera* yang menjadi latar munculnya perlawanan. Sementara itu, Teori Strategi digunakan untuk menganalisis langkah-langkah militer, diplomasi, dan kebijakan Sultan Hasanuddin, termasuk penerapan nilai-nilai *tellu cappa* (*cappa lila*, *cappa tojona*, dan *cappa kawali*) sebagai bentuk kearifan lokal dalam menjalankan kepemimpinan dan strategi perjuangan.⁴⁶

1. Teori Perlawanan (*Resistance Theory*)

Teori Perlawanan dikembangkan oleh ahli antropologi politik James C. Scott melalui karyanya *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (1985). Scott menjelaskan bahwa perlawanan adalah bentuk respons terhadap dominasi kekuasaan yang tidak selalu diwujudkan melalui kekerasan terbuka, tetapi juga melalui bentuk-bentuk tersembunyi seperti penolakan, penyangkalan, dan tindakan simbolik yang menantang struktur hegemoni.⁴⁷

Dalam konteks penelitian ini, teori perlawanan digunakan untuk menafsirkan tindakan Sultan Hasanuddin sebagai upaya kolektif

⁴⁶ Sun Tzu, *The Art of War*, Terj. Lionel Giles (New York: Barnes & Noble, 2003), h. 15.

⁴⁷ Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, h.. 29.

mempertahankan kedaulatan politik dan ekonomi Kesultanan Gowa terhadap dominasi VOC. Perlawanan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui konfrontasi militer, tetapi juga melalui berbagai upaya diplomasi seperti perundingan dan perjanjian dengan VOC serta pembentukan hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan sekutu di Sulawesi Selatan. Selain itu, perlawanan tersebut memiliki dimensi ideologis yang tampak pada penggunaan nilai-nilai Islam dan budaya siri' na pacce sebagai dasar moral dalam mempertahankan kehormatan, kedaulatan, dan eksistensi Kesultanan Gowa dari intervensi kolonial.⁴⁸

Teori ini juga membantu menjelaskan bagaimana strategi Sultan Hasanuddin mencerminkan bentuk perlawanan aktif terhadap dominasi VOC, baik melalui diplomasi, penguatan pertahanan maritim, maupun penolakan terhadap monopoli perdagangan. Dengan demikian, teori perlawanan menjadi landasan konseptual untuk menganalisis kepemimpinan Sultan Hasanuddin dalam mengorganisasi perjuangan serta strategi perlawanannya dalam dimensi militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan teologis-ideologis.

2. Teori Hegemoni Kolonial (*Colonial Hegemony Theory*)

Teori Hegemoni dikemukakan oleh Antonio Gramsci dalam *Selections from the Prison Notebooks* (1971), yang menjelaskan bahwa dominasi kekuasaan kolonial dijalankan melalui dua mekanisme utama: paksaan (*coercion*) dan persetujuan (*consent*).⁴⁹ Melalui kombinasi keduanya, penguasa kolonial tidak hanya menundukkan wilayah secara militer, tetapi juga mengontrol pola pikir, budaya, dan sistem sosial masyarakat yang dikuasai.

Dalam konteks penelitian ini, teori hegemoni digunakan untuk

⁴⁸ Putri, Helmania, "Analisis Historis Tentang Perjuangan Sultan Hasanuddin Melawan VOC Di Sulawesi Selatan Tahun 1660-1669," h. 235-242.

⁴⁹ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, ed. Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971), h. 257-258.

menjelaskan bagaimana VOC membangun dominasinya di kawasan timur Nusantara melalui monopoli perdagangan, politik divide et impera, serta berbagai perjanjian yang membatasi kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal. Bentuk-bentuk dominasi tersebut menjadi tantangan utama yang dihadapi Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa.

Melalui teori hegemoni, penelitian ini menganalisis bahwa strategi perlawanan Sultan Hasanuddin merupakan bentuk *counter-hegemony*, yaitu upaya menentang dominasi ekonomi, politik, dan ideologi yang dibangun VOC. Dengan demikian, teori ini membantu menjelaskan hubungan antara pola kepemimpinan Sultan Hasanuddin dan strategi yang diterapkannya dalam menghadapi ekspansi kolonial Belanda.

3. Teori Strategi

Teori Strategi dikemukakan oleh Sun Tzu melalui karyanya *The Art of War*. Menurut Sun Tzu, keberhasilan suatu peperangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam membaca situasi, mengenali kekuatan dan kelemahan lawan, serta menyusun strategi yang tepat melalui diplomasi, aliansi, maupun taktik peperangan.⁵⁰ Dalam penelitian ini, teori strategi digunakan untuk menganalisis bagaimana Sultan Hasanuddin merancang dan menerapkan strategi perlawanan terhadap VOC melalui penguatan pertahanan, pembangunan aliansi politik, serta kebijakan ekonomi dan diplomasi.

Teori ini kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan yang dikenal dengan konsep “*tellu cappa*” (tiga ujung), yaitu *cappa lila* (ujung lidah), *cappa tojona* (ujung tombak), dan *cappa kawali* (ujung badik).⁵¹ Ketiga simbol ini melambangkan strategi integral dalam menghadapi musuh: *cappa lila* menggambarkan diplomasi dan

⁵⁰ Tzu, *The Art of War*, Terj. Lionel Giles, h. 15.

⁵¹ Mattulada and Gramsci, *Sejarah, Masyarakat, Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Ujung Pandang)*, h. 154.

kebijaksanaan berbicara, *cappa tojona* melambangkan kekuatan militer dan keberanian bertempur, sementara *cappa kawali* melambangkan keteguhan hati dan kehormatan dalam perjuangan. Nilai ini tampak jelas dalam strategi Sultan Hasanuddin, yang mengedepankan diplomasi, perlawanan bersenjata, dan keteguhan prinsip sebagai seorang pemimpin Islam dan pejuang bangsanya.

Ketiga teori tersebut digunakan secara terpadu untuk menganalisis kepemimpinan Sultan Hasanuddin dan strategi perlawanannya terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669). Teori Perlawanan menjelaskan bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan Sultan Hasanuddin, Teori Hegemoni memberikan pemahaman mengenai pola dominasi VOC yang melatarbelakangi munculnya perlawanan, sedangkan Teori Strategi digunakan untuk menganalisis langkah-langkah militer, diplomasi, dan kebijakan yang diterapkan Sultan Hasanuddin. Melalui ketiga teori tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa kepemimpinan Sultan Hasanuddin tidak hanya tercermin dalam keberaniannya menghadapi VOC, tetapi juga dalam kemampuannya merumuskan strategi yang mengintegrasikan aspek militer-politik, ekonomi-kedaulatan, serta teologis-ideologis demi mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah untuk mengungkap kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya terhadap VOC dalam Perang Makassar tahun 1666-1669. Metode penelitian sejarah merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyelidiki suatu peristiwa melalui perspektif historis. Gilbert J. Garraghan menjelaskan bahwa metode ini melibatkan serangkaian aturan dalam proses pengumpulan, penilaian kritis, dan penyusunan sintesis dari sumber-sumber sejarah. Sementara itu, Louis Gottschalk menekankan bahwa metode sejarah bertujuan memverifikasi kesaksian sejarah guna memperoleh data yang autentik dan menyusunnya menjadi narasi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah.⁵²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, manuskrip sejarah, dan arsip kolonial.⁵³ Jenis penelitian ini dipilih karena objek utama kajian adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau (abad ke-17), yaitu Perang Makassar (1666-1669), sehingga data primer maupun data sekunder hanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen, arsip, dan literatur tertulis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku-buku sejarah, jurnal ilmiah, skripsi, dan terutama, naskah historis dan arsip yang telah ditransliterasi maupun diterjemahkan.⁵⁴ Kajian pustaka ini merupakan jenis penelitian yang paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya dalam mempertahankan kedaulatan politik, ekonomi, dan maritim Kesultanan Gowa-Tallo dari ancaman monopoli VOC.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat didefinisikan sebagai cara atau perspektif yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola suatu permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan berfungsi sebagai kerangka berpikir yang menentukan bagaimana peneliti melihat dan menafsirkan objek penelitiannya.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan Pendekatan Historis dengan kerangka Deskriptif Kualitatif.

⁵² Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), h. 100.

⁵³ F Fikri, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun," 2023, h. 45.

⁵⁴ S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 145.

⁵⁵ Abdul Fattah Pakpahan, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 31.

Pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi, memahami, dan menganalisis peristiwa masa lalu secara kronologis dan tematik. Tujuannya adalah menafsirkan makna di balik peristiwa sejarah serta mengungkap dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang melatarbelakangi tindakan Sultan Hasanuddin dalam menghadapi VOC.

Pendekatan historis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya terhadap VOC berdasarkan berbagai tindakan dan kebijakan yang tercatat dalam sumber-sumber sejarah. Analisis kepemimpinan diarahkan pada karakter, kebijakan, dan kemampuan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa. Sementara itu, strategi perlawanan diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu dimensi militer-politik, dimensi ekonomi-kedaulatan, dan dimensi teologis-kultural. Klasifikasi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa perlawanan Sultan Hasanuddin tidak hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga melalui kebijakan ekonomi, diplomasi, serta pemanfaatan nilai-nilai keagamaan dan budaya sebagai landasan perjuangan.

- a. Dimensi Militer-Politik, yaitu strategi yang berkaitan dengan upaya mempertahankan eksistensi dan kedaulatan Kesultanan Gowa melalui penguatan sistem pertahanan benteng, mobilisasi pasukan darat dan armada laut, serta pembangunan hubungan politik dan aliansi dengan kerajaan-kerajaan sekutu seperti Tallo, Wajo, dan beberapa kekuatan regional lainnya dalam menghadapi ekspansi VOC.
- b. Dimensi Ekonomi-Kedaulatan, yaitu strategi yang berhubungan dengan upaya mempertahankan kemandirian ekonomi Kesultanan Gowa melalui penolakan terhadap kebijakan monopoli perdagangan VOC, perlindungan terhadap sistem kebebasan berlayar dan berdagang (*mare liberum*), serta mempertahankan posisi Makassar sebagai pusat perdagangan internasional di kawasan timur Nusantara.

- c. Dimensi Teologis-Kultural, yaitu strategi yang berkaitan dengan pemanfaatan nilai-nilai Islam dan budaya lokal sebagai sumber legitimasi moral perlawanan. Dimensi ini tercermin dalam penggunaan konsep jihad sebagai kewajiban mempertahankan wilayah dan masyarakat Muslim dari dominasi asing, serta penguatan nilai *siri' na pacce* yang menekankan kehormatan, harga diri, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif masyarakat Bugis-Makassar.⁵⁶

Pendekatan historis juga diarahkan untuk memahami bagaimana kepemimpinan Sultan Hasanuddin tercermin dalam setiap kebijakan dan strategi yang diterapkannya dalam menghadapi VOC. Sebagai seorang pemimpin, Sultan Hasanuddin mengombinasikan pendekatan politik, diplomasi, militer, dan nilai-nilai keagamaan dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa.⁵⁷ Pendekatan ganda ini menunjukkan bahwa Sultan Hasanuddin tidak hanya berperang secara fisik, tetapi juga berusaha membangun legitimasi politik dan religius bagi perjuangan Gowa melawan VOC.

Sementara itu, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan data historis melalui narasi yang komprehensif dengan menafsirkan setiap fakta sejarah berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder yang relevan. Sumber primer yang digunakan meliputi *Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallo*, *Lontara Patturioloang ri Tu Talloka*, *teks Perjanjian Bongaya Tahun 1667*, serta *arsip VOC seperti Dagregister van Cornelis Speelman dan Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII*. Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku-buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan karya akademik lainnya yang

⁵⁶ Andy Alfatih, *Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Palembang: Unsri Press, 2017), h. 9.

⁵⁷ Yani, *Sejarah Lokal Sulawesi Selatan: Menyusuri Eksistensi Kedatuan Sawitto Di Ajatappareng Abad XVI–XVII*, h. 175-176.

membahas Sultan Hasanuddin, Kesultanan Gowa, serta hubungan Gowa-VOC pada abad ke-17. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan peristiwa-peristiwa penting seperti Perang Makassar dan jatuhnya Benteng Somba Opu, tetapi juga menganalisis pola pikir strategis Sultan Hasanuddin dalam menghadapi tekanan politik, ekonomi, dan militer yang dilakukan VOC berdasarkan konteks historis zamannya.⁵⁸

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini tidak hanya berfungsi merekonstruksi fakta sejarah, tetapi juga menginterpretasikan kepemimpinan Sultan Hasanuddin beserta strategi perlawanannya sebagai representasi kepemimpinan Islam yang berlandaskan keberanian, diplomasi, dan komitmen mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa.

3. Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui kajian pustaka. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis data tersebut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber-sumber langsung yang berkaitan dengan peristiwa Perang Makassar (1666-1669) dan masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Meskipun penulis tidak meneliti naskah asli secara fisik, sumber-sumber ini tetap tergolong primer karena berasal dari dokumen dan catatan abad ke-17 yang telah diterbitkan dalam bentuk transliterasi dan edisi akademik resmi oleh lembaga arsip dan ahli sejarah. Sumber primer yang digunakan antara lain:

- 1) Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallo: Naskah lokal Makassar yang memuat kronik sejarah kerajaan dan catatan peristiwa politik, peperangan, serta silsilah raja. Edisi transliterasi dan terjemahan oleh Kamaruddin (Balai Bahasa Sulawesi Selatan, 2010) digunakan untuk

⁵⁸ Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," 118–19.

merekonstruksi konteks sosial-politik Kerajaan Gowa menjelang dan selama Perang Makassar.⁵⁹

- 2) Teks Perjanjian Bongaya (1667): Dokumen hasil kesepakatan antara Sultan Hasanuddin dan pihak VOC setelah kekalahan Gowa. Dokumen ini terdapat dalam *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum*, vol. III, terbitan Arsip Nasional Republik Indonesia (Jakarta, 1975), yang berisi teks asli dan terjemahan perjanjian VOC di Nusantara.⁶⁰
- 3) *Dagregister van Cornelis Speelman* (1666-1669): Catatan harian dan laporan resmi pimpinan ekspedisi VOC dalam perang melawan Gowa, diterbitkan dalam seri *Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII Verenigde Oostindische Compagnie* oleh Gerrit Knaap (1998). Dokumen ini menjadi sumber utama untuk melihat perspektif kolonial Belanda terhadap strategi militer Sultan Hasanuddin.⁶¹
- 4) *Lontara Patturioloang ri Tu Talloka* (Lontara Patturiolong Gowa): Lontarak ini merupakan naskah klasik yang merekam silsilah, peristiwa politik, serta strategi kepemimpinan Kerajaan Gowa-Tallo. Di dalamnya termuat kisah tentang keberanian Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatan Gowa dari ancaman VOC dengan semangat *siri' na pacce* dan tanggung jawab terhadap rakyatnya.⁶²

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari berbagai sumber yang menelaah atau menganalisis data primer. Sumber-sumber ini sangat penting untuk

⁵⁹ Kamaruddin, *Lontara Bilang Raja Gowa Dan Tallo* (Makassar: Balai Bahasa Sulawesi Selatan, 2010), h. 45-48.

⁶⁰ J.E.Heeres F. W. Stapel, *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum*, vol. III (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1975), h. 312-315.

⁶¹ Gerrit Knaap, *Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal En Raden Aan Heren XVII Der Verenigde Oostindische Compagnie*, vol. XI, Grote Serie (Geschiedkundige Publicatiën, 1998), h. 495-497.

⁶² dan Syarifuddin Kamaruddin, Muhammad Nur, "Lontara Patturioloang Ri Tu Talloka (Lontara Patturiolong Gowa), Naskah Koleksi Pribadi Makassar" (Makassar, 2019), h. 45-47.

memberikan konteks, analisis perbandingan, dan landasan teoretis. Data sekunder mencakup:

- 1) Buku dan Monografi Sejarah Regional: Karya-karya definitif oleh sejarawan seperti Leonard Y. Andaya (*The Heritage of Arung Palakka*), Anthony Reid (*Southeast Asia in the Age of Commerce*), dan sejarawan Indonesia yang fokus pada Sulawesi Selatan, Perang Makassar, dan Kerajaan Gowa-Tallo.
- 2) Jurnal Ilmiah dan Hasil Penelitian yang Tidak Dipublikasikan: Sumber ini mencakup berbagai kajian akademik yang membahas secara spesifik mengenai strategi militer dan diplomasi Sultan Hasanuddin, peranan kerajaan-kerajaan sekutu seperti Wajo dan Bone dalam Perang Makassar, serta studi tentang kebijakan perdagangan bebas Kerajaan Gowa abad ke-17. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan juga digunakan sebagai bahan komparatif untuk memperkuat keaslian dan relevansi penelitian ini terhadap studi-studi sebelumnya.⁶³
- 3) Sumber Teoretis: Buku-buku yang memuat teori-teori yang digunakan (Clausewitz, Gramsci, Scott, Mahan) sebagai dasar untuk analisis interpretasi.

c. Kriteria Pemilihan Data

Agar penelitian ini menghasilkan analisis yang valid dan objektif, pemilihan data dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

- 1) Relevansi: Memastikan bahwa data yang berkaitan dengan kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya terhadap VOC pada periode 1666-1669, khususnya dalam dimensi militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan teologis-kultural.
- 2) Kredibilitas: Mengutamakan sumber-sumber primer dari arsip sejarah yang telah diakui (misalnya arsip VOC dan *Lontara*') serta referensi

⁶³ Wibawa, *Peranan Kerajaan Gowa Dalam Perniagaan Abad XVII*, h. 70-75.

sekunder yang berasal dari penerbit dan jurnal akademik yang terpercaya.

- 3) Keberagaman Perspektif: Mengombinasikan sumber dari sudut pandang VOC (pihak dominan) dan sumber Gowa-Tallo (pihak yang melawan) untuk memberikan analisis yang lebih seimbang dan menyeluruh mengenai peristiwa tersebut.

d. Bentuk Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan hadir dalam beberapa bentuk, antara lain:

- 1) Teksual: Seperti transkripsi perjanjian, kutipan dari buku dan jurnal, serta terjemahan naskah sejarah *Lontara'* dalam bahasa Indonesia.
- 2) Visual: Meliputi peta wilayah Kesultanan Gowa, peta jalur perdagangan, dan ilustrasi pertempuran di sekitar Benteng Somba Opu.
- 3) Kuantitatif (Terbatas): Misalnya data mengenai jumlah armada laut Gowa dan VOC yang terlibat dalam pertempuran atau kerugian finansial yang dicatat oleh VOC.

e. Keterbatasan Data

Dalam proses penelitian ini, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1) Bahasa Asing: Sebagian dokumen primer ditulis dalam bahasa Bugis/Makassar Kuno atau Belanda Kuno (Dutch Ottoman), sehingga penelitian ini sangat bergantung pada terjemahan yang sudah diverifikasi keakuratannya.
- 2) Ketersediaan dan Bias Sumber: Beberapa dokumen Gowa yang asli mungkin telah hilang atau mengalami kerusakan pasca-perang, sehingga analisis lebih banyak bertumpu pada sumber sekunder yang mungkin memiliki bias dari sudut pandang pemenang (VOC atau Bone).

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Sejarah (*Historical Method*) yang mencakup empat tahap utama: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.⁶⁴

a. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik merupakan tahap awal dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk menemukan, menelusuri, dan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Tahap ini menjadi pondasi utama karena kualitas analisis sejarah bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh. Dalam konteks penelitian kepustakaan, heuristik dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis, baik berupa dokumen primer maupun sekunder, melalui perpustakaan, arsip digital, dan koleksi pribadi yang berkaitan langsung dengan objek kajian.⁶⁵

Pada penelitian ini, tahap heuristik dilakukan untuk menemukan dan mengklasifikasi data yang mendukung pembahasan mengenai kepemimpinan Sultan Hasanuddin dan strategi perlawanannya terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669). Proses ini mencakup upaya sistematis dalam menelusuri naskah-naskah sejarah lokal, dokumen kolonial, dan referensi akademik yang memuat informasi tentang konteks politik, ekonomi, dan keagamaan Kesultanan Gowa. Heuristik juga digunakan untuk membedakan antara sumber yang bersifat autentik dengan sumber yang bersifat interpretatif, sehingga data yang dipilih benar-benar valid untuk digunakan dalam tahap kritik sumber dan interpretasi selanjutnya.⁶⁶ Dalam penelitian ini, heuristik dilakukan dengan cara:

1) Mempelajari Arsip dan Dokumen Sejarah: Peneliti menelusuri dan

⁶⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995), h. 102.

⁶⁵ Kuntowijoyo, h. 102.

⁶⁶ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, h. 100.

mengumpulkan naskah asli maupun terjemahan dari *Perjanjian Bongaya*, arsip resmi VOC yang memuat kebijakan monopoli perdagangan dan catatan strategi militer, serta dokumen yang menggambarkan pertempuran di Benteng Somba Opu dan situasi politik Gowa menjelang perang.⁶⁷

- 2) Mengkaji Literatur Teoretis dan Historis: Peneliti mempelajari berbagai buku referensi, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian, seperti kajian tentang Perang Makassar, teori perlawanan, strategi geopolitik maritim, serta studi Sejarah Peradaban Islam yang membahas aspek ideologis perlawanan Sultan Hasanuddin.⁶⁸

Melalui tahap heuristik ini, data yang diperoleh tidak hanya dikumpulkan tetapi juga diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap analisis kepemimpinan Sultan Hasanuddin dan strategi perlawanannya dalam dimensi militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan teologis-kultural. Proses ini menjadi dasar dalam penyusunan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis pada bab-bab berikutnya.⁶⁹

b. Kritik Sumber (Verifikasi Data)

Kritik sumber merupakan tahap penting dalam metode penelitian sejarah yang bertujuan untuk menilai keaslian, keabsahan, dan kredibilitas sumber yang digunakan dalam penelitian. Tahapan ini dilakukan agar informasi yang digunakan dalam penulisan sejarah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Dudung Abdurrahman, kritik sumber adalah proses penyaringan dan pengujian terhadap sumber-sumber sejarah, baik dari segi bentuk (eksternal) maupun isinya (internal),

⁶⁷ Kamaruddin, Muhammad Nur, "Lontara Patturioloang Ri Tu Talloka (Lontara Patturiolong Gowa), Naskah Koleksi Pribadi Makassar."

⁶⁸ Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, h. 29.

⁶⁹ Imas Emalia, *Historiografi Indonesia* (Jakarta: Kerjasama Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2006), h. 6.

agar diperoleh data yang benar dan dapat dipercaya.⁷⁰ Kritik sumber dilakukan untuk menghindari kesalahan interpretasi serta memastikan bahwa fakta sejarah yang digunakan memiliki dasar yang kuat dan otentik.

Dalam penelitian ini yang berjudul “*Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669)*”, kritik sumber dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh bahan pustaka dan arsip sejarah yang digunakan, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi *Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallo*, yang berisi catatan genealogis dan kronik politik Kesultanan Gowa-Tallo, *Lontara Patturioloang ri Tu Talloka* (Lontara Patturiolong Gowa), yang mendeskripsikan tradisi kepemimpinan dan nilai *siri’ na pacce* Sultan Hasanuddin, Teks Perjanjian Bongaya 1667, sebagai dokumen hukum hasil perjanjian antara Gowa dan VOC, serta *Dagregister van Cornelis Speelman* (1666-1669), yang merupakan catatan harian pejabat VOC mengenai jalannya perang dan strategi militer yang diterapkan.

Adapun sumber sekunder mencakup berbagai karya akademik yang memberikan interpretasi mendalam terhadap konteks sejarah, politik, dan ideologi pada masa itu. Di antaranya ialah karya Leonard Y. Andaya (*The Heritage of Arung Palakka*), Anthony Reid (*Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680*), M.C. Ricklefs (*A History of Modern Indonesia Since c. 1200*), Ahmad Yani (Sejarah Lokal Sulawesi Selatan), Hasnani Siri (Sejarah Pergerakan Nasional), serta Azyumardi Azra (Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII). Selain itu, kritik juga dilakukan terhadap hasil penelitian akademik seperti karya Husni Firmansyah tentang perlawanan Sultan Hasanuddin, Muh. Akbar Adam mengenai relevansi Perjanjian Bongaya, Puji Siswandi

⁷⁰ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, h. 102.

tentang politik Islamisasi Gowa-Tallo, Mualim Agung Wibawa tentang perniagaan Gowa abad XVII, dan Risma tentang peran Kerajaan Wajo dalam Perang Makassar.

Kritik sumber terhadap seluruh bahan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dokumen, naskah, dan hasil penelitian yang digunakan memiliki tingkat keaslian (*autentisitas*), kredibilitas (*validitas ilmiah*), serta relevansi historis yang sesuai dengan konteks penelitian ini. Melalui proses kritik sumber ini, seluruh data primer dan sekunder diverifikasi secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar ilmiah dalam rekonstruksi strategi perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC. Tahap ini dibagi menjadi dua pendekatan:

1) Kritik Ekstern (Keaslian)

Kritik eksternal bertujuan untuk menguji apakah dokumen atau sumber yang digunakan benar-benar autentik, sesuai dengan waktu dan konteks sejarah yang diteliti. Dalam penelitian ini, kritik eksternal dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Asal Usul dan Identitas Sumber: Langkah ini bertujuan untuk menelusuri latar belakang sumber seperti nama penulis, tahun penerbitan, dan institusi yang menerbitkannya. Misalnya, *Dagregister van Cornelis Speelman (1666-1669)* diketahui merupakan arsip resmi VOC yang diterbitkan oleh *Rijksarchief Den Haag* (1960) dan memiliki otoritas tinggi sebagai catatan kolonial resmi. Demikian pula, *Lontarak Bilang Raja-Raja Gowa dan Talloq* diterbitkan oleh Balai Bahasa Sulawesi Selatan (2010) sebagai hasil transliterasi dari lontara asli abad XVII yang berasal dari Kerajaan Gowa-Tallo.⁷¹

b) Analisis Edisi dan Publikasi Akademik: Tahap ini dilakukan

⁷¹ Farid, *Lontara Bilang Raja-Raja Gowa Dan Talloq*, h. 12.

untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan merupakan edisi akademik resmi atau hasil transliterasi ilmiah, bukan versi populer yang diragukan akurasinya. Misalnya, teks *Perjanjian Bongaya (1667)* digunakan dari edisi resmi *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum, Vol. III* (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1975) yang berisi teks asli dan terjemahan dalam bahasa Belanda dan Melayu.⁷²

- c) Analisis Konteks Penyusunan Sumber: Peneliti menilai latar belakang pembuatan sumber: siapa yang menulis, untuk tujuan apa, dan dalam kondisi sosial politik seperti apa sumber itu dibuat. Sebagai contoh, *Lontara Patturioloang ri Tu Talloka* disusun oleh Kamaruddin dkk. sebagai hasil penyalinan naskah klasik lokal yang berisi kisah kepemimpinan, strategi, serta nilai-nilai budaya Gowa. Sementara arsip VOC seperti *Dagregister Speelman* dibuat sebagai laporan kolonial, sehingga cenderung memiliki sudut pandang Euro-sentris.⁷³
- d) Penilaian Keutuhan dan Keaslian Dokumen: Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya perubahan, penghilangan, atau penyensoran terhadap dokumen. Misalnya, *Corpus Diplomaticum* diverifikasi keasliannya oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, sehingga dianggap sah sebagai dokumen perjanjian internasional antara Gowa dan VOC.

Dengan demikian, seluruh sumber yang digunakan dinyatakan autentik dan dapat dijadikan dasar analisis ilmiah karena telah melalui proses verifikasi eksternal yang ketat.

2) Kritik Intern (Reliabilitas)

⁷² F. W. Stapel, *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum*, III: h. 89.

⁷³ Kamaruddin, Muhammad Nur, "Lontara Patturioloang Ri Tu Talloka (Lontara Patturiolong Gowa), Naskah Koleksi Pribadi Makassar," h. 25.

Kritik internal berfungsi untuk menilai isi dari sumber sejarah, apakah dapat dipercaya, bebas dari bias, dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menganalisis isi sumber secara kritis untuk menghindari kesalahan interpretasi. Adapun langkah-langkah kritik internal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Penilaian Konteks Historis: Setiap informasi dalam sumber disesuaikan dengan konteks sejarah abad ke-17. Misalnya, *Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallo* menggambarkan Sultan Hasanuddin sebagai sosok pemberani dan berdaulat, sedangkan *Dagregister Speelman* menggambarkan sebagai lawan kolonial yang keras kepala. Perbedaan persepsi ini menjadi bahan perbandingan yang memperkaya analisis.⁷⁴
- b) Deteksi Bias Penulis: Setiap sumber memiliki kecenderungan subjektif sesuai dengan latar belakang penulisnya. Sumber kolonial VOC umumnya menonjolkan supremasi militer Belanda, sedangkan naskah lokal lebih menekankan nilai keagamaan dan moral perjuangan *siri' na pacce*. Peneliti menyeimbangkan kedua perspektif agar analisis tetap objektif.
- c) Verifikasi Fakta dan Konsistensi Isi: Tahapan ini dilakukan dengan membandingkan data antar-sumber untuk melihat konsistensi informasi. Misalnya, catatan tentang jatuhnya Benteng Somba Opu dalam *Dagregister Speelman* dibandingkan dengan uraian Anthony Reid dalam *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680* untuk menguji kebenarannya.⁷⁵
- d) Kesesuaian dengan Tujuan Penelitian: Hanya sumber yang relevan dengan rumusan masalah yang dipakai, yaitu mengenai

⁷⁴ Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, 72.

⁷⁵ Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680* (New Haven: Yale University Press, 1993), 214.

strategi perlawanan, aspek ideologis, dan dampak kekalahan Kesultanan Gowa. Misalnya, *Lontara Patturioloang* digunakan untuk memperkuat dimensi ideologis, sedangkan *Corpus Diplomaticum* menjadi rujukan untuk dimensi politik dan hukum.

- e) Analisis Komparatif dan Kontekstualisasi Data: Tahapan akhir dari kritik internal dilakukan dengan membandingkan isi berbagai sumber (lokal dan kolonial) untuk memahami peristiwa secara holistik. Sumber-sumber kolonial dilihat sebagai dokumen administratif, sementara sumber lokal sebagai refleksi nilai-nilai budaya dan keagamaan.

Berikut adalah langkah-langkah praktis yang diterapkan dalam penelitian ini untuk memastikan validitas dan kredibilitas setiap sumber yang diterapkan dalam penelitian ini:

- a) Pengelompokan Sumber: Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.
- Sumber primer terdiri atas naskah *Lontara Patturioloang ri Tu Talloka* (*Lontara Patturiolong Gowa*) karya Kamaruddin dkk., *Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallo* (Kamaruddin), *Teks Perjanjian Bongaya 1667*, dan *Dagregister van Cornelis Speelman (1666-1669)*. Keempat sumber ini digunakan karena berasal dari abad ke-17 dan memberikan keterangan langsung mengenai peristiwa Perang Makassar serta strategi Sultan Hasanuddin dalam menghadapi VOC.
 - Sumber sekunder meliputi buku sejarah, monografi, hasil penelitian yang tidak dipublikasikan, dan jurnal ilmiah seperti karya Leonard Y. Andaya, M.C. Ricklefs, Anthony Reid, Husni Firmansyah, dan Muh. Akbar Adam yang memberikan analisis teoritis dan interpretatif terhadap konteks politik,

sosial, dan ekonomi Gowa-Tallo.

Pengelompokan ini membantu peneliti dalam menentukan metode kritik yang sesuai dengan karakter masing-masing sumber.⁷⁶

- b) Evaluasi Kredibilitas Penulis: Langkah kedua yaitu menilai kredibilitas dan latar belakang penulis atau penyusun sumber. Dalam hal ini, karya Leonard Y. Andaya, Anthony Reid, dan M.C. Ricklefs dianggap memiliki otoritas ilmiah tinggi karena mereka merupakan sejarawan yang telah lama meneliti kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, karya Kamaruddin dkk. pada *Lontara Patturioloang ri Tu Talloka* dinilai kredibel sebagai representasi narasi lokal karena berasal dari tradisi penulisan sejarah masyarakat Gowa sendiri. Sedangkan sumber kolonial seperti *Dagregister van Cornelis Speelman* tetap dikritisi secara objektif karena cenderung menonjolkan sudut pandang VOC sebagai pihak pemenang perang. Oleh karena itu, setiap informasi dari sumber kolonial selalu dibandingkan dengan sumber lokal (Lontarak) agar memperoleh keseimbangan perspektif.⁷⁷
- c) Perbandingan Antar-Sumber: Setelah pengelompokan dan penilaian kredibilitas dilakukan, langkah berikutnya adalah membandingkan data antar-sumber.
 - o Perbandingan dilakukan antara sumber lokal dan kolonial, misalnya antara *Lontara Patturioloang ri Tu Talloka* dengan *Dagregister van Cornelis Speelman*, untuk melihat kesesuaian kronologi dan strategi perang yang dilakukan Sultan Hasanuddin.
 - o Data dalam karya *The Heritage of Arung Palakka* (Andaya,

⁷⁶ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, h. 100.

⁷⁷ Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," h. 35.

1981) dibandingkan dengan *Sejarah Lokal Sulawesi Selatan* (Ahmad Yani, 2022) untuk mengidentifikasi bias politik dan pengaruh Arung Palakka terhadap kekalahan Gowa.

- Peneliti juga membandingkan hasil penelitian Husni Firmansyah, Muh. Akbar Adam, Puji Siswandi, Risma, dan Mualim Agung Wibawa untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya terhadap VOC dari berbagai perspektif historiografi.

Perbandingan ini memastikan setiap informasi yang digunakan dalam penelitian bersifat valid dan tidak sepihak.⁷⁸

- a) Kontekstualisasi Sumber: Kontekstualisasi dilakukan dengan menempatkan setiap sumber dalam ruang dan waktu sejarahnya.
 - Sumber Lontarak dipahami dalam konteks budaya dan nilai-nilai lokal Bugis-Makassar, khususnya semangat *siri' na pacce* yang menjiwai perjuangan rakyat Gowa.
 - Sementara itu, arsip VOC seperti *Dagregister van Cornelis Speelman* dikaji dalam konteks kolonialisme abad ke-17 yang sarat kepentingan ekonomi dan kekuasaan.
 - Sumber akademik modern seperti karya M.C. Ricklefs dan Anthony Reid dikaji dalam konteks historiografi kolonial dan postkolonial untuk melihat konstruksi sejarah yang dibentuk oleh para sejarawan modern.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bahwa perlawanan Sultan Hasanuddin tidak hanya bersifat militer tetapi juga ideologis, spiritual, dan politis dalam menghadapi hegemoni

⁷⁸ Yani, *Sejarah Lokal Sulawesi Selatan: Menyusuri Eksistensi Kedatuan Sawitto Di Ajatappareng Abad XVI–XVII*, h. 175.

kolonial.⁷⁹

a) Pemanfaatan Alat Bantu: Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan berbagai alat bantu akademik dan digital untuk memperkuat validitas data, antara lain.

- Database Ilmiah: menggunakan *Google Scholar*, *Garuda Ristek*, dan *JSTOR* untuk memperoleh jurnal dan buku yang kredibel serta relevan dengan topik penelitian.
- Perangkat Sitasi: seperti *Mendeley* dan *Zotero* untuk menjaga konsistensi sitasi sesuai gaya pedoman KTI IAIN Parepare.
- Digitalisasi Arsip VOC: mengakses koleksi daring *Nationaal Archief Den Haag* untuk memverifikasi naskah-naskah kolonial Belanda.
- Analisis Linguistik: menggunakan transliterasi akademik dalam membaca Lontarak agar interpretasi teks tidak menyimpang dari makna aslinya.

Penggunaan alat bantu ini sangat membantu dalam meminimalkan kesalahan interpretasi serta meningkatkan objektivitas analisis historis.⁸⁰

Tabel 1.2 Hasil Kritik Sumber

No.	Judul Sumber	Kritik Ekstern (Keaslian)	Kritik Intern (Kredibilitas)	Relevansi dengan Penelitian
1.	<i>Lontarak Patturioloa nga ri Tu</i>	Naskah klasik dari tradisi Gowa-Tallo abad	Memuat informasi mengenai	Relevan dengan Bab II dan Bab III,

⁷⁹ Heather Sutherland, *Historical Imagination and Cultural Context in South Sulawesi* (Leiden: KITLV Press, 2011), h. 28-29.

⁸⁰ Barbara Watson Andaya Leonard Y. Andaya, *A History of Early Modern Southeast Asia 1400–1830* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), h. 189.

	<i>Talloka (Lontarak Patturiolong Gowa) Kamaruddin dkk.</i>	ke-17 yang telah ditransliterasi dan diterbitkan secara akademik. Keasliannya dijamin melalui proses transliterasi oleh ahli bahasa dan sejarah Bugis-Makassar.	kepemimpinan Sultan Hasanuddin, strategi perlawanan, serta nilai siri'na pacce sebagai landasan moral perjuangan. Meskipun mengandung sudut pandang lokal yang bersifat subjektif, sumber ini memiliki nilai historis tinggi dalam merepresentasikan perspektif masyarakat Gowa.	karena menjelaskan karakter kepemimpinan Sultan Hasanuddin sekaligus strategi perlawanan dan nilai-nilai yang mendasari perjuangannya melawan VOC.
2.	<i>Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallo – Kamaruddin (2010)</i>	Edisi transliterasi resmi terbitan Balai Bahasa Sulawesi Selatan. Naskah asli berasal dari abad ke-17, telah diverifikasi oleh pakar sejarah Bugis-Makassar.	Berisi kronik pemerintahan, silsilah raja, dan perkembangan politik Kesultanan Gowa-Tallo. Walaupun masih terdapat unsur tradisi lokal, isi utamanya dapat dipertanggungjawabkan secara	Relevan dengan Bab II, karena memberikan gambaran mengenai kepemimpinan Sultan Hasanuddin, struktur pemerintahan, kondisi sosial-politik, serta

			historis.	perkembangan Kesultanan Gowa-Tallo sebelum Perang Makassar.
3.	<i>Teks Perjanjian Bongaya (1667) Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum</i> , Arsip Nasional RI (1975)	Dokumen diplomatik resmi antara VOC dan Kesultanan Gowa yang berasal dari arsip kolonial Belanda dan telah diterbitkan secara akademik oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.	Memuat isi perjanjian yang mengakhiri sebagian besar perlawanan Gowa. Walaupun disusun dari perspektif kolonial, dokumen ini memiliki kekuatan hukum dan nilai historis tinggi sebagai sumber primer.	Relevan dengan Bab III, khususnya dalam menganalisis strategi perlawanan Sultan Hasanuddin serta konsekuensi strategis yang muncul setelah penandatanganan Perjanjian Bongaya.
4.	<i>Dagregister van Cornelis Speelman (1666–1669)</i> – Rijksarchief Den Haag (1960)	Catatan resmi pimpinan VOC di Makassar. Arsip autentik Belanda, tersimpan dalam <i>Nationaal Archief</i> .	Berisi laporan mengenai jalannya perang, strategi militer VOC, dan kondisi politik di Makassar. Meskipun sarat dengan perspektif kolonial, data yang disajikan penting untuk dibandingkan	Relevan dengan Bab III, terutama untuk menganalisis strategi perlawanan Sultan Hasanuddin melalui perbandingan antara perspektif VOC dan

			dengan sumber lokal.	sumber-sumber lokal.
5.	Leonard Y. Andaya, <i>The Heritage of Arung Palakka</i> (1981)	Buku akademik diterbitkan oleh KITLV Leiden, sangat kredibel di bidang sejarah Sulawesi Selatan abad ke-17.	Menyajikan analisis mendalam mengenai hubungan Gowa, Bone, dan VOC dengan pendekatan historiografi modern yang didukung sumber primer dan sekunder.	Relevan dengan Bab II, khususnya dalam pembahasan mengenai kepemimpinan Sultan Hasanuddin, dinamika politik Sulawesi Selatan, serta hubungan Gowa dengan Bone dan VOC.
6.	M.C. Ricklefs, <i>A History of Modern Indonesia Since c. 1200</i> (2008)	Buku akademik yang diterbitkan Stanford University Press dan menjadi salah satu referensi utama dalam historiografi Indonesia.	Menyajikan kronologi dan konteks nasional Indonesia abad ke-17.	Relevan dengan Bab II, sebagai landasan untuk menjelaskan konteks sejarah Indonesia dan posisi Kesultanan Gowa dalam perkembangan politik Nusantara.
7.	Anthony Reid, <i>Southeast</i>	Diterbitkan oleh Yale University Press, diakui	Menganalisis ekonomi rempah dan	Relevan dengan Bab III, dalam

	<i>Asia in the Age of Commerce, 1450–1680</i> (1993)	sebagai rujukan internasional.	dinamika perdagangan maritim Asia Tenggara.	analisis strategi ekonomi dan kedaulatan perdagangan bebas Gowa.
8.	Husni Firmansyah, <i>Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC 1660–1669</i> M (2022)	Hasil penelitian berbasis studi sejarah, diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel Press.	Objektif, menggunakan pendekatan sejarah naratif dan dokumenter.	Relevan dengan Bab III, karena mendukung analisis strategi militer dan politik Sultan Hasanuddin.
9.	Muh. Akbar Adam, <i>Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 dan 1824 dalam Perubahan Sosial Politik antara Kerajaan Gowa dan VOC</i> (2025)	Karya ilmiah yang disusun berdasarkan metode penelitian sejarah dengan memanfaatkan dokumen primer dan literatur akademik yang kredibel.	Membahas implikasi politik Perjanjian Bongaya serta perubahan hubungan antara Gowa dan VOC melalui analisis historis yang sistematis.	Relevan dengan Bab III, terutama dalam menjelaskan bagaimana Perjanjian Bongaya memengaruhi keberlanjutan strategi perlawanan Sultan Hasanuddin dan posisi politik Kesultanan Gowa.
10.	Mualim Agung. (2011).	Merupakan karya ilmiah hasil penelitian sejarah	Isi penelitian menguraikan peranan	Relevan dengan Bab II, khususnya

	<i>Peranan Kerajaan Gowa dalam Pertiagaan Abad XVII.</i>	yang disusun berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, seperti naskah lontarak, arsip VOC, serta literatur sejarah mengenai Kerajaan Gowa. Keaslian karya dapat dipertanggungjawabkan karena menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi sesuai kaidah akademik.	Kerajaan Gowa sebagai pusat perdagangan internasional di kawasan timur Nusantara pada abad XVII, termasuk kebijakan perdagangan terbuka, hubungan dagang antarkerajaan, serta interaksi dengan pedagang asing. Analisis didukung oleh sumber-sumber sejarah yang kredibel sehingga memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan maritim Gowa sebelum serta pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin.	dalam pembahasan mengenai kepemimpinan Sultan Hasanuddin dalam mengelola Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan internasional, serta memberikan konteks historis mengenai kebijakan perdagangan yang kemudian menjadi salah satu latar belakang munculnya konflik dengan VOC.
11.	Risma. (2022). <i>Kerajaan</i>	Merupakan karya ilmiah hasil penelitian sejarah	Penelitian ini mengkaji peran Kerajaan Wajo	Relevan dengan Bab III, khususnya

	<i>Wajo dalam Perang Makassar Tahun 1666-1669.</i>	yang disusun berdasarkan penggunaan sumber primer dan sekunder, seperti arsip kolonial VOC, naskah lontarak, buku sejarah, dan jurnal ilmiah yang relevan. Keaslian karya dapat dipertanggungjawabkan karena disusun melalui metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi sesuai kaidah akademik.	dalam Perang Makassar (1666–1669), khususnya hubungan politik dan militer antara Wajo, Kesultanan Gowa, Bone, dan VOC. Analisis didasarkan pada sumber-sumber sejarah yang kredibel sehingga memberikan gambaran mengenai dinamika aliansi dan strategi politik kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Meskipun berfokus pada Kerajaan Wajo, hasil penelitian ini memberikan informasi yang relevan untuk memahami strategi perlawanan Sultan	dalam pembahasan mengenai strategi perlawanan Sultan Hasanuddin melalui pembentukan aliansi politik dan militer dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk peran Kerajaan Wajo dalam menghadapi ekspansi VOC selama Perang Makassar (1666-1669).
--	---	---	--	---

			Hasanuddin dalam membangun kerja sama dengan kerajaan-kerajaan sekutu.	
12.	Puji Siswandi. (2016). <i>Politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo terhadap Tiga Kerajaan Tellumpoccoe pada Abad XVII.</i>	Merupakan karya ilmiah hasil penelitian sejarah yang disusun berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder, seperti naskah lontarak, arsip kolonial, serta literatur akademik mengenai Kerajaan Gowa-Tallo. Keaslian karya dapat dipertanggungjawabkan karena disusun melalui metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.	Isi penelitian memberikan analisis mengenai kebijakan politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo terhadap kerajaan-kerajaan Tellumpoccoe pada abad XVII. Pembahasannya didukung oleh berbagai sumber sejarah yang kredibel sehingga mampu menjelaskan hubungan antara Islam, kekuasaan politik, dan diplomasi Kerajaan Gowa. Meskipun fokus kajiannya bukan Perang	Relevan dengan Bab II, khususnya dalam pembahasan mengenai kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta latar belakang politik, keagamaan, dan perkembangan Kesultanan Gowa-Tallo. Sumber ini membantu menjelaskan fondasi politik Islam yang memengaruhi kebijakan dan karakter kepemimpinan Kesultanan Gowa sebelum

			Makassar secara langsung, penelitian ini memberikan konteks historis yang penting mengenai karakter kepemimpinan Sultan Hasanuddin dan tradisi politik Islam yang berkembang di Kesultanan Gowa.	terjadinya Perang Makassar.
13.	Ahmad Yani, <i>Sejarah Lokal Sulawesi Selatan</i> (2022)	Buku akademik lokal, diterbitkan oleh IAIN Parepare Press, sumber valid dengan pendekatan historiografi lokal.	Menyoroti eksistensi kedatuan dan konteks sosial Ajatappareng dan Gowa.	Relevan dengan Bab II, sebagai penguat latar geografis dan sosial Kerajaan Gowa.
14.	Hasnani Siri, <i>Sejarah Pergerakan Nasional</i> (2022)	Buku ilmiah, IAIN Parepare Press.	Menguraikan aspek ideologis perlawanan terhadap kolonialisme.	Relevan dengan Bab III, mendukung pemahaman nilai jihad dan siri' na pacce sebagai dasar perjuangan.

Proses kritik sumber dalam skripsi ini dilakukan untuk

memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam menganalisis *Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669)* bersifat valid, autentik, dan relevan dengan konteks sejarah. Kritik eksternal dilakukan guna menilai keaslian naskah seperti *Lontara Patturioloang ri Tu Talloka*, *Perjanjian Bongaya 1667*, dan *Dagregister van Cornelis Speelman*, agar terhindar dari penggunaan dokumen yang diragukan keotentikannya. Sementara itu, kritik internal difokuskan pada penilaian isi sumber, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh bebas dari bias kolonial maupun interpretasi subjektif, serta benar-benar mendukung analisis terhadap strategi militer, politik, ekonomi, dan ideologis Sultan Hasanuddin. Pendekatan ini memperkuat validitas penelitian, menjaga objektivitas analisis historis, dan memberikan landasan yang kokoh dalam menafsirkan perjuangan Sultan Hasanuddin sebagai simbol perlawanan Islam dan kedaulatan di Sulawesi Selatan abad ke-17.

c. Interpretasi (Analisis Data)

Interpretasi merupakan tahapan lanjutan setelah proses heuristik dan kritik sumber, yaitu kegiatan menafsirkan data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi untuk memperoleh makna yang sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Kuntowijoyo, interpretasi merupakan proses berpikir kritis yang bertujuan menghubungkan fakta-fakta sejarah secara logis sehingga menghasilkan pemahaman yang bermakna.⁸¹ Pada tahap ini, data yang telah dinilai valid diolah menjadi narasi ilmiah yang menjelaskan kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669).

Dalam penelitian ini, interpretasi digunakan untuk menganalisis kepemimpinan Sultan Hasanuddin sebagai dasar dalam merumuskan

⁸¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, h. 101.

kebijakan politik dan militer Kesultanan Gowa, serta menafsirkan strategi perlawanannya sebagai bentuk upaya mempertahankan kedaulatan politik, ekonomi, dan nilai-nilai budaya serta keagamaan di tengah ekspansi VOC.⁸² Dengan demikian, analisis tidak hanya menjelaskan kronologi peristiwa, tetapi juga mengungkap hubungan antara karakter kepemimpinan Sultan Hasanuddin dengan strategi yang diterapkannya dalam menghadapi VOC. Proses interpretasi dilakukan melalui beberapa langkah sistematis sebagai berikut:

1) Pengelompokan Data Sejarah

Data yang telah diverifikasi dikelompokkan berdasarkan dua fokus utama penelitian, yaitu:

- a) Kepemimpinan Sultan Hasanuddin, meliputi latar belakang pemerintahan, karakter kepemimpinan, kebijakan politik, serta kondisi sosial-politik Kesultanan Gowa pada masa pemerintahannya.
- b) Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin, meliputi strategi militer-politik, strategi ekonomi-kedaulatan, dan strategi ideologis-teologis yang diterapkan dalam menghadapi VOC.

Pengelompokan tersebut dilakukan agar analisis tersusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.⁸³

2) Penerapan Kerangka Teori

Dalam menafsirkan data, penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai pisau analisis, yaitu:

- a) Teori Perlawanan James C. Scott, untuk menjelaskan bentuk-bentuk perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap dominasi VOC.⁸⁴

⁸² Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, h. 77.

⁸³ Abdurrahman, h. 76.

⁸⁴ Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, h. 29.

- b) Teori Hegemoni Antonio Gramsci, untuk menganalisis bentuk dominasi VOC melalui monopoli perdagangan dan politik kekuasaan sehingga dapat dipahami konteks munculnya strategi perlawanan Sultan Hasanuddin.⁸⁵
- c) Teori Strategi (*Strategic Theory*) oleh Sun Tzu: digunakan untuk memahami pola strategi Sultan Hasanuddin, baik dalam konteks taktik peperangan (*cappa kawali*), kebijakan diplomasi (*cappa tojona*), maupun kecerdikan politik (*cappa lila*) sebagaimana tertanam dalam kearifan lokal Sulawesi Selatan.⁸⁶

Ketiga teori tersebut digunakan secara terpadu sehingga interpretasi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis.

3) Analisis Hubungan Sebab-Akibat

Analisis dilakukan dengan menelusuri hubungan antara kondisi yang melatarbelakangi munculnya strategi perlawanan Sultan Hasanuddin dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkannya dalam menghadapi VOC.

Beberapa di antaranya:

- a) Kebijakan monopoli perdagangan VOC mendorong Sultan Hasanuddin mempertahankan prinsip *mare liberum* sebagai bentuk kedaulatan ekonomi Kesultanan Gowa.
- b) Ancaman politik dan militer VOC mendorong Sultan Hasanuddin memperkuat sistem pertahanan, membangun aliansi politik, dan meningkatkan kekuatan armada laut.⁸⁷

Analisis sebab-akibat ini digunakan untuk menjelaskan mengapa strategi Sultan Hasanuddin berkembang dalam berbagai

⁸⁵ Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, h. 257-258.

⁸⁶ Tzu, *The Art of War*, Terj. Lionel Giles, h. 23-25.

⁸⁷ F. W. Stapel, *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum*, III: h. 214.

dimensi, bukan semata-mata sebagai tindakan militer.⁸⁸

4) Kontekstualisasi Sejarah

Data dianalisis berdasarkan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Interpretasi juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya Bugis-Makassar, khususnya *siri' na pacce*, yang menjadi landasan moral dalam kepemimpinan dan perjuangan Sultan Hasanuddin.

Melalui pendekatan ini, strategi perlawanan dipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa sekaligus menjaga sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat.⁸⁹

5) Sintesis dan Penarikan Makna

Setelah seluruh data diinterpretasikan berdasarkan teori yang digunakan, peneliti menyusun sintesis mengenai dua fokus penelitian.

- a) Kepemimpinan Sultan Hasanuddin ditandai oleh ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa, kemampuan membangun hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan lain, serta komitmen mempertahankan sistem perdagangan bebas.
- b) Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin merupakan strategi yang bersifat multidimensional melalui aspek militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan ideologis-teologis sebagai upaya mempertahankan eksistensi Kesultanan Gowa dari dominasi VOC.

6) Karakteristik Proses Interpretasi

⁸⁸ Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," h. 120-122.

⁸⁹ Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta-Paris, 2006), h. 312.

Proses interpretasi dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik utama:

- a) Pendekatan Interdisipliner yaitu menggabungkan analisis sejarah, politik, ekonomi, dan teologi untuk memahami dimensi kompleks perlawanan Gowa.
- b) Konteks Historis yaitu menafsirkan data berdasarkan situasi abad ke-17, bukan dengan standar modern, agar menghindari kesalahan anachronism.
- c) Fokus Analitis berorientasi pada analisis kepemimpinan dan strategi perlawanan Sultan Hasanuddin.
- d) Berbasis Data Terverifikasi yaitu menggunakan sumber primer dan sekunder yang telah melalui proses kritik sumber.⁹⁰

7) Hasil Interpretasi

Hasil dari tahap interpretasi dua temuan utama:

- a) Kepemimpinan Sultan Hasanuddin menunjukkan karakter pemimpin yang berorientasi pada kedaulatan, keberanian, diplomasi, serta kemampuan mengonsolidasikan kekuatan politik dan militer Kesultanan Gowa.
- b) Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin dilaksanakan secara terpadu melalui strategi militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan ideologis-teologis sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi VOC.

d. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam metode penelitian sejarah, yaitu proses penyusunan dan penulisan hasil penelitian sejarah ke dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis, logis, dan analitis.

⁹⁰ Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), h. 45-47.

Menurut Kuntowijoyo, historiografi tidak hanya berfungsi untuk menceritakan kembali peristiwa masa lalu, tetapi juga menginterpretasikan fakta secara kritis agar menghasilkan pemahaman yang bermakna.⁹¹

Melalui tahap ini, peneliti menyajikan hasil penelitian mengenai kepemimpinan Sultan Hasanuddin dan strategi perlawanannya terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669) dengan mengintegrasikan fakta sejarah dan teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisis.

1) Tujuan dan Fungsi Historiografi

Tujuan utama historiografi dalam penelitian ini adalah menyusun rekonstruksi ilmiah mengenai kepemimpinan Sultan Hasanuddin serta strategi perlawanannya terhadap VOC, baik dalam aspek militer-politik, ekonomi-kedaulatan, maupun ideologis-teologis. Fungsi historiografi adalah:

- a) Menyajikan hasil interpretasi sejarah dalam bentuk narasi ilmiah yang utuh dan mudah dipahami.
- b) Menunjukkan hubungan antara peristiwa lokal (Gowa-VOC) dengan konteks sejarah nasional dan global abad ke-17.
- c) Menggambarkan kesinambungan antara nilai perjuangan Sultan Hasanuddin dengan semangat kedaulatan dan keislaman di Nusantara.⁹²

2) Model Historiografi yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan model historiografi analitis-deskriptif, yaitu penulisan sejarah yang tidak hanya menceritakan kronologi peristiwa, tetapi juga menganalisis sebab, akibat, dan makna di baliknya. Model ini menggabungkan tiga pendekatan:

⁹¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, h. 102.

⁹² Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, h. 80.

- a) Historiografi Kolonial, sebagai bahan pembanding, melalui arsip VOC seperti *Dagregister van Cornelis Speelman* untuk memahami perspektif kolonial terhadap perang.⁹³
- b) Historiografi Nasional, yang berupaya merehabilitasi tokoh-tokoh perjuangan seperti Sultan Hasanuddin sebagai pahlawan nasional dan simbol perlawanan Islam di timur Indonesia.⁹⁴
- c) Historiografi Lokal (Makassar-Bugis), yang menekankan nilai-nilai budaya seperti *siri' na pacce* dan konsep *cappa tiga* (kecerdikan, ketajaman, dan keberanian) sebagai kerangka moral dan sosial dalam strategi perlawanan.⁹⁵

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menampilkan keseimbangan perspektif antara pandangan kolonial, nasional, dan lokal secara objektif.

3) Struktur Penulisan Historiografi

Penyusunan hasil penelitian dibagi ke dalam dua struktur utama, yang sekaligus mengacu pada tiga rumusan masalah:

- a) Bab II: Profil Sultan Hasanuddin dan Konteks Historis Konflik Gowa-VOC (1666-1669)

Bab ini menguraikan secara mendalam latar belakang sosial, politik, dan ekonomi Kesultanan Gowa-Tallo pada abad ke-17, serta dinamika awal interaksi antara Kesultanan Gowa dan VOC di kawasan timur Nusantara. Pembahasan difokuskan pada rekonstruksi hubungan diplomatik dan perdagangan antara kedua kekuatan tersebut yang pada mulanya berlangsung secara kooperatif, tetapi kemudian berkembang menjadi konflik

⁹³ Rijksarchief Den Haag, *Dagregister van Cornelis Speelman 1666–1669* (Den Haag: Rijksarchief, 1960), h. 32-36.

⁹⁴ Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, h. 72-73.

⁹⁵ Pelras, *Manusia Bugis*, h. 312.

terbuka akibat perbedaan kepentingan politik dan ekonomi. Selain itu, bab ini juga mengkaji faktor-faktor politik, ekonomi, dan ideologis yang melatarbelakangi pecahnya Perang Makassar, terutama pertentangan antara kebijakan monopoli perdagangan yang diterapkan VOC dengan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*) yang dipertahankan oleh Kesultanan Gowa. Prinsip *mare liberum* memberikan kebebasan bagi setiap bangsa untuk berlayar, singgah, dan melakukan aktivitas perdagangan di Makassar tanpa tunduk pada monopoli satu kekuatan dagang tertentu, sehingga bertentangan secara langsung dengan kepentingan ekonomi dan politik VOC di kawasan timur Nusantara.⁹⁶

b) Bab III: Analisis Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin (1666-1669)

Bab ini menguraikan secara komprehensif berbagai strategi perlawanan yang diterapkan Sultan Hasanuddin dalam menghadapi ekspansi politik, militer, dan kebijakan monopoli perdagangan VOC di Sulawesi Selatan. Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama strategi perlawanan. Pertama, strategi militer-politik, yang diwujudkan melalui pembangunan dan penguatan sistem pertahanan benteng, khususnya Benteng Somba Opu, penguatan armada laut, serta pembentukan aliansi dengan kerajaan-kerajaan sekutu, seperti Tallo dan Wajo, untuk memperkuat posisi Kesultanan Gowa dalam menghadapi VOC. Kedua, strategi ekonomi-kedaulatan, yaitu mempertahankan prinsip kebebasan berlayar (*mare liberum*) sebagai dasar kebijakan maritim Kesultanan Gowa yang memberikan

⁹⁶ Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," h. 35.

kebebasan bagi berbagai bangsa untuk berlayar, singgah, dan melakukan aktivitas perdagangan di Makassar tanpa tunduk pada monopoli satu kekuatan dagang tertentu. Prinsip tersebut menjadi bentuk penolakan terhadap sistem monopoli kolonial yang diterapkan VOC. Ketiga, strategi ideologis-teologis, yang membahas legitimasi keagamaan dan moral perjuangan Sultan Hasanuddin melalui konsep *jihad fi sabilillah* serta internalisasi nilai budaya *siri' na pacce* sebagai landasan etis yang membangkitkan solidaritas, keberanian, dan semangat kolektif masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan serta kehormatan Kesultanan Gowa.⁹⁷

Struktur tersebut disusun secara sistematis untuk menunjukkan hubungan antara kepemimpinan Sultan Hasanuddin dengan strategi perlawanan yang diterapkannya dalam menghadapi VOC.

4) Prinsip Penulisan Historiografi

Penulisan historiografi dalam penelitian ini mengikuti prinsip-prinsip ilmiah yang berlaku dalam kajian sejarah, yaitu:

- a) Kronologis, Penulisan dilakukan berdasarkan urutan waktu agar alur peristiwa dapat dipahami secara runtut.
- b) Kausalitas, Menunjukkan hubungan sebab-akibat antar peristiwa sejarah.
- c) Objektivitas, Menjaga keseimbangan pandangan antara sumber kolonial, lokal, dan akademik modern.
- d) Kritis dan Analitis, Tidak hanya mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga menganalisis maknanya melalui teori perlawanan,

⁹⁷ Muhammad Rizem Aizid, *Sejarah Lengkap Kolonial Di Nusantara: Portugis, VOC, Hindia Belanda, Dan Inggris* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2025), h. 176-180.

hegemoni, dan strategi.⁹⁸

- e) Interpretatif, Memberikan tafsir terhadap fakta sejarah dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Makassar abad ke-17.

Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa hasil penulisan bukan sekadar cerita sejarah, melainkan sebuah analisis ilmiah yang dapat diuji validitasnya secara akademik.

5) Gaya Penulisan Historiografi

Gaya penulisan dalam penelitian ini bersifat naratif-analitis, yaitu menggabungkan penyajian fakta dengan pembahasan konseptual. Bahasa yang digunakan tetap formal dan ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan KTI IAIN Parepare 2023, namun tetap komunikatif dan mudah dipahami. Setiap bab akan diakhiri dengan kesimpulan parsial yang mengaitkan hasil analisis dengan teori-teori yang digunakan, seperti:

- a) *Resistance Theory* untuk mengkaji tindakan perlawanan.
- b) *Colonial Hegemony Theory* untuk menilai dominasi VOC.
- c) *Strategic Theory* untuk menafsirkan taktik dan diplomasi Sultan Hasanuddin.⁹⁹

Dengan demikian, gaya penulisan historiografi ini memungkinkan penyajian hasil penelitian yang komprehensif, ilmiah, dan bermakna bagi pengembangan kajian sejarah Islam dan lokal di Nusantara.

6) Nilai Historis dan Akademik Historiografi

Penulisan historiografi ini memberikan dua kontribusi penting:

- a) Nilai Historis, Menegaskan kembali posisi Sultan Hasanuddin

⁹⁸ Siri, *Sejarah Pergerakan Nasional*, h. 94-95.

⁹⁹ Tzu, *The Art of War*, Terj. Lionel Giles, h. 23-25.

sebagai simbol perjuangan anti-kolonial di kawasan timur Indonesia dan sebagai representasi kepemimpinan Islam yang berlandaskan moral.

- b) Nilai Akademik: Penelitian ini memberikan perspektif mengenai hubungan antara kepemimpinan Sultan Hasanuddin dan strategi perlawanannya terhadap VOC melalui analisis yang mengintegrasikan aspek militer-politik, ekonomi-kedaulatan, dan ideologis-teologis sehingga memperkaya kajian sejarah Kesultanan Gowa pada abad ke-17.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Heather Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi* (Singapore: Heinemann, 1979), h. 60-63.

BAB II

PROFIL SULTAN HASANUDDIN DAN KONTEKS HISTORIS KONFLIK GOWA-VOC (1666-1669)

A. Profil dan Kepemimpinan Sultan Hasanuddin

1. Latar Belakang, Pendidikan, dan Karakter Kepemimpinan

Sultan Hasanuddin lahir pada 12 Januari 1631 di Somba Opu, pusat pemerintahan Kerajaan Gowa, dari pasangan Sultan Malikussaid dan I Sabbe Lokmana. Ia diberi nama lengkap *I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Tumenanga ri Balla Pangkana*.¹⁰¹ Latar belakang keluarga bangsawan dari dua kerajaan kembar Gowa dan Tallo memberikan legitimasi politik dan sosial yang kuat baginya. Gowa dan Tallo merupakan pusat kekuasaan penting di kawasan timur Nusantara pada abad ke-17, dengan pelabuhan yang ramai oleh pedagang dari Arab, Cina, Jawa, hingga Portugis.¹⁰² Lingkungan istana yang dinamis dan kosmopolit inilah yang membentuk wawasan politik, diplomasi, dan keagamaan Sultan Hasanuddin sejak dini.

Pendidikan Sultan Hasanuddin berlangsung dalam dua jalur utama: keilmuan Islam dan kepemimpinan adat. Ia di didik oleh ulama besar seperti Dato ri Bandang dan Syaikh Yusuf al-Makassari, dua tokoh penting penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.¹⁰³ Dari mereka, Hasanuddin mempelajari dasar-dasar *tauhid*, *fiqh*, dan *tasawuf*, serta memahami konsep kepemimpinan Islam yang berlandaskan keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab (*amanah*).¹⁰⁴ Selain itu, ia juga menimba ilmu pemerintahan tradisional di

¹⁰¹ Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," h. 35.

¹⁰² Anthony Reid, "Asia Tenggara Pada Zaman Perdagangan 1450–1680: Volume 2: Ekspansi Dan Krisis" (London, 1993), h. 122.

¹⁰³ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*, h. 149-150.

¹⁰⁴ Yuni Harnita, Zetria Wendra, and Rahmad Hidayat, "Konsep Dasar Kepemimpinan Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Inovatif* 7, no. 3 (2025): h. 355.

bawah bimbingan bangsawan istana dan penasihat militer ayahandanya, sehingga mengenal sistem sosial-politik *pangngadereng* yaitu aturan adat yang mengatur harmoni dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.¹⁰⁵

Karakter Hasanuddin dikenal teguh, pemberani, dan memiliki integritas moral tinggi. Sikapnya yang keras terhadap ketidakadilan menjadikannya disegani, baik oleh rakyat maupun lawan politiknya. Catatan Belanda menyebut Hasanuddin sebagai “*de haan van Makassar*” (ayam jantan dari timur), sebuah julukan yang menggambarkan keberaniannya dalam menghadapi kekuatan kolonial.¹⁰⁶ Julukan ini bukan sekadar simbol keperkasaan, tetapi juga pengakuan terhadap kemampuan strategis dan kharismanya sebagai pemimpin yang tidak mudah tunduk. Bahkan, VOC dalam *Dagregister van Cornelis Speelman* mencatat bahwa Hasanuddin “tidak pernah gentar terhadap ancaman Belanda dan lebih memilih berperang daripada tunduk.”¹⁰⁷

Sebagai seorang raja, Sebagai seorang sultan, Hasanuddin tidak hanya menitikberatkan kebijakan pemerintahannya pada aspek pertahanan militer, tetapi juga pada diplomasi, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan maritim. Ia menolak kebijakan monopoli perdagangan yang diberlakukan VOC karena bertentangan dengan prinsip *mare liberum* (kebebasan berlayar) yang telah lama menjadi landasan kebijakan maritim Kesultanan Gowa. Prinsip tersebut memberikan kebebasan kepada setiap bangsa untuk berlayar, singgah, dan melakukan aktivitas perdagangan di Makassar tanpa harus tunduk pada monopoli satu kekuatan dagang tertentu. Bagi Sultan Hasanuddin, kebijakan monopoli VOC tidak hanya mengancam perekonomian Kesultanan Gowa,

¹⁰⁵ Wahyuddin Halim, “Ekplorasi Atas Praktik Dan Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Kerajaan Wajo Abad Ke- 15/16 Dan Kompatibilitasnya Dengan Sistem Demokrasi Modern,” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 18, no. 2 (2016): h. 31-46.

¹⁰⁶ Firmansyah, *Perlawanan Sultan Hasanuddin Terhadap VOC 1660-1669 M*, h. 86.

¹⁰⁷ Rijksarchief Den Haag, *Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal En Raden Aan Heren XVII* (Den Haag: Rijksarchief, 1960).

tetapi juga merampas hak masyarakat untuk melakukan pelayaran dan perdagangan secara adil, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ('*adl*') dalam ajaran Islam.¹⁰⁸ Oleh karena itu, mempertahankan prinsip *mare liberum* dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan politik, ekonomi, dan martabat Kesultanan Gowa.

Kecerdasan politiknya juga terlihat dari kemampuannya membangun jaringan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Bone, Wajo, dan Tallo. Ia berusaha membangun koalisi antarkerajaan untuk menghadapi ancaman eksternal. Walaupun pada akhirnya muncul perpecahan antara Gowa dan Bone akibat politik *divide et impera* VOC, namun upaya Sultan Hasanuddin membentuk aliansi ini menunjukkan visi politiknya yang luas. Bahkan, dalam beberapa lontarak disebutkan bahwa sebelum memulai pertempuran besar, Sultan Hasanuddin selalu bermusyawarah dengan bangsawan, ulama, dan rakyat untuk mencapai kesepakatan bersama.¹⁰⁹ Sikap ini menggambarkan sifat kepemimpinan partisipatif yang menghargai musyawarah (*syura*), sebagaimana diajarkan dalam Islam.

¹⁰⁸ Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, h. 87.

¹⁰⁹ Imam Mujahidin Fahmid, "Tidal Polarization in Elite Ethnic and Makassar Bugis," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6, no. 2 (2012): h. 180.



Gambar 2.1 Potret Sultan Hasanuddin (1631-1670).¹¹⁰

Pendidikan agama, pengetahuan politik, dan pengalaman diplomatik inilah yang membentuk karakter Sultan Hasanuddin sebagai pemimpin yang berprinsip, berani, dan berdaulat. Ia menjadi simbol raja yang tidak hanya melindungi wilayahnya, tetapi juga menjaga martabat bangsanya dari intervensi asing. Sultan Hasanuddin memimpin bukan semata sebagai penguasa, tetapi sebagai pelindung kehormatan rakyatnya.¹¹¹

2. Nilai-Nilai Islam dan Budaya Siri' na Pacce dalam Kepemimpinan

Kepemimpinan Sultan Hasanuddin tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam yang menjadi dasar moral dan ideologinya. Ia memandang perjuangan melawan VOC sebagai bagian dari *Jihad fi sabilillah*, yaitu perjuangan menegakkan keadilan dan melawan penindasan sebagaimana diserukan dalam Al-Qur'an.¹¹² Dalam pidato-pidatonya yang tercatat dalam lontarak, Hasanuddin kerap menyerukan bahwa "lebih baik mati dalam kehormatan daripada hidup dalam perbudakan."¹¹³ Ungkapan ini

¹¹⁰ "Arsip Nasional Republik Indonesia and Koleksi Foto Raja-Raja Nusantara," 2018.

¹¹¹ Yani, *Sejarah Lokal Sulawesi Selatan: Menyusuri Eksistensi Kedatuan Sawitto Di Ajatappareng Abad XVI-XVII*, h. 177.

¹¹² az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah Manhaj," h. 165.

¹¹³ Kamaruddin, *Lontara Bilang Raja Gowa Dan Tallo*, h. 214.

menunjukkan nilai spiritual yang kuat bahwa perlawanan bukan semata urusan duniawi, tetapi juga tanggung jawab moral di hadapan Allah.

Sultan Hasanuddin berpegang teguh pada prinsip keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab (*amanah*). Ia menolak ketidakadilan yang dilakukan oleh VOC karena bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana landasan *firman* Allah SWT dalam QS. Al-Māidah [5]: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*¹¹⁴

Nilai ini menjadi dasar moral dalam kebijakan politiknya. Hasanuddin memerintah dengan menegakkan keadilan sosial dan melindungi rakyat dari penindasan, sehingga membangun kepercayaan rakyat yang kuat terhadap kepemimpinannya.

Selain nilai Islam, kepemimpinan Sultan Hasanuddin juga sangat dipengaruhi oleh budaya lokal Makassar, yaitu konsep *siri' na pacce*. *Siri'* berarti harga diri, kehormatan, dan identitas, sedangkan *pacce* berarti rasa empati dan solidaritas terhadap penderitaan orang lain. Kedua nilai ini menjadi fondasi moral masyarakat Bugis-Makassar dan menyatu dalam kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Menurut Mattulada, *siri' na pacce* adalah sistem etika sosial yang menjadikan seseorang bertanggung jawab mempertahankan kehormatan diri dan bangsanya dari penghinaan.¹¹⁵

Dalam konteks pemerintahan, *siri'* menuntut Sultan Hasanuddin untuk menjaga kedaulatan Gowa dari dominasi asing, sementara *pacce*

¹¹⁴ Al-Qur'anul Karim and Surah Al-Māidah, (5): 8.

¹¹⁵ Mattulada and Gramsci, *Sejarah, Masyarakat, Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, h. 154.

mendorongnya untuk berjuang demi kesejahteraan rakyatnya. Semangat *siri' na pacce* ini menjadikan perlawanan terhadap VOC bukan hanya perang politik, tetapi juga perjuangan moral dan spiritual.¹¹⁶ Dalam pandangan Islam, hal ini selaras dengan konsep *jihad sosial* yaitu perjuangan menegakkan keadilan dan membela martabat manusia.¹¹⁷



*Gambar 2.2. Relief “Siri’ na Pacce” di Museum Balla Lompoa, Gowa.*¹¹⁸

Nilai-nilai tersebut juga tampak dalam cara Sultan Hasanuddin memperlakukan rakyat dan lawannya. Ia tidak menumpahkan darah tanpa alasan, dan selalu memberi kesempatan damai sebelum berperang. Bahkan, dalam beberapa catatan VOC, disebutkan bahwa Hasanuddin menolak serangan mendadak terhadap kapal Belanda karena dianggap tidak sesuai dengan etika perang Islam.¹¹⁹ Hal ini menunjukkan moralitas tinggi dalam memimpin dan berperang, yang membuatnya dikenang bukan hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai raja yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

¹¹⁶ Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara* (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 111.

¹¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 25.

¹¹⁸ Dinas Kebudayaan Kabupaten Gowa (Gowa: Dokumentasi Museum Balla Lompoa, 2022).

¹¹⁹ Abd Rahman Hamid, *Sultan Hasanuddin Dan Arung Palakka: Masa Lalu Yang (Masih) Aktual* (Sulawesi Selatan, 2013), h. 1-17.

B. Struktur Sosial dan Politik Kerajaan Gowa-Tallo sebagai Negara Maritim Islam

1. Sistem Pemerintahan dan Hubungan antara Gowa dan Tallo

Kerajaan Gowa-Tallo merupakan entitas politik yang unik di kawasan timur Nusantara karena terbentuk dari dua kerajaan kembar yang menjalin persekutuan berdasarkan asas kekerabatan dan solidaritas politik.¹²⁰ Sejak masa pemerintahan Tunipalangga Ulaweng (1546-1565), kedua kerajaan ini menyatukan kekuatan militer dan ekonomi di bawah satu sistem pemerintahan terkoordinasi yang disebut *rupa dua se're ata i*, artinya “dua yang menjadi satu untuk rakyat.”¹²¹ Gowa menjadi pusat kekuasaan politik dan militer, sedangkan Tallo berperan sebagai pusat keagamaan dan diplomasi. Hubungan ini mencerminkan keseimbangan antara kekuasaan duniawi dan spiritual yang menjadi dasar pemerintahan maritim Islam di Sulawesi Selatan.

Secara administratif, pemerintahan Gowa-Tallo diatur dalam struktur hierarkis yang terdiri atas raja (*karaeng*), dewan bangsawan (*pabbicara butta*), dan pejabat lokal (*gallarang*).¹²² Dewan bangsawan berfungsi sebagai penasihat utama raja, membahas kebijakan strategis, serta menjadi penghubung antara rakyat dan penguasa. Sistem ini memperlihatkan adanya pembagian kekuasaan yang terencana dan partisipatif, sejalan dengan nilai musyawarah (*syura*) dalam tradisi Islam.¹²³ Pemerintahan Gowa-Tallo tidak bersifat absolut; keputusan penting, termasuk urusan perang dan diplomasi, harus disepakati dalam dewan istana.¹²⁴

Raja Gowa, termasuk Sultan Hasanuddin, memegang posisi sebagai *Paduka Sultan*, gelar yang menunjukkan otoritas ganda: pemimpin politik dan

¹²⁰ Ahmad M Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 3.

¹²¹ Bahtiar, “Orang Melayu Di Sulawesi Selatan,” *Walasuji* 9, no. 2 (2018): h. 373-387.

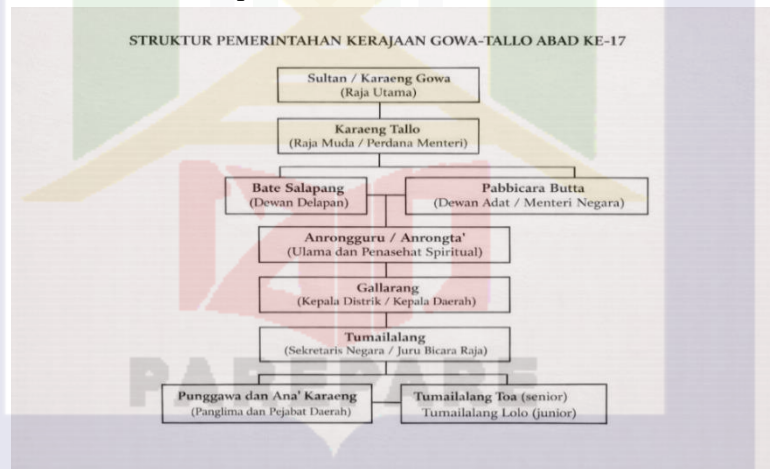
¹²² Mattulada and Gramsci, *Sejarah, Masyarakat, Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, h. 147.

¹²³ Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara*, h. 105.

¹²⁴ Firmansyah, *Perlawanan Sultan Hasanuddin Terhadap VOC 1660-1669 M*, h. 62.

pelindung agama. Gelar ini diadopsi setelah Islam menjadi agama resmi kerajaan sekitar tahun 1605 M pada masa Raja Gowa ke-14, Karaeng Matoaya dari Tallo.¹²⁵ Sejak saat itu, Gowa-Tallo berkembang menjadi kerajaan Islam yang memadukan hukum adat (*pangngadereng*) dan syariat Islam (*syara'*). Dua sistem hukum ini berjalan beriringan melalui konsep *ade' na syara' a'rupaiangngi*, artinya adat dan agama saling memperkuat.¹²⁶

Persekutuan Gowa-Tallo juga memiliki dimensi ideologis. Gowa berperan sebagai penjaga kedaulatan dan pertahanan, sementara Tallo menjadi pusat pendidikan Islam dan kegiatan dakwah. Syaikh Yusuf al-Makassari, misalnya, pernah berperan sebagai penasihat spiritual di lingkungan istana.¹²⁷ Sinergi ini melahirkan tatanan politik yang stabil dan berorientasi pada nilai keadilan Islam. Bahkan menurut Andaya, keseimbangan kekuasaan antara Gowa dan Tallo menjadi model pemerintahan maritim yang paling efektif di kawasan timur Indonesia pada abad ke-17.¹²⁸



Gambar 2.3. Struktur Pemerintahan Kerajaan Gowa-Tallo pada Abad ke-17.¹²⁹

¹²⁵ Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII*, h. 89.

¹²⁶ R Masrifah et al., "Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal Di Pulau Sulawesi," *JB: Jurnal Bahasa Indonesia* 2, no. 1 (2024): h. 1-10.

¹²⁷ Sirajuddin Jaffar, *Jaringan Ulama Dan Islamisasi Indonesia Timur* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 129-130.

¹²⁸ Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," h. 29.

¹²⁹ Puji Siswandi and U.I.N.Alauddin Makassar Skripsi, "Politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Tiga Kerajaan Tellumpoccoe Pada Abad XVII," 2016.

Keberadaan sistem pemerintahan yang terorganisir ini memungkinkan Gowa-Tallo mengatur jaringan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan luar seperti Bone, Wajo, dan Soppeng. Dalam setiap hubungan diplomatik, Gowa selalu menekankan prinsip kesetaraan, baik terhadap kerajaan tetangga maupun kekuatan asing seperti Portugis dan Inggris.¹³⁰ Nilai-nilai Islam, musyawarah, dan keadilan sosial menjadikan sistem pemerintahan Gowa-Tallo tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga legitimatif di mata rakyatnya.

2. Peranan Kesultanan Gowa dalam Menerapkan Prinsip *Mare Liberum* (Kebebasan Berlayar) di Asia Tenggara

Kesultanan Gowa-Tallo pada abad ke-17 dikenal sebagai salah satu kekuatan maritim utama di Asia Tenggara yang menerapkan prinsip *mare liberum* (kebebasan berlayar).¹³¹ Prinsip ini memberikan kesempatan kepada setiap bangsa untuk berlayar, singgah, dan melakukan aktivitas perdagangan di Pelabuhan Somba Opu tanpa harus tunduk pada monopoli satu kekuatan dagang tertentu. Oleh karena itu, Makassar berkembang sebagai simpul perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Tiongkok, Jawa, Melayu, Portugis, Inggris, hingga berbagai wilayah di Nusantara. Dalam berbagai catatan VOC, Makassar digambarkan sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di kawasan timur Nusantara karena keterbukaannya terhadap berbagai komunitas pedagang.¹³² Kebijakan maritim tersebut mencerminkan komitmen Kesultanan Gowa dalam mempertahankan kebebasan pelayaran dan perdagangan yang bertentangan dengan sistem monopoli VOC.

Kebijakan pelabuhan bebas tersebut berakar dari filosofi Islam tentang

¹³⁰ Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, h. 125.

¹³¹ Denys Lombard, *Le Carrefour Javanais: Essai d'histoire Globale* (Paris: Éditions de l'EHESS, 1990), h. 213.

¹³² Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, h. 22-29.

'*adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan umum).¹³³ Dalam pandangan Islam, perdagangan yang adil dan terbuka merupakan fondasi bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial-ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Muṭaffifin [83]: 1-3, yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya:

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*¹³⁴

Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk ketidakjujuran dan ketimpangan dalam perdagangan adalah perbuatan tercela dan dilarang oleh Islam. Nilai keadilan ekonomi menjadi prinsip utama dalam hubungan sosial dan perdagangan antarumat manusia. Dalam konteks Kerajaan Gowa abad ke-17, Sultan Hasanuddin menafsirkan semangat ayat tersebut sebagai dasar moral untuk menolak praktik monopoli yang dilakukan oleh VOC. Bagi beliau, monopoli VOC bukan hanya bentuk dominasi ekonomi, melainkan juga pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan etika Islam.

Sultan Hasanuddin memandang bahwa monopoli VOC telah menghilangkan hak rakyat Gowa untuk berdagang secara bebas dan setara. Tindakan VOC yang menguasai pelabuhan, memaksa harga, dan melarang perdagangan antar kerajaan dianggap bertentangan dengan nilai syariah serta adat pangngadereng yang menegakkan kejujuran (*lempu'*) dan keseimbangan (*getteng*). Oleh karena itu, penolakan Gowa terhadap sistem monopoli VOC

¹³³ az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah Manhaj," h. 166.

¹³⁴ Al-Qur'an al-Karim, "QS Al-Muṭaffifin" (83): 1-3.

tidak hanya bermotif politik, tetapi juga merupakan ekspresi kedaulatan moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam.

Dalam perspektif tersebut, prinsip *mare liberum* yang dipertahankan Kesultanan Gowa merupakan manifestasi dari kedaulatan maritim yang memberikan kebebasan bagi setiap bangsa untuk melakukan pelayaran dan perdagangan secara adil. Prinsip tersebut selaras dengan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dalam ajaran Islam, karena menolak praktik monopoli yang hanya menguntungkan satu pihak. Dengan demikian, penolakan Sultan Hasanuddin terhadap kebijakan VOC bukan semata-mata didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh komitmen untuk mempertahankan keadilan, kedaulatan, dan hak setiap bangsa dalam memanfaatkan jalur pelayaran internasional.¹³⁵

Pada saat itu, Pelabuhan Somba Opu tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan internasional, tetapi juga menjadi ruang pertemuan berbagai kebudayaan, agama, dan jaringan intelektual dari berbagai kawasan Asia. Kehadiran para pedagang Arab, Gujarat, dan Melayu turut mempercepat proses penyebaran Islam di Sulawesi Selatan melalui interaksi ekonomi dan sosial dengan masyarakat setempat.¹³⁶ Sementara itu, pedagang Tionghoa membawa berbagai keterampilan perdagangan, termasuk sistem pencatatan niaga, pengelolaan distribusi barang, dan jaringan perdagangan antarpelabuhan yang memperkuat aktivitas ekonomi Makassar.² Kondisi ini menjadikan Makassar berkembang sebagai kota pelabuhan kosmopolitan yang dihuni oleh berbagai komunitas etnis dan agama.¹³⁷

Selain itu, hubungan dagang yang terjalin dengan Portugis, Inggris, Melayu, Jawa, dan pedagang dari kepulauan Nusantara lainnya memberikan

¹³⁵ az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah Manhaj," h. 165-167.

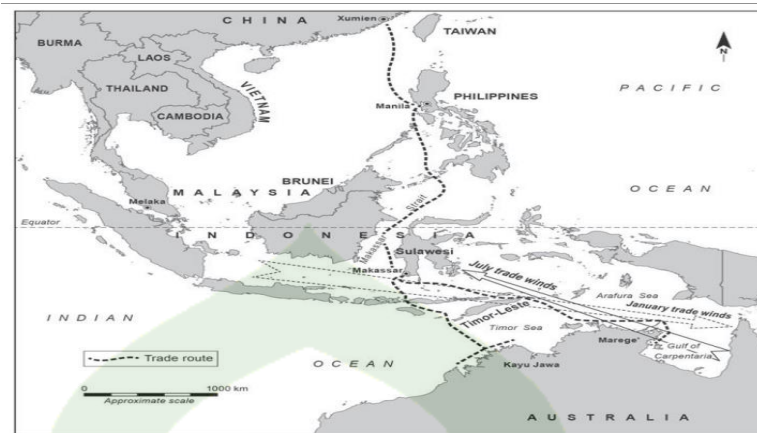
¹³⁶ Margareta Maria Sudarwani and Sri Pare Eni, "Revitalisasi Kawasan Benteng Somba Opu Sebagai Kawasan Bersejarah Peninggalan Kerajaan Gowa Sulawesi Selatan," 2019, h. 1-41.

¹³⁷ Subarman Salim, "Jaringan Teluk Bone: Aktivitas Pelayaran Dan Diaspora Bugis Abad XVIII-XIX," *JAWI* 7, no. 1 (2024): h. 25-36.

keuntungan ekonomi yang besar bagi Kesultanan Gowa. Melalui penerapan prinsip *mare liberum* (kebebasan berlayar), setiap pedagang memperoleh kesempatan yang sama untuk berlayar, singgah, dan melakukan aktivitas perdagangan di Makassar tanpa harus tunduk pada monopoli satu kekuatan dagang tertentu. Kebijakan tersebut menjadikan Makassar sebagai salah satu pusat perdagangan internasional yang paling dinamis di kawasan timur Nusantara. Akibatnya, pada pertengahan abad ke-17 Makassar tumbuh menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di kawasan timur Nusantara dan menjadi simpul penting jalur perdagangan antara Maluku, Jawa, Sumatra, Filipina, hingga kawasan Asia Selatan.¹³⁸

Keberhasilan Makassar sebagai pusat pelayaran dan perdagangan internasional inilah yang kemudian bertentangan secara langsung dengan kepentingan VOC. Sejak awal abad ke-17 VOC berupaya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah melalui penerapan sistem monopoli di Maluku dan kawasan timur Nusantara. Sebaliknya, Kesultanan Gowa mempertahankan prinsip *mare liberum* yang memberikan kebebasan kepada seluruh bangsa untuk berlayar dan berdagang tanpa diskriminasi. Akibatnya, para pedagang tetap dapat memperoleh rempah-rempah melalui Makassar tanpa harus mengikuti ketentuan monopoli VOC. Bagi VOC, keberadaan Makassar menjadi hambatan utama dalam mewujudkan dominasi perdagangan rempah-rempah, sehingga konflik antara kedua pihak pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, tetapi juga merupakan pertentangan antara prinsip kebebasan berlayar yang dipertahankan Kesultanan Gowa dan sistem monopoli perdagangan yang dipaksakan VOC.

14. ¹³⁸ Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, h.



Gambar 2.4. Peta Jalur Perdagangan Nusantara Abad ke-17 dengan Pusat Pelabuhan Gowa-Tallo.¹³⁹

Sebagai pelabuhan bebas, Gowa juga berperan penting dalam penyebaran Islam di kawasan timur Indonesia. Pedagang dari Aceh, Jawa, dan Maluku membawa ajaran Islam ke masyarakat pesisir, sementara ulama Gowa turut berdakwah ke Nusa Tenggara dan Kalimantan.¹⁴⁰ Hubungan dagang menjadi sarana dakwah dan diplomasi yang efektif. Dengan demikian, fungsi pelabuhan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ideologis dan kultural. Hal ini menegaskan posisi Gowa-Tallo sebagai *center of Islamic maritime civilization* di Asia Tenggara.¹⁴¹

Pada akhirnya, penerapan prinsip *mare liberum* oleh Kesultanan Gowa tidak hanya merupakan kebijakan ekonomi dan maritim, tetapi juga menjadi bentuk perlawanan terhadap upaya monopoli VOC atas jalur perdagangan di kawasan timur Nusantara. Bagi Sultan Hasanuddin, kebebasan berlayar dan berdagang merupakan bagian dari kedaulatan negara yang harus dipertahankan demi melindungi kepentingan rakyat serta menjamin keadilan dalam hubungan antarpedagang. Oleh karena itu, pertentangan antara prinsip

¹³⁹ Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, h. 128.

¹⁴⁰ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*, h. 151.

¹⁴¹ Yani, *Sejarah Lokal Sulawesi Selatan: Menyusuri Eksistensi Kedatuan Sawitto Di Ajatappareng Abad XVI-XVII*, h. 183.

mare liberum yang dianut Kesultanan Gowa dan sistem monopoli VOC menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi pecahnya Perang Makassar (1666-1669).¹⁴²

C. Kedatangan VOC dan Ambisi Monopoli di Nusantara Bagian Timur

1. Kebijakan Monopoli VOC dan Respon Gowa

Kehadiran *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di kawasan timur Nusantara merupakan bagian dari strategi global Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dunia pada abad ke-17. Sejak memperoleh *octrooi* pada tahun 1602, VOC diberikan kewenangan yang sangat luas oleh *Staten-Generaal* Belanda, meliputi hak memonopoli perdagangan, membentuk angkatan bersenjata, mendirikan benteng, mencetak mata uang, serta membuat perjanjian politik dengan para penguasa lokal.¹⁴³ Kewenangan tersebut menjadikan VOC tidak lagi sekadar perusahaan dagang, melainkan juga kekuatan politik dan militer kolonial yang menjalankan ekspansi kekuasaan di berbagai wilayah Nusantara.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, VOC memandang Kesultanan Gowa-Tallo sebagai hambatan utama terhadap ambisi monopolinya. Hal ini disebabkan oleh kedudukan Makassar sebagai pusat pelayaran dan perdagangan internasional yang menerapkan prinsip *mare liberum* (kebebasan berlayar). Melalui prinsip tersebut, para pedagang dari berbagai bangsa, seperti Portugis, Inggris, Arab, Melayu, Tiongkok, dan wilayah Nusantara lainnya, memperoleh kebebasan untuk berlayar, singgah, dan melakukan aktivitas perdagangan di Makassar tanpa harus tunduk kepada monopoli satu kekuatan dagang tertentu.¹⁴⁴ Kebijakan ini bertolak belakang dengan sistem VOC yang berupaya menguasai secara eksklusif jalur distribusi dan harga komoditas rempah-rempah, terutama cengkih dan pala

¹⁴² Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," h. 98.

¹⁴³ Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, h. 64-65.

¹⁴⁴ Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, h. 128-130.

dari Kepulauan Maluku.

Berangkat dari kepentingan tersebut, VOC berusaha menekan Kesultanan Gowa agar menutup akses Pelabuhan Makassar bagi para pedagang non-Belanda. Tekanan tersebut diwujudkan melalui diplomasi koersif, ancaman militer, serta tuntutan berbagai perjanjian yang mengharuskan Gowa mengakui hak monopoli VOC. Akan tetapi, seluruh tuntutan tersebut ditolak oleh Sultan Hasanuddin karena dipandang bertentangan dengan kedaulatan politik, ekonomi, dan maritim Kesultanan Gowa. Bagi Sultan Hasanuddin, penerapan prinsip *mare liberum* bukan hanya merupakan kebijakan ekonomi, melainkan juga simbol kedaulatan negara yang menjamin hak setiap bangsa untuk memanfaatkan jalur pelayaran dan perdagangan secara adil tanpa adanya dominasi satu kekuatan asing.¹⁴⁵

Penolakan Sultan Hasanuddin terhadap monopoli VOC juga berakar pada pandangan keagamaan dan nilai adat. Dalam perspektif Islam, praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan larangan eksploitasi ekonomi. Nilai ini sejalan dengan sistem adat *pangngadereng* yang menjunjung tinggi kejujuran dan keseimbangan sosial.¹⁴⁶ Oleh sebab itu, kebijakan VOC dipandang tidak hanya sebagai ancaman ekonomi, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan etika sosial.

Sebagai respons atas penolakan tersebut, VOC mulai menerapkan berbagai bentuk tekanan secara bertahap, antara lain membatasi jalur pelayaran kapal-kapal Makassar, menyita kapal dagang yang dianggap melanggar kebijakan monopoli, serta melakukan intimidasi terhadap para mitra dagang Kesultanan Gowa. Dalam sejumlah arsip VOC, Makassar

¹⁴⁵ Mohamad Irfan, "Perjuangan Buruh Pelabuhan Di Indonesia: Gejolak Politik Dan Industrial," *PENERBIT KBM INDONESIA*, 2026, h. 108-109.

¹⁴⁶ Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII*, h. 45-57.

bahkan digambarkan sebagai pusat perlawanan yang harus ditaklukkan demi menjamin keberhasilan monopoli perdagangan Belanda di kawasan timur Nusantara.¹⁴⁷ Narasi tersebut kemudian dijadikan legitimasi politik oleh VOC untuk melancarkan ekspedisi militer terhadap Kesultanan Gowa.

Ketegangan akibat kebijakan monopoli tersebut semakin memperjelas perbedaan mendasar antara visi maritim VOC dan Kesultanan Gowa. Apabila VOC berusaha membangun dominasi ekonomi melalui penguasaan jalur perdagangan secara eksklusif, maka Kesultanan Gowa mempertahankan prinsip *mare liberum* yang menjamin kebebasan berlayar dan berdagang bagi seluruh bangsa. Perbedaan paradigma inilah yang menjadi akar struktural konflik antara kedua pihak sebelum meletusnya Perang Makassar pada tahun 1666-1669.¹⁴⁸

Keberadaan Makassar sebagai salah satu simpul perdagangan internasional menjadikan konflik tersebut tidak hanya berdampak pada Kesultanan Gowa, tetapi juga terhadap jaringan perdagangan Asia yang selama ini memanfaatkan Makassar sebagai pelabuhan persinggahan. Kebijakan monopoli VOC mengancam kelangsungan hubungan dagang antarpedagang dari berbagai wilayah, sehingga perlawanan Kesultanan Gowa dapat dipahami bukan hanya sebagai upaya mempertahankan kedaulatan kerajaan, melainkan juga sebagai bentuk pembelaan terhadap prinsip *mare liberum* dan kebebasan pelayaran yang telah menjadi fondasi perdagangan maritim di kawasan Asia Tenggara.¹⁴⁹

2. Pemicu Konflik dan Ketegangan sebelum Tahun 1660

Ketegangan antara Kerajaan Gowa dan VOC sebelum tahun 1660

¹⁴⁷ Muliadin Iwan, "Pasang-Surut Hubungan Buton–VOC: Studi Masa Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (1751-1752, Dan 1760-1763)," 2016, h. 1760-1763.

¹⁴⁸ Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII*, h. 25.

¹⁴⁹ S R Nilasari, A P Marzaman, and R Kurniasari, "Doktrin Poros Maritim Dunia Dan Keamanan Di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika Di Jalur ALKI II," *Journal of Political Issues* 6, no. 1 (2024): h. 20-31.

merupakan hasil akumulasi konflik kepentingan ekonomi, politik, dan militer yang berlangsung selama beberapa dekade. Sejak awal abad ke-17, VOC secara sistematis berupaya membatasi peran Makassar dalam jaringan perdagangan internasional melalui kebijakan blokade laut dan intervensi terhadap jalur pelayaran.¹⁵⁰ Tindakan ini menimbulkan ketegangan serius karena secara langsung merugikan pendapatan kerajaan dan pedagang lokal.

Salah satu faktor utama pemicu konflik adalah perlindungan yang diberikan Gowa kepada pedagang Portugis dan Inggris, yang merupakan pesaing utama VOC. Sultan Hasanuddin menolak untuk mengusir pedagang non-Belanda dari Makassar, bahkan menjamin keselamatan mereka sebagai tamu dagang. Kebijakan ini membuat VOC gagal mengonsolidasikan monopoli rempah-rempah dari Maluku ke pasar internasional.¹⁵¹

Selain itu, VOC juga memanfaatkan konflik internal di Sulawesi Selatan sebagai strategi melemahkan Gowa. Dukungan VOC terhadap Arung Palakka dari Bone merupakan contoh nyata penerapan politik *divide et impera*. Dengan membantu Bone melawan dominasi Gowa, VOC berharap dapat menciptakan instabilitas politik yang memudahkan intervensi kolonial.¹⁵² Strategi ini memperluas konflik dari sekadar perselisihan dagang menjadi konflik politik antar kerajaan.

Ketegangan semakin meningkat ketika VOC mulai melakukan aksi militer terbatas, seperti penyerangan kapal dagang Makassar dan pendirian pos-pos militer di wilayah strategis. Tindakan ini dipandang oleh Sultan Hasanuddin sebagai bentuk agresi terbuka yang melanggar norma diplomasi antar kerajaan.¹⁵³ Dalam budaya Makassar, tindakan semacam ini menyentuh

¹⁵⁰ Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, h. 22-24.

¹⁵¹ Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, 2: h. 135-137.

¹⁵² Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," h. 102-105.

¹⁵³ Firmansyah, *Perlawanan Sultan Hasanuddin Terhadap VOC 1660-1669 M*, h. 61-63.

nilai *siri*', yaitu harga diri kolektif yang wajib dipertahankan meski dengan pengorbanan besar.

Menjelang tahun 1660, hubungan Gowa dan VOC telah memasuki fase konfrontatif. Upaya perundingan yang dilakukan kedua belah pihak selalu menemui jalan buntu karena VOC bersikukuh pada tuntutan monopoli. Kondisi ini menandai berakhirnya fase konflik laten dan menjadi pengantar langsung menuju konflik terbuka berskala besar.¹⁵⁴



Gambar 2.5. Ilustrasi Ketegangan Politik dan Militer antara VOC dan Kerajaan Gowa Sebelum 1660.¹⁵⁵

Situasi sebelum tahun 1660 menunjukkan bahwa Perang Makassar bukanlah konflik yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang dominasi ekonomi dan resistensi politik.¹⁵⁶ Ketegangan ini menjadi fondasi penting untuk memahami strategi perlawanan Sultan Hasanuddin pada fase berikutnya, sekaligus menjelaskan mengapa konflik tersebut berkembang menjadi perang besar yang melibatkan banyak kerajaan di Sulawesi Selatan.

¹⁵⁴ Ahmad Subair, "Transformasi Somba Opu Dari Bandar Niaga Ke Objek Wisata Sejarah," h. 38-47.

¹⁵⁵ "Arsip Nasional Republik Indonesia Dan Koleksi Sejarah VOC," n.d.

¹⁵⁶ Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII*, h. 27.

BAB III

ANALISIS STRATEGI PERLAWANAN SULTAN HASANUDDIN (1666-1669)

A. Strategi Militer dan Politik

1. Konsolidasi Kekuatan dan Aliansi Regional (Tallo, Wajo, dan Sekutu Lainnya)

Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC tidak dilakukan secara sporadis atau emosional, melainkan melalui langkah konsolidasi kekuatan politik dan militer yang terstruktur. Dalam konteks perang abad ke-17, keberhasilan suatu kerajaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh kemampuan membangun jaringan aliansi regional. Kerajaan Gowa-Tallo menyadari bahwa menghadapi VOC yang memiliki armada laut modern dan dukungan logistik internasional memerlukan solidaritas antar kerajaan di Sulawesi Selatan.¹⁵⁷ Oleh karena itu, sebelum dan selama Perang Makassar (1666-1669), Sultan Hasanuddin melakukan penguatan hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan sekutu.

Hubungan antara Gowa dan Tallo sejak awal merupakan fondasi utama kekuatan politik Makassar. Sistem “*Rua Karaeng na Se're Ata*” (dua raja satu rakyat) mencerminkan struktur pemerintahan kolektif yang solid antara kedua kerajaan.¹⁵⁸ Dalam menghadapi ancaman VOC, kesatuan Gowa-Tallo menjadi kekuatan strategis yang memungkinkan mobilisasi militer lebih terorganisir. Karaeng Karunrung dari Tallo, misalnya, memainkan peran penting sebagai penasihat politik dan penggerak diplomasi regional dalam upaya melawan ekspansi VOC.¹⁵⁹ Kesatuan ini

¹⁵⁷ Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, h. 65-67.

¹⁵⁸ Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII*, h. 52-54.

¹⁵⁹ Andaya, “The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes),” h. 88-

memperlihatkan bahwa konsolidasi internal menjadi langkah pertama sebelum memperluas aliansi eksternal.

Selain memperkuat hubungan dengan Tallo, Sultan Hasanuddin juga berupaya menjalin kembali solidaritas dengan kerajaan-kerajaan Bugis seperti Wajo dan sebagian elite Bone yang masih loyal kepada Gowa. Kerajaan Wajo, yang memiliki tradisi maritim kuat dan armada laut yang tangguh, menjadi sekutu penting dalam menghadapi tekanan Belanda.¹⁶⁰ Dukungan Wajo memperkuat posisi Gowa dalam mempertahankan jalur pelayaran dan distribusi logistik selama perang berlangsung. Strategi ini menunjukkan bahwa Sultan Hasanuddin memahami pentingnya keseimbangan kekuatan regional sebagai penangkal dominasi kolonial.

Namun, situasi politik regional tidak sepenuhnya stabil. VOC memanfaatkan konflik lama antara Gowa dan Bone dengan mendukung Arung Palakka sebagai sekutu utama Belanda.¹⁶¹ Kondisi ini memaksa Sultan Hasanuddin untuk melakukan pendekatan diplomasi ulang kepada kelompok-kelompok yang masih netral atau ragu terhadap dominasi VOC. Konsolidasi ini bukan hanya bersifat militer, tetapi juga ideologis, dengan menekankan persatuan atas dasar kehormatan (*siri*) dan solidaritas kolektif (*pacce*).

Strategi aliansi regional yang dilakukan Sultan Hasanuddin mencerminkan prinsip keseimbangan kekuatan (*balance of power*) dalam teori politik klasik. Dalam perspektif teori perlawanan James C. Scott, langkah ini dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terbuka terhadap struktur dominasi kolonial yang mencoba memecah belah kekuatan lokal.¹⁶² Konsolidasi aliansi menjadi upaya strategis untuk memperbesar daya tawar

¹⁶⁰ Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, h. 140-141.

¹⁶¹ Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," h. 102-105.

¹⁶² Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, h. 16-18.

politik sekaligus memperlambat ekspansi VOC di kawasan timur Nusantara.



Gambar 3.1. Peta Aliansi dan Konstelasi Politik Sulawesi Selatan pada Masa Perang Makassar (1666-1669).¹⁶³

Peta konstelasi politik tersebut menunjukkan bahwa konflik Makassar bukan hanya perang antara Gowa dan VOC, melainkan perang yang melibatkan jaringan kekuasaan regional. Kekuatan Gowa-Tallo dan Wajo berhadapan dengan koalisi VOC dan Bone yang dipimpin Arung Palakka. Dalam konteks ini, strategi konsolidasi Sultan Hasanuddin memperlihatkan bahwa perang tidak semata-mata pertarungan senjata, tetapi juga pertarungan diplomasi dan legitimasi politik di tingkat regional.¹⁶⁴

Dengan demikian, konsolidasi kekuatan dan aliansi regional menjadi fondasi awal strategi militer dan politik Sultan Hasanuddin. Meskipun pada akhirnya Gowa mengalami kekalahan akibat superioritas teknologi militer dan strategi *divide et impera* VOC, langkah konsolidasi ini menunjukkan bahwa Sultan Hasanuddin telah mengoptimalkan sumber daya politik yang tersedia. Strategi tersebut menegaskan bahwa perlawanan Gowa merupakan perlawanan kolektif berbasis solidaritas regional, bukan perjuangan

¹⁶³ Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)."

¹⁶⁴ M I M Dohe, "Politik Simbolik Dan Kekuasaan: Perebutan Kalompoang Dan Intervensi Inggris Di Sulawesi Selatan 1812–1816," *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 4, no. 1 (2025): h. 61-81.

individual semata.¹⁶⁵

2. Taktik Pertahanan Benteng dan Mobilisasi Pasukan

Dalam menghadapi agresi VOC pada periode 1666-1669, Sultan Hasanuddin tidak hanya mengandalkan aliansi politik, tetapi juga memperkuat sistem pertahanan fisik dan mobilisasi militer secara terorganisir. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah penguatan benteng-benteng pertahanan, terutama Benteng Somba Opu yang menjadi pusat pertahanan Kerajaan Gowa-Tallo.¹⁶⁶ Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi kerajaan, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan politik dan kekuatan militer Makassar.

Benteng Somba Opu dibangun dengan konstruksi batu bata tebal dan diperkuat dengan meriam-meriam besar yang sebagian diperoleh dari jaringan perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di pesisir menjadikan benteng ini sebagai titik kontrol utama terhadap lalu lintas laut.¹⁶⁷ Struktur pertahanan ini menunjukkan bahwa Gowa telah mengadopsi sistem fortifikasi modern yang dipengaruhi oleh teknik Eropa dan Asia. Dalam konteks strategi militer, pertahanan berbasis benteng mencerminkan strategi defensif yang bertujuan memperlambat penetrasi musuh sekaligus melindungi pusat logistik kerajaan.

Selain Somba Opu, terdapat pula jaringan benteng lain seperti Benteng Ujung Pandang dan Benteng Panakkukang yang memperkuat sistem pertahanan berlapis.¹⁶⁸ Sistem ini menunjukkan bahwa pertahanan Gowa bersifat terintegrasi dan tidak terpusat pada satu titik semata. Dengan pola pertahanan berlapis tersebut, Sultan Hasanuddin berupaya menciptakan zona

¹⁶⁵ A Abdullatif, "Dialektika Peradaban," in *Dialektika Peradaban: Interaksi Timur Dan Barat Dalam Lintas Sejarah*, 2026, h. 97.

¹⁶⁶ Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," h. 112-115.

¹⁶⁷ Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, h. 145.

¹⁶⁸ Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, h. 24-26.

pertahanan yang dapat menghambat pergerakan pasukan VOC sebelum mencapai pusat kekuasaan.

Namun, keunggulan pertahanan fisik saja tidak cukup tanpa mobilisasi pasukan yang efektif. Sultan Hasanuddin menggerakkan pasukan kerajaan yang terdiri dari prajurit inti Gowa-Tallo serta dukungan sekutu seperti Wajo. Mobilisasi ini dilakukan melalui sistem komando tradisional yang berbasis loyalitas kepada karaeng dan sumpah kesetiaan terhadap kerajaan.¹⁶⁹ Dalam budaya Bugis-Makassar, mobilisasi militer juga dipengaruhi oleh nilai *siri' na pacce*, yang menuntut setiap individu mempertahankan kehormatan kolektif.

Strategi mobilisasi ini menunjukkan bahwa perlawanan Gowa bersifat total (*total resistance*), melibatkan unsur militer reguler maupun rakyat. Dalam perspektif teori strategi klasik seperti yang dikemukakan Sun Tzu, pertahanan yang kuat harus disertai kesiapan moral dan disiplin pasukan.¹⁷⁰ Sultan Hasanuddin tampaknya memahami bahwa kekuatan moral menjadi faktor penting dalam menghadapi VOC yang unggul dalam persenjataan dan teknologi maritim.



Gambar 3.2. Rekonstruksi Benteng Somba Opu sebagai Pusat Pertahanan Gowa Abad ke-17.¹⁷¹

¹⁶⁹ Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII*, h. 61-63.

¹⁷⁰ Tzu, *The Art of War*, Terj. Lionel Giles, h. 77-79.

¹⁷¹ Ahmad Subair, "Transformasi Somba Opu Dari Bandar Niaga Ke Objek Wisata Sejarah."

Benteng Somba Opu dalam rekonstruksi arkeologis menunjukkan kompleksitas sistem pertahanan yang cukup maju untuk ukuran kerajaan lokal abad ke-17. Ketebalan dinding, posisi meriam, serta tata ruang internalnya mengindikasikan kesiapan menghadapi pengepungan panjang. Meskipun demikian, dalam praktiknya, VOC memiliki keunggulan teknologi artileri dan pengalaman tempur di berbagai wilayah Asia.¹⁷² Ketimpangan teknologi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya pertahanan Gowa pada fase akhir perang.

Dengan demikian, taktik pertahanan benteng dan mobilisasi pasukan yang diterapkan Sultan Hasanuddin mencerminkan strategi militer yang sistematis dan terencana. Ia tidak hanya membangun benteng fisik, tetapi juga membangun benteng moral melalui solidaritas sosial dan legitimasi politik. Namun, superioritas teknologi militer VOC serta dukungan Bone di bawah Arung Palakka menjadi tantangan besar yang sulit diimbangi oleh Gowa. Strategi pertahanan ini tetap menunjukkan bahwa perlawanan Sultan Hasanuddin bukan tindakan spontan, melainkan hasil perencanaan militer yang matang dalam mempertahankan kedaulatan kerajaan.

B. Strategi Ekonomi dan Kedaulatan

1. Penolakan Keras terhadap Monopoli Rempah dan Jalur Pelayaran oleh VOC

Strategi perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC tidak hanya diwujudkan dalam bentuk konfrontasi militer, tetapi juga melalui kebijakan ekonomi dan maritim yang tegas dalam mempertahankan prinsip *mare liberum* (kebebasan berlayar). Sejak abad ke-16, Kesultanan Gowa-Tallo berkembang sebagai salah satu pusat pelayaran dan perdagangan maritim terbesar di kawasan timur Nusantara. Posisi geografis Makassar yang strategis menjadikannya simpul pertemuan jalur pelayaran yang

¹⁷² Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, h. 67-68.

menghubungkan Maluku, Jawa, Malaka, Filipina, hingga berbagai wilayah di Asia.¹⁷³ Melalui penerapan prinsip *mare liberum*, para pedagang dari berbagai bangsa seperti Melayu, Arab, Tiongkok, Portugis, Inggris, dan komunitas dagang Nusantara memperoleh kebebasan untuk berlayar, singgah, dan melakukan aktivitas perdagangan di Makassar tanpa harus tunduk pada monopoli satu kekuatan dagang tertentu.

Penerapan prinsip *mare liberum* tersebut bertentangan secara langsung dengan sistem monopoli yang dijalankan VOC. Setelah memperoleh hak istimewa (*octrooi*) pada tahun 1602, VOC berambisi mengendalikan produksi, distribusi, dan harga rempah-rempah, khususnya cengkih dan pala dari Kepulauan Maluku¹⁷⁴ Monopoli tersebut diwujudkan melalui kontrak-kontrak paksa dengan penguasa lokal, penghancuran tanaman rempah di luar wilayah kekuasaan VOC (*extirpatie*), serta pelarangan perdagangan dengan pihak selain VOC. Strategi tersebut bertujuan membatasi akses terhadap komoditas rempah agar pasokan tetap terkendali dan harga jual di pasar Eropa tetap tinggi.

Dalam konteks inilah Sultan Hasanuddin menolak secara tegas tuntutan VOC agar menutup Pelabuhan Makassar bagi para pedagang non-Belanda. Penolakan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi merupakan bentuk pertahanan terhadap kedaulatan politik dan maritim Kesultanan Gowa.¹⁷⁵ Leonard Y. Andaya menyebut Makassar sebagai "*the last great free port in eastern Indonesia*", yang menunjukkan kedudukannya sebagai pusat pelayaran dan perdagangan terbuka terakhir di kawasan timur Nusantara yang belum berada di bawah kendali monopoli VOC. Melalui penerapan prinsip *mare liberum*, Sultan Hasanuddin berupaya mempertahankan hak semua bangsa untuk berlayar

¹⁷³ Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, h. 128-130.

¹⁷⁴ Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, h. 64-66.

¹⁷⁵ Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII*, h. 59-61.

dan berdagang secara terbuka sekaligus menjaga posisi Makassar sebagai simpul perdagangan internasional.

Penolakan terhadap monopoli VOC juga memiliki dimensi ideologis dan keagamaan. Dalam Islam, praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas termasuk dalam kategori tindakan yang mendekati *ihhtikar* (penimbunan barang untuk menaikkan harga), yang dilarang karena menimbulkan ketidakadilan ekonomi.¹⁷⁶ Prinsip perdagangan dalam Islam menekankan kejujuran, keterbukaan, dan larangan eksploitasi. Nilai tersebut selaras dengan adat *pangngadereng* yang menekankan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan sosial. Dengan demikian, kebijakan ekonomi Sultan Hasanuddin tidak hanya rasional secara politik, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan religius.

VOC merespons penolakan ini dengan meningkatkan tekanan ekonomi dan militer. Blokade laut, penyitaan kapal Makassar, serta pembatasan jalur distribusi menjadi strategi utama Belanda untuk melemahkan ekonomi Gowa.¹⁷⁷ Anthony Reid menjelaskan bahwa kontrol terhadap jalur pelayaran merupakan kunci dominasi ekonomi di Asia Tenggara abad ke-17.¹⁷⁸ Dengan menguasai laut, VOC dapat mengisolasi Makassar dari jaringan perdagangan regional. Strategi tersebut menunjukkan bahwa Perang Makassar bukan hanya konflik militer, melainkan juga bagian dari pertarungan ekonomi global antara prinsip *mare liberum* yang menjamin kebebasan pelayaran dan perdagangan di Asia dengan sistem monopoli kolonial yang diterapkan VOC.

¹⁷⁶ Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (Cairo: Al-Falah Foundation, 2013), h. 273-275.

¹⁷⁷ Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, 2: h. 136-138.

¹⁷⁸ Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, h. 142-144.



Gambar 3.3. Jalur Perdagangan Rempah di Nusantara dan Posisi Strategis Makassar Abad ke-17.¹⁷⁹

Peta jalur perdagangan tersebut menunjukkan bahwa Makassar berada di persimpangan rute strategis antara Maluku sebagai pusat produksi rempah dan pasar-pasar besar di Asia serta Eropa. Posisi ini menjadikan Gowa sebagai aktor penting dalam distribusi rempah di luar kontrol VOC. Selama Kesultanan Gowa tetap mempertahankan prinsip *mare liberum*, para pedagang masih memiliki alternatif jalur pelayaran dan perdagangan di luar kendali VOC. Kondisi tersebut menyebabkan sistem monopoli Belanda tidak dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penaklukan Makassar menjadi salah satu prasyarat utama bagi VOC untuk membangun hegemoni perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara.

Secara analitis, strategi ekonomi Sultan Hasanuddin dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni kapitalisme kolonial. Dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, monopoli VOC bukan hanya dominasi ekonomi, tetapi juga upaya membangun struktur kekuasaan yang diterima sebagai “normal” melalui kombinasi paksaan dan legitimasi.¹⁸⁰ Penolakan Gowa terhadap monopoli tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi struktural yang mengancam kedaulatan lokal. Dengan

¹⁷⁹ Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*.

¹⁸⁰ Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, h. 12-13.

mempertahankan prinsip *mare liberum*, Sultan Hasanuddin berupaya menjaga ruang otonomi ekonomi dan kedaulatan maritim Kesultanan Gowa di tengah tekanan monopoli kolonial yang dijalankan VOC.

Dengan demikian, strategi ekonomi dan maritim Kesultanan Gowa bukan sekadar kebijakan niaga, melainkan bagian integral dari perjuangan mempertahankan kedaulatan negara. Penolakan Sultan Hasanuddin terhadap monopoli rempah-rempah dan penguasaan jalur pelayaran oleh VOC menunjukkan bahwa konflik Makassar merupakan pertemuan antara dua paradigma yang saling bertentangan, yaitu prinsip *mare liberum* yang menjamin kebebasan berlayar dan berdagang bagi seluruh bangsa dengan sistem monopoli kolonial yang membatasi akses pelayaran demi kepentingan ekonomi VOC. Pertentangan inilah yang kemudian berkembang menjadi konflik militer terbuka dalam Perang Makassar (1666-1669).

2. **Pertahanan Prinsip *Mare Liberum* (Kebebasan Berlayar)**

Prinsip *mare liberum* (kebebasan berlayar) yang diterapkan oleh Kesultanan Gowa-Tallo menjadi salah satu fondasi utama kekuatan maritim dan ekonomi Makassar pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Melalui prinsip tersebut, setiap kapal dagang dari berbagai bangsa memperoleh kebebasan untuk berlayar, singgah, dan melakukan aktivitas perdagangan di Makassar tanpa harus tunduk pada monopoli satu kekuatan dagang tertentu.¹⁸¹ Kebijakan ini menjadikan Pelabuhan Makassar sebagai pusat distribusi rempah-rempah dari Maluku sekaligus berbagai komoditas lain seperti beras, tekstil, kayu cendana, hasil laut, dan barang-barang dari kawasan Asia. Dengan demikian, Makassar berkembang sebagai simpul perdagangan internasional yang relatif mandiri dari dominasi bangsa-bangsa Eropa.

Penerapan prinsip *mare liberum* bukan sekadar kebijakan ekonomi,

¹⁸¹ Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," h. 90-92.

melainkan strategi maritim yang bertujuan mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gowa. Sultan Hasanuddin memahami bahwa apabila jalur pelayaran dan perdagangan Makassar dikuasai oleh VOC, maka kesultanan tidak hanya kehilangan sumber pendapatan utama, tetapi juga kehilangan posisi strategisnya dalam percaturan politik dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara.¹⁸² Oleh karena itu, mempertahankan prinsip *mare liberum* berarti mempertahankan kedaulatan negara maritim yang bebas dari dominasi monopoli kolonial.

Menurut Anthony Reid, Makassar pada pertengahan abad ke-17 merupakan salah satu pelabuhan paling kosmopolitan di Asia Tenggara.¹⁸³ Para pedagang dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan wilayah hidup berdampingan serta membentuk jaringan perdagangan yang dinamis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemajuan Makassar dibangun di atas keterbukaan jalur pelayaran dan interaksi antarpedagang, bukan melalui sistem monopoli. Oleh karena itu, kebijakan Sultan Hasanuddin mempertahankan prinsip *mare liberum* dapat dipahami sebagai upaya menjaga sistem perdagangan maritim yang terbuka dan berorientasi pada kepentingan bersama.

VOC memandang kebijakan tersebut sebagai ancaman langsung terhadap sistem monopoli yang sedang dibangunnya di Maluku dan Batavia.¹⁸⁴ Selama Makassar tetap menerapkan prinsip *mare liberum*, para pedagang Portugis, Inggris, Arab, Melayu, Tiongkok, maupun pedagang Nusantara masih memiliki akses memperoleh rempah-rempah tanpa melalui jaringan monopoli VOC. Kondisi tersebut menyebabkan VOC tidak mampu mengendalikan sepenuhnya harga maupun distribusi rempah-rempah di pasar internasional. Oleh sebab itu, tekanan terhadap Kesultanan Gowa

¹⁸² Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII*, h. 59-61.

¹⁸³ Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, h. 128-131.

¹⁸⁴ Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, h. 65-67.

bukan hanya bertujuan menghambat aktivitas perdagangan para pesaing VOC, tetapi juga menghapus sistem pelayaran dan perdagangan terbuka yang menjadi alternatif bagi jaringan monopoli Belanda.

Upaya mempertahankan prinsip *mare liberum* juga diwujudkan melalui kebijakan diplomatik dan perlindungan terhadap para pedagang asing yang berlayar ke Makassar. Sultan Hasanuddin memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal yang singgah di pelabuhan serta perlindungan hukum berdasarkan adat *pangngadereng*.¹⁸⁵ Kebijakan tersebut memperkuat reputasi Makassar sebagai pelabuhan yang aman, terbuka, dan dipercaya oleh berbagai komunitas dagang internasional. Dalam perspektif ekonomi politik, langkah tersebut menunjukkan kemampuan Kesultanan Gowa membangun legitimasi maritim yang memperkuat posisi tawarnya di hadapan VOC.



Gambar 3.4. Ilustrasi Pelabuhan Makassar sebagai Free Port Abad ke-17.¹⁸⁶

Ilustrasi tersebut memperlihatkan padatnya aktivitas pelayaran dan perdagangan di Pelabuhan Makassar yang melibatkan kapal-kapal dari berbagai kawasan Asia. Keadaan ini menunjukkan bahwa Makassar bukan sekadar pelabuhan lokal, melainkan salah satu simpul utama jaringan

¹⁸⁵ Bahtiar, "Orang Melayu Di Sulawesi Selatan," h. 376-378.

¹⁸⁶ Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, h. 128-130.

pelayaran internasional di kawasan timur Nusantara. Selama prinsip *mare liberum* tetap dipertahankan, para pedagang masih memiliki kebebasan untuk memanfaatkan Makassar sebagai pusat transit dan distribusi perdagangan sehingga kekuatan ekonomi Kesultanan Gowa tetap terpelihara meskipun menghadapi tekanan dari VOC.

Namun demikian, penerapan prinsip *mare liberum* menghadapi tantangan besar setelah VOC menerapkan blokade laut terhadap Makassar.¹⁸⁷ Blokade tersebut membatasi mobilitas kapal-kapal Makassar menuju Maluku serta mengurangi arus distribusi rempah-rempah yang menjadi komoditas utama perdagangan. Di sisi lain, dukungan VOC kepada Arung Palakka dan Kerajaan Bone semakin mempersempit ruang gerak politik Kesultanan Gowa di Sulawesi Selatan. Kombinasi tekanan militer, politik, dan ekonomi tersebut secara bertahap melemahkan kemampuan Kesultanan Gowa dalam mempertahankan kebijakan maritimnya.

Dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, monopoli VOC dapat dipahami sebagai bentuk dominasi struktural yang berusaha menghilangkan sistem pelayaran dan perdagangan alternatif yang berkembang di Makassar.¹⁸⁸ Sementara itu, menurut teori perlawanan James C. Scott, upaya Sultan Hasanuddin mempertahankan prinsip *mare liberum* merupakan bentuk resistensi terbuka terhadap penetrasi kekuasaan kolonial yang berupaya mengendalikan aktivitas ekonomi masyarakat.¹⁸⁹ Dengan mempertahankan kebebasan berlayar, Sultan Hasanuddin tidak hanya menjaga kepentingan ekonomi Kesultanan Gowa, tetapi juga mempertahankan kedaulatan maritim dan identitas politiknya di tengah ekspansi kolonial VOC.

Dengan demikian, pertahanan terhadap prinsip *mare liberum*

¹⁸⁷ Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, 2: h. 136-139.

¹⁸⁸ Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, h. 12-15.

¹⁸⁹ Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, h. 17-19.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi ekonomi, politik, dan maritim Sultan Hasanuddin dalam menghadapi VOC. Kebijakan tersebut bukan sekadar berkaitan dengan aktivitas perdagangan, melainkan mencerminkan komitmen Kesultanan Gowa untuk mempertahankan kebebasan pelayaran, kedaulatan negara, dan hak setiap bangsa dalam memanfaatkan jalur laut tanpa monopoli. Konflik antara Kesultanan Gowa dan VOC pada akhirnya menunjukkan pertarungan antara dua paradigma maritim yang berbeda, yaitu prinsip *mare liberum* yang menjamin kebebasan berlayar dan sistem monopoli kolonial yang membatasi akses pelayaran demi kepentingan ekonomi VOC.

C. Strategi Ideologis dan Teologis

1. Penggunaan Konsep *Jihad* dan *Siri' na Pacce* sebagai Pendorong Moral

Perlawanan Kesultanan Gowa terhadap VOC dalam Perang Makassar tidak hanya didasarkan pada strategi militer dan politik semata, tetapi juga didorong oleh faktor ideologis dan teologis yang kuat. Dalam konteks ini, Sultan Hasanuddin memanfaatkan nilai-nilai keagamaan Islam dan budaya lokal sebagai instrumen untuk membangun legitimasi moral dalam menghadapi ekspansi kolonial VOC. Ideologi perlawanan ini terlihat dalam penggunaan konsep *jihad* dalam ajaran Islam serta nilai budaya *siri' na pacce* yang telah lama hidup dalam masyarakat Bugis-Makassar. Kedua konsep tersebut berfungsi sebagai pendorong semangat kolektif rakyat untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan dan menolak dominasi asing yang dianggap merugikan sistem sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat setempat.¹⁹⁰

Dalam konteks Perang Makassar, *jihad* dimaknai sebagai perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negeri Islam dari tekanan kolonial VOC

¹⁹⁰ Siti Mardiana Pane, "Analisis Historis Tentang Perjuangan Sultan Hasanuddin Melawan VOC Di Sulawesi Selatan Tahun 1660–1669," h. 236-238.

yang berupaya memaksakan monopoli perdagangan serta dominasi politik di kawasan timur Nusantara. Sultan Hasanuddin sebagai pemimpin Muslim memandang perlawanan terhadap VOC sebagai bentuk kewajiban moral untuk menjaga kemerdekaan umat sekaligus mempertahankan prinsip *mare liberum* (kebebasan berlayar) yang selama ini menjadi dasar kebijakan maritim Kesultanan Gowa. Melalui prinsip tersebut, masyarakat dan para pedagang dari berbagai bangsa memperoleh kebebasan memanfaatkan jalur pelayaran dan melakukan aktivitas perdagangan tanpa tunduk pada monopoli VOC. Oleh karena itu, mempertahankan *mare liberum* dipandang bukan hanya sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pembelaan terhadap keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan konsep jihad dalam tradisi Islam yang menekankan pentingnya melawan ketidakadilan dan penindasan terhadap umat.¹⁹¹

Selain konsep jihad, Sultan Hasanuddin juga memanfaatkan nilai budaya lokal yang dikenal sebagai *siri' na pacce* sebagai sumber motivasi moral dalam perjuangan melawan VOC. Dalam tradisi masyarakat Bugis-Makassar, *siri'* merupakan konsep kehormatan, harga diri, dan martabat yang harus dijaga oleh setiap individu maupun kelompok sosial. Sementara itu, *pacce* mengandung makna solidaritas sosial dan rasa empati terhadap penderitaan sesama. Kombinasi nilai *siri'* dan *pacce* menciptakan kesadaran kolektif yang kuat dalam masyarakat untuk mempertahankan kehormatan dan tidak tunduk kepada kekuasaan yang dianggap merendahkan martabat mereka. Oleh karena itu, perlawanan terhadap VOC tidak hanya dilihat sebagai konflik politik, tetapi juga sebagai upaya menjaga kehormatan dan identitas sosial masyarakat Gowa.¹⁹²

Dalam konteks kepemimpinan Sultan Hasanuddin, nilai-nilai *siri' na*

¹⁹¹ az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah Manhaj," h. 165-167.

¹⁹² Pelras, *Manusia Bugis*, h. 312-315.

pacce dimobilisasi sebagai bagian dari strategi ideologis untuk memperkuat solidaritas rakyat dalam menghadapi tekanan kolonial. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai pemimpin yang memiliki karisma kuat serta mampu membangun loyalitas masyarakat melalui pendekatan budaya dan keagamaan. Ia menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Gowa merupakan bagian dari kewajiban moral yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan politik kerajaan, tetapi juga menyangkut kehormatan masyarakat Bugis-Makassar secara keseluruhan. Dengan demikian, perang melawan VOC dipandang sebagai perjuangan mempertahankan *siri'* atau harga diri kolektif bangsa.¹⁹³

Selain itu, semangat jihad dan nilai *siri' na pacce* juga diperkuat oleh peran para ulama dan tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Gowa. Para ulama memberikan legitimasi keagamaan terhadap perjuangan melawan VOC melalui penyampaian nasihat, khutbah, serta penguatan nilai-nilai keislaman yang menegaskan bahwa mempertahankan kedaulatan negeri Islam dari dominasi kolonial merupakan bagian dari kewajiban moral umat Islam. Dukungan tersebut memperkuat keyakinan masyarakat bahwa perjuangan mempertahankan Kesultanan Gowa bukan sekadar konflik politik, tetapi juga ikhtiar menegakkan keadilan dan melindungi kehidupan umat dari penindasan. Hubungan antara ulama dan penguasa dalam Kesultanan Gowa mencerminkan sinergi antara otoritas politik dan otoritas religius dalam menghadapi ancaman eksternal. Kondisi ini memperkuat solidaritas masyarakat dan mendorong mobilisasi rakyat secara luas dalam perang melawan VOC.¹⁹⁴

Dalam perspektif historis, perpaduan antara konsep jihad dan nilai *siri' na pacce* menunjukkan bahwa strategi perlawanan Sultan Hasanuddin tidak

90. ¹⁹³ Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," h. 88-

¹⁹⁴ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*, h. 150-155.

hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga dibangun melalui pendekatan kultural, spiritual, dan ideologis. Integrasi antara ajaran Islam dan nilai-nilai budaya Bugis-Makassar berhasil membentuk solidaritas kolektif yang memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi tekanan kolonial VOC. Dengan demikian, perlawanan Sultan Hasanuddin tidak hanya merupakan usaha mempertahankan wilayah kekuasaan, tetapi juga perjuangan mempertahankan kedaulatan politik, identitas budaya, dan prinsip *mare liberum* sebagai kebijakan maritim Kesultanan Gowa yang menjadi simbol kemerdekaan dalam mengelola jalur pelayaran dan perdagangan.¹⁹⁵

2. Peran Ulama dalam Membingkai Perlawanan sebagai Perang Sabil

Perlawanan Kesultanan Gowa terhadap VOC pada abad ke-17 tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer dan politik semata, tetapi juga memperoleh dukungan ideologis dan legitimasi religius dari para ulama. Dalam tradisi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, ulama memiliki posisi penting sebagai penasehat spiritual sekaligus otoritas moral yang memberikan legitimasi terhadap kebijakan penguasa. Hal ini juga terlihat dalam Kesultanan Gowa pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, di mana ulama berperan dalam membangun kesadaran keagamaan masyarakat bahwa perlawanan terhadap dominasi VOC merupakan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan negeri Islam serta melindungi kepentingan umat.¹⁹⁶

Kedudukan ulama dalam struktur sosial Kesultanan Gowa telah berkembang sejak proses Islamisasi kerajaan tersebut pada awal abad ke-17. Proses Islamisasi ini tidak hanya mengubah sistem kepercayaan masyarakat, tetapi juga membentuk jaringan intelektual keagamaan yang

¹⁹⁵ Taufik Abdullah, *Sejarah Dan Masyarakat: Lintasan Historis Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2022), h. 77.

¹⁹⁶ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*, h. 150-251.

menghubungkan Gowa dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Nusantara dan Timur Tengah. Para ulama yang datang ke Gowa membawa ajaran Islam serta memperkenalkan sistem pendidikan keagamaan yang kemudian memperkuat identitas Islam dalam masyarakat. Dengan demikian, ketika terjadi konflik antara Gowa dan VOC, para ulama memiliki peran strategis dalam memberikan legitimasi religius terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan kerajaan.¹⁹⁷

Salah satu tokoh ulama yang memiliki pengaruh besar dalam konteks ini adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama besar dari Gowa yang dikenal memiliki jaringan intelektual luas di dunia Islam. Syekh Yusuf tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama sufi, tetapi juga sebagai tokoh yang aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme. Hubungan antara Syekh Yusuf dan Sultan Hasanuddin menunjukkan adanya sinergi antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan dalam menghadapi tekanan VOC. Pemikiran keagamaan Syekh Yusuf menekankan pentingnya mempertahankan keadilan dan menolak penindasan, sehingga ajaran tersebut turut memperkuat legitimasi religius dalam perjuangan melawan kekuatan kolonial.¹⁹⁸

Dalam konteks sosial masyarakat Gowa, peran ulama juga terlihat dalam upaya membangun solidaritas dan semangat kolektif di kalangan rakyat. Melalui pengajaran agama di masjid, pesantren, dan pusat-pusat pendidikan Islam, para ulama menanamkan nilai-nilai keislaman yang menekankan pentingnya mempertahankan kehormatan, keadilan, dan kemerdekaan dari dominasi asing. Ajaran-ajaran tersebut kemudian menjadi landasan moral yang memperkuat semangat rakyat untuk mendukung perjuangan Sultan Hasanuddin melawan VOC. Dengan demikian, legitimasi keagamaan yang diberikan oleh ulama menjadi salah satu faktor penting

¹⁹⁷ Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII*, h. 45-57.

¹⁹⁸ Abdul Rahman Hamid, *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi, Dan Pejuang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), h. 72-75.

dalam mobilisasi sosial selama konflik berlangsung.¹⁹⁹

Selain itu, legitimasi keagamaan juga terlihat dalam penggunaan simbol-simbol Islam dalam perjuangan melawan VOC. Sultan Hasanuddin tidak hanya tampil sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin Muslim yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi umat dari ketidakadilan dan eksploitasi kolonial. Dalam pandangan masyarakat Gowa, perang melawan VOC tidak semata-mata dipandang sebagai konflik politik, tetapi juga sebagai perjuangan mempertahankan nilai-nilai agama dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi religius memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap konflik yang terjadi.²⁰⁰

Dalam perspektif historiografi modern, peran ulama dalam perjuangan melawan kolonialisme di Nusantara sering dipahami sebagai bagian dari dinamika hubungan antara agama dan kekuasaan. Para ulama tidak hanya berperan sebagai tokoh spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki pengaruh dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Dalam kasus Kesultanan Gowa, dukungan ulama terhadap Sultan Hasanuddin memperlihatkan bagaimana otoritas keagamaan dapat digunakan untuk memperkuat legitimasi politik serta meningkatkan solidaritas masyarakat dalam menghadapi ancaman eksternal.²⁰¹

Dengan demikian, strategi ideologis dan teologis yang digunakan oleh Sultan Hasanuddin dalam menghadapi VOC menunjukkan bahwa perjuangan tersebut tidak hanya bersifat militer dan politik, tetapi juga memiliki dimensi religius yang kuat. Peran ulama dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap perlawanan menjadi salah satu faktor yang

¹⁹⁹ Jaffar, *Jaringan Ulama Dan Islamisasi Indonesia Timur*, h. 129-130.

²⁰⁰ Andaya, "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)," h. 98-102.

²⁰¹ Burhanudin, *Ulama Dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia*, h. 66-68.

memperkuat semangat perjuangan rakyat Gowa. Kombinasi antara kepemimpinan politik Sultan Hasanuddin dan dukungan moral dari para ulama menjadikan perlawanan terhadap VOC sebagai perjuangan yang tidak hanya mempertahankan kedaulatan politik, tetapi juga menjaga nilai-nilai keagamaan dan identitas masyarakat Islam di Sulawesi Selatan.²⁰²



²⁰² Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*, h. 140-142.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669), dapat disimpulkan bahwa Sultan Hasanuddin merupakan pemimpin Kesultanan Gowa yang memiliki karakter kepemimpinan kuat dalam mempertahankan kedaulatan politik, ekonomi, dan maritim kerajaannya. Kepemimpinannya dibangun atas perpaduan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal Bugis-Makassar, seperti *siri' na pacce*, *getteng* (keteguhan), dan *lempu'* (kejujuran), yang menjadi landasan moral dalam menjalankan pemerintahan serta menghadapi ancaman kolonial VOC. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Gowa berkembang sebagai salah satu kekuatan maritim terbesar di kawasan timur Nusantara yang menerapkan prinsip *mare liberum* (kebebasan berlayar dan berdagang), sehingga Makassar menjadi pusat perdagangan internasional yang terbuka bagi berbagai bangsa.

Strategi perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC menunjukkan bahwa perjuangan Kesultanan Gowa tidak hanya dilakukan melalui konfrontasi militer, tetapi juga melalui berbagai strategi politik, ekonomi, dan ideologis yang saling berkaitan. Dalam dimensi militer-politik, Sultan Hasanuddin memperkuat sistem pertahanan melalui pembangunan benteng-benteng strategis, penguatan armada laut, serta menjalin hubungan diplomatik dan aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Dalam dimensi ekonomi-kedaulatan, Sultan Hasanuddin mempertahankan prinsip *mare liberum* sebagai bentuk penolakan terhadap monopoli perdagangan VOC yang dianggap mengancam kedaulatan ekonomi Kesultanan Gowa. Sementara itu, dalam dimensi teologis-ideologis, perjuangan tersebut memperoleh legitimasi moral melalui ajaran Islam yang menekankan pentingnya mempertahankan keadilan dan menolak penindasan, serta diperkuat oleh nilai budaya *siri' na pacce* yang menumbuhkan semangat

kehormatan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif masyarakat Bugis-Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi perlawanan Sultan Hasanuddin merupakan bentuk perlawanan yang bersifat komprehensif karena memadukan kekuatan militer, diplomasi politik, kebijakan ekonomi, serta nilai-nilai agama dan budaya dalam menghadapi ekspansi VOC. Strategi tersebut mencerminkan kemampuan Sultan Hasanuddin dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Kesultanan Gowa untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan di tengah tekanan kolonial yang semakin kuat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan memahami perjuangan Sultan Hasanuddin tidak cukup hanya melalui perspektif peperangan semata, tetapi harus dipahami sebagai strategi perlawanan yang menyeluruh. Kepemimpinan Sultan Hasanuddin menjadi faktor utama dalam mengintegrasikan berbagai aspek pertahanan kerajaan sehingga perjuangannya tidak hanya memiliki arti penting dalam sejarah Kesultanan Gowa, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah perjuangan kerajaan-kerajaan Nusantara dalam mempertahankan kedaulatan politik, ekonomi, dan maritim dari dominasi kolonial.

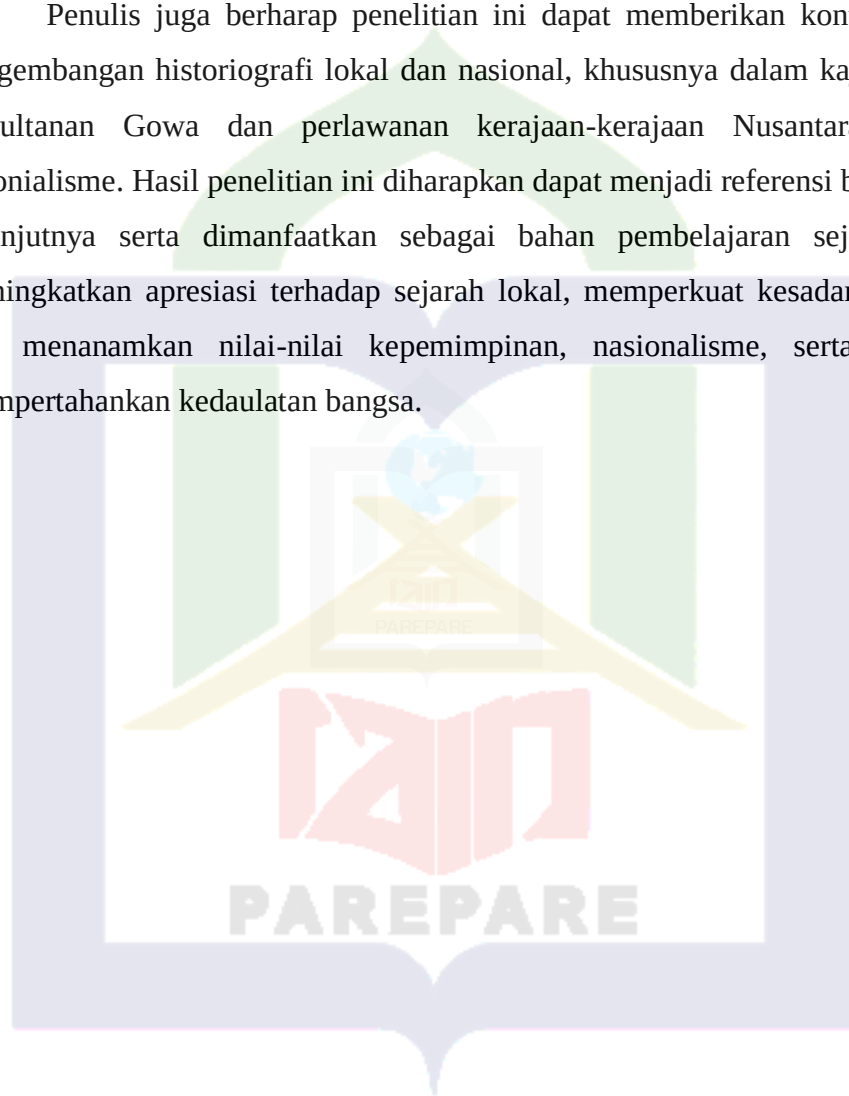
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669), penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam pemanfaatan sumber primer yang sebagian besar diperoleh melalui hasil transliterasi, terjemahan, dan publikasi akademik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan lebih banyak arsip primer, seperti naskah Lontarak, arsip VOC, surat-surat diplomatik, maupun dokumen kolonial Belanda yang berkaitan dengan Kesultanan Gowa agar rekonstruksi sejarah yang dihasilkan semakin komprehensif.

Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai kepemimpinan Sultan Hasanuddin dari perspektif yang lebih luas, seperti sejarah maritim, sejarah politik Islam, diplomasi kerajaan-kerajaan

Nusantara, maupun kajian budaya Bugis-Makassar. Penelitian mengenai implementasi nilai-nilai *siri' na pacce*, prinsip *mare liberum*, serta konsep *tellu cappa* dalam kepemimpinan dan strategi perjuangan Sultan Hasanuddin juga masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner.

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan historiografi lokal dan nasional, khususnya dalam kajian sejarah Kesultanan Gowa dan perlawanan kerajaan-kerajaan Nusantara terhadap kolonialisme. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya serta dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran sejarah untuk meningkatkan apresiasi terhadap sejarah lokal, memperkuat kesadaran historis, dan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, nasionalisme, serta semangat mempertahankan kedaulatan bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Al-Karim.

Abdullah, Taufik. *Sejarah Dan Masyarakat: Lintasan Historis Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2022.

Abdullatif, A. "Dialektika Peradaban." In *Dialektika Peradaban: Interaksi Timur Dan Barat Dalam Lintas Sejarah*, 97, 2026.

Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.

Adam, Muhammad Akbar. *Relevansi Perjanjian Bongaya 1667 Dan 1824 Dalam Perubahan Sosial Politik Antara Kerajaan Gowa Dan Belanda (VOC)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2025.

Ahmad Subair, Adil Akbar. "Transformasi Somba Opu Dari Bandar Niaga Ke Objek Wisata Sejarah." *Islam Dan Budaya Maritim* 7, no. 1 (2024): 38–47.

Aizid, Muhammad Rizem. *Sejarah Lengkap Kolonial Di Nusantara: Portugis, VOC, Hindia Belanda, Dan Inggris*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2025.

al-Bukhari, Shahih. "Innama Al-Harbu Khid'Ah," n.d.

al-Karim, Al-Qur'an. "QS Al-Baqarah" 2 (n.d.): 190.

al-Karim, Al-Qur'an. "QS Al-Muṭaffifin" 83 (n.d.): 1–3.

al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Cairo: Al-Falah Foundation, 2013.

Alfatih, Andy. *Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Palembang: Unsri Press, 2017.

Anawagis, Fitrah, Syukur Syukur, and Ilham Dwi Makkelo. "Arus Balik Kekuasaan Di Sulawesi Selatan Abad Ke-17." *JAWI* 6, no. 2 (2023): 99–109.

Andaya, Leonard Y. "The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)." In *Seventeenth Century*, 35. Leiden: KITLV Press, 1981.

- az-Zuhaili, Wahbah. "Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah Manhaj" 2 (2009): 165–167.
- Azis, Ichsan, and Muhammad Nur. "Islamisasi Di Kawasan Laut Sulawesi Pada Abad Ke-19." *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 5, no. 1 (2019): 317193.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Azra, Azyumardi. *Renaissans Islam Asia Tenggara*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Bahtiar. "Orang Melayu Di Sulawesi Selatan." *Walasuji* 9, no. 2 (2018): 373–387.
- Burhanudin, Jajat. *Ulama Dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: NouraBooks, 2012.
- Clausewitz, Carl. *On War, Terj.* Edited by Michael Howard and Peter Paret. Princeton: Princeton University Press, 1984.
- Coadmin. *Hadis Imam Bukhari No. 2805: Perang Itu Tipuan*. Laduni.ID, 2022.
- Dinas Kebudayaan Kabupaten Gowa. Gowa: Dokumentasi Museum Balla Lompoa, 2022.
- Dohe, M I M. "Politik Simbolik Dan Kekuasaan: Perebutan Kalompoang Dan Intervensi Inggris Di Sulawesi Selatan 1812–1816." *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 4, no. 1 (2025): 61–81.
- Emalia, Imas. *Historiografi Indonesia*. Jakarta: Kerjasama Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2006.
- F. W. Stapel, J.E.Heeres. *Corpus Diplomaticum Neerland-Indicum*. Vol. III. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1975.
- Fahmi, Muhammad Saiful, Ilham Majid, and Ricardo Goncalves Klau. *Buku Ajar Hukum Laut*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Fahmid, Imam Mujahidin. "Tidal Polarization in Elite Ethnic and Makassar Bugis." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6, no. 2 (2012): 180.
- Fikri, F. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023," 2023.

- Firmansyah, Husni. *Perlawanan Sultan Hasanuddin Terhadap VOC 1660-1669 M*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2022.
- Fitriyah, M U. "Islamic Law and Custom in the Land of Bima: A Study in the History of the Government of the Bima Sultanate." *Journal of Islamic History and Manuscript* 4, no. 1 (2025): 15–42.
- Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*. Edited by Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers, 1971.
- Haag, Rijksarchief Den. *Dagregister van Cornelis Speelman 1666–1669*. Den Haag: Rijksarchief, 1960.
- Haag, Rijksarchief Den. *Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal En Raden Aan Heren XVII*. Den Haag: Rijksarchief, 1960.
- Halim, Wahyuddin. "Ekplorasi Atas Praktik Dan Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Kerajaan Wajo Abad Ke- 15/16 Dan Kompatibilitasnya Dengan Sistem Demokrasi Modern." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 18, no. 2 (2016): 31–46.
- Hamid, A R, and A Rifal. *Perkembangan Makassar Menjadi Kota Pelabuhan Dunia Di Jalur Rempah Abad XVII*. Jakarta: Kemdikbud, 2021.
- Hamid, Abd Rahman. *Sultan Hasanuddin Dan Arung Palakka: Masa Lalu Yang (Masih) Aktual*. Sulawesi Selatan, 2013.
- Hamid, Abdul Rahman. *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi, Dan Pejuang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Harnita, Yuni, Zetria Wendra, and Rahmad Hidayat. "Konsep Dasar Kepemimpinan Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Inovatif* 7, no. 3 (2025).
- Irfan, Mohamad. "PERJUANGAN BURUH PELABUHAN DI INDONESIA: Gejolak Politik Dan Industrial." *PENERBIT KBM INDONESIA*, 2026, 108–109.
- Iwan, Muliadin. "Pasang-Surut Hubungan Buton–VOC: Studi Masa Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (1751-1752, Dan 1760-1763," 2016.
- Jaffar, Sirajuddin. *Jaringan Ulama Dan Islamisasi Indonesia Timur*. Yogyakarta:

IRCiSoD, 2020.

Kamaruddin, Muhammad Nur, dan Syarifuddin. “Lontara Patturioloang Ri Tu Talloka (Lontara Patturiolong Gowa), Naskah Koleksi Pribadi Makassar.” Makassar, 2019.

Kamaruddin. *Lontara Bilang Raja Gowa Dan Tallo*. Makassar: Balai Bahasa Sulawesi Selatan, 2010.

Karim, Al-Qur’ān, and Surah Al-Māidah. “No Title,” n.d.

Khaeruddin, K. “Dinamika Politik Kerajaan–Kerajaan Lokal Di Sulawesi Selatan: Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV–XVII.” *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 111–124.

Knaap, Gerrit. *Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal En Raden Aan Heren XVII Der Verenigde Oostindische Compagnie*. Vol. XI. Grote Serie. Geschiedkundige Publicatiën, 1998.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995.

Leonard Y. Andaya, Barbara Watson Andaya. *A History of Early Modern Southeast Asia 1400–1830*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Lombard, Denys. *Le Carrefour Javanais: Essai d’histoire Globale*. Paris: Éditions de l’EHESS, 1990.

Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Vol. 2. Jakarta: Gramedia, 1996.

Masrifah, R, R Mei, B Rama, and A Siraj. “Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal Di Pulau Sulawesi.” *JBI: Jurnal Bahasa Indonesia* 2, no. 1 (2024): 1–10.

Mattulada, Syafnidawaty, and Antonio Gramsci. *Sejarah, Masyarakat, Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Edited by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1982.

Merle Calvin Ricklefs. *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. 4th ed. Stanford: Stanford University Press, 2008.

- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nilasari, S R, A P Marzaman, and R Kurniasari. “Doktrin Poros Maritim Dunia Dan Keamanan Di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika Di Jalur ALKI II.” *Journal of Political Issues* 6, no. 1 (2024): 20–31.
- Nofirman, M T. “GEOGRAFI MARITIM INDONESIA.” *Dunia Penerbitan Buku*, 2026, 37–38.
- Pakpahan, Abdul Fattah. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Pelras, C. “Patron-Client Ties among the Bugis and Makassarese of South Sulawesi.” In *Authority and Enterprise*, 15–54. Brill, 2000.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta–Paris, 2006.
- Poelinggomang, Edward Lamberthus. *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.
- Putri, Helmania, and Siti Maryam Pane. “Analisis Historis Tentang Perjuangan Sultan Hasanuddin Melawan VOC Di Sulawesi Selatan Tahun 1660-1669,” 2025.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Reid, Anthony. “Asia Tenggara Pada Zaman Perdagangan 1450–1680: Volume 2: Ekspansi Dan Krisis.” London, 1993.
- Reid, Anthony. *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*. New Haven: Yale University Press, 1993.
- Risma. “Kerajaan Wajo Dalam Perang Makassar Tahun 1666–1669.” Universitas Hasanuddin, 2022.
- Rosmaida, Rosmaida Sinaga. “Kebijakan Ekonomi VOC Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Indonesia.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 04

(2025): 303–310.

Salim, Subarman. “Jaringan Teluk Bone: Aktivitas Pelayaran Dan Diaspora Bugis Abad XVIII-XIX.” *JAWI* 7, no. 1 (2024): 25–36.

Santoso, H, A Kuswanjono, D K Ainia, and K Putri. “Pengembangan Pendidikan Tinggi Di Indonesia Melalui Ajaran Filosofi Sultan Hasanuddin Dan Kapitan Pattimura.” *HUMANIKA* 29, no. 1 (2022): 60–61.

Scott, James C. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press, 1985.

Setiawan, J. *Arung Palakka: Biografi Dan Perjuangannya Dari Tanah Bugis*. Yogyakarta: CV Jejak Publisher, 2019.

Setiawan, Johan. *Arung Palakka: Biografi Dan Perjua Ngannya Dari Tanah Bugis*. CV Jejak. Jejak Publisher, 2019.

Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Sinaga, Rudi, Jefri V Simanjuntak, Oktavianus P Tondang, and Sari Larasati. “Masa Pemerintahan VOC Di Nusantara: Awal Kedatangan Hingga Penyebab Bubarnya VOC.” *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 389–397.

Siri, Hasnani. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Siswandi, Puji. “Politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Tiga Kerajaan Tellumpoccoe Pada Abad XVII.” UIN Alauddin Makassar, 2016.

Siswandi, Puji, and U.I.N.Alauddin Makassar Skripsi. “Politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Tiga Kerajaan Tellumpoccoe Pada Abad XVII,” 2016.

Siti Mardiana Pane, Hani Putri. “Analisis Historis Tentang Perjuangan Sultan Hasanuddin Melawan VOC Di Sulawesi Selatan Tahun 1660–1669.” *MIND: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Budaya* 5, no. 2 (2025): 235–242.

Sudarwani, Margareta Maria, and Sri Pare Eni. “Revitalisasi Kawasan Benteng Somba

Opu Sebagai Kawasan Bersejarah Peninggalan Kerajaan Gowa Sulawesi Selatan,” 2019.

Sutherland, Heather. *Historical Imagination and Cultural Context in South Sulawesi*. Leiden: KITLV Press, 2011.

Sutherland, Heather. *The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi*. Singapore: Heinemann, 1979.

Syafnidawaty. *Landasan Teori*. Banten: Universitas Raharja, 2020.

Tungkup, Jopita Afnatasia Lumban. “Kebijakan Ekspansi VOC Dari Perdagangan Rempah Hingga Kolonialisme.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8755–8760.

Tzu, Sun. *The Art of War*, Terj. Lionel Giles. New York: Barnes & Noble, 2003.

Vickers, Adrian. *A History of Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Wibawa, Mualim Agung. *Peranan Kerajaan Gowa Dalam Perniagaan Abad XVII*. Jurnal Sejarah Islam Nusantara, 2011.

Yani, Ahmad. *Sejarah Lokal Sulawesi Selatan: Menyusuri Eksistensi Kedatuan Sawitto Di Ajatappareng Abad XVI-XVII*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.





DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-1268/In.39/PP.00.9/PPs.05/06/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang**
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2307381/2024, tanggal 02 Juni 2025 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B-1268/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2025 Tahun 2025, tanggal 02 Juni 2025 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **Dra. Hj. Hasnani Siri, M.Hum.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : HASDIANA MUIN
NIM : 2220203880230010
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Judul Penelitian : KONTRIBUSI SYEKH ABU AL-FATH ABDUL BASIR AL-DARIRI DALAM PENYEBARAN ISLAM DI SULAWESI SELATAN PADA ABAD KE 17
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 02 Juni 2025

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

8c8cf40d30a6b8c2_Turnitin

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpare.ac.id Internet	762 words — 3%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	438 words — 1%
3	doku.pub Internet	199 words — 1%
4	etheses.whiterose.ac.uk Internet	155 words — 1%
5	ebin.pub Internet	97 words — < 1%
6	S., Dimas Indianto. "Pendidikan Islam Nusantara: Kajian Filosofis Dalam Serat Centhini Karya Susuhunan Pakubuwana V.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	74 words — < 1%
7	omp.iainpare.ac.id Internet	70 words — < 1%
8	ahmadrruss12.blogspot.com Internet	62 words — < 1%
9	s3.us-west-1.wasabisys.com Internet	





BIODATA PENULIS



Hasdiana Muin, lahir di Barana pada tanggal 23 Oktober 2003, merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Abd. Muin dan Ibu Badariah berdomisili di Desa Lerang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Penulis memulai Pendidikannya di Raudatul Athfal DDI Garessi lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah DDI Garessi lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Darul 'ulum Ath-Thahiriyah Paladang lulus di tahun 2019. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA

Darul 'ulum Ath-Thahiriyah Paladang, lulus pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, mengambil program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam, UKM Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat IAIN Parepare, Ikatan Mahasiswa DDI Komisariat IAIN Parepare. Penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum KOPRI PMII Rayon FUAD Periode 2025-2026 dan Wakil Ketua Umum DEMA FUAD Periode 2025-2026. Penulis juga aktif di bidang Kedutaan, penulis merupakan Winner Utama Duta Ragam Pariwisata Indonesia tahun 2026, dan Aktif di Duta Generasi Muda Berprestasi serta Duta Generasi Muda Berbakat. Penulis Aktif mengikuti Kompetisi baik secara Akademik maupun Non Akademik. Selama menjadi Mahasiswa penulis telah mencapai 50+ Penghargaan Tingkat Regional, Nasional hingga Internasional. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara di Padukuhan Brajan, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum), penulis mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: “Strategi Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC dalam Perang Makassar (1666-1669)